



MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

MERAWAT MEMORI MEMUPUK KEBANGSAAN

**Komitmen Pada Cita-Cita
Kongres Perempuan Indonesia**

Penulis:

Brigida Intan Printina



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

Brigida Intan Printina

Merawat Memori

Memupuk Kebangsaan:

Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia

Direktorat Sejarah

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan:
Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia

Penulis
Brigida Intan Printina

Penyunting Tata Bahasa
Heri Priatmoko

Penyunting Substansi
Hendra Kurniawan

Desain cover dan infografis
Mesakh Misael Warsiyanta

Tata letak:
Griselda Afni Wulandari

Ukuran:
xxiv, 235 hlm, Uk: 17x26 cm

ISBN:
978-623-709238-4

Cetakan Pertama:
Desember 2019

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-undang

**Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai IX
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270**

SAMBUTAN

Oleh

Direktur Sejarah

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tahun 2019

Kajian mengenai perempuan menjadi hangat setelah perempuan mendapatkan tempat dan kesempatan atau bahkan mendapatkan tekanan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan gerakan perempuan untuk menyatukan visi misi melalui kongres dan itu terwujud melalui Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Setelah itu ada banyak dinamika dan tantangan perempuan karena berbagai budaya dan pemahaman yang masuk ke nusantara sehingga sulit untuk mewujudkan kemerdekaan dan cita-cita bangsa sesuai visi-misi kongres. Buku ini membahas topik “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia”.

Pada rumusan pertama buku ini membahas mengenai cikap bakal kongres perempuan Kongres Perempuan Indonesia merupakan momentum sejarah yang amat penting bagi kebangkitan perempuan Indonesia. Hal ini merupakan tonggak sejarah dan lembaran baru dimana diletakkan dasar-dasar perjuangan perempuan yang memberanikan diri menyatakan kesatuan dan persatuan (Ridjal: 1993). Pada abad ke-20 dikutip dalam sebuah surat kabar Persatoean Indonesia, sehabis peperangan besar munculah rupa-rupa pergerakan

teristimewa pergerakan kebangsaan (Nasionalisme), bahwa kaum perempuan bangkit dari menuju kemerdekaan untuk seluruh Asia, meski di Indonesia pada saat itu baru terdengar perkumpulan-perkumpulannya. Kaum pemuda dalam organisasi nasional memandang secara sadar bahwasanya kaum perempuan bergerak untuk kehidupan yang layak dan berjuang bersama kaum laki-laki untuk kemajuan bangsa. Perempuan yang memiliki kemampuan dan memiliki niat ke arah pembaharuan dapat membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bergerak pada cita-cita kebangsaan "*Handen aan den ploeg, is de beste methode*" (Peratoean Indonesia: 1929)

Pada masalah kedua buku ini membahas lika-liku perjuangan perempuan Indonesia. Pada Kongres Perempuan Indonesia I visi misi pergerakan menyatu dalam berbagai organisasi. KPI I pun berlangsung secara rutin hingga Kongres Perempuan yang ke IV. Kongres tersebut berhenti saat pemerintah Jepang membentuk konsep ibuisme yang menekan ruang gerak perempuan sehingga konsep mengenai feminisme di Indonesia sempat mengalami persinggungan diantara berbagai organisasi perempuan. Hal yang menutup ruang gerak itu ditepis oleh Sukarno namun ada beberapa pergerakan perempuan masih belum menerima tindakan Sukarno yang memilih berpoligami bahkan ada beberapa organisasi perempuan yang menentang keputusan Presiden saat itu. Penerapan ketidakadilan pada perempuan dan domestifikasi yang terjadi pada masa Jepang terulang kembali pada masa Suharto sehingga muncul berbagai lembaga perempuan non-dependen yang bergerak untuk memperkuat misi awal perempuan Indonesia seperti yang diuraikan pada Kongres Perempuan Indonesia I.

Pada rumusan yang terakhir buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri perjuangan visi Kongres Perempuan melalui bidang sosial dan pengajaran. Ada banyak putri-putri generasi yang lahir dari para penggerak organisasi di masa pergerakan nasional melanjutkan misi Ibunya dengan melahirkan lembaga-lembaga perempuan non-dependen. Pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie semakin banyak lembaga-lembaga seperti Kalyanamitra, Suara Ibu Peduli, dan lembaga non-dependen didukung secara penuh membentuk Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan . Bentuk lainnya sebagai kesadaran akan visi misi Kongres Perempuan dilakukan oleh lembaga GAIA dibawah asuhan Ibu A.Nunuk Prasteyo dengan mendirikan PAUD. Bu Nunuk merupakan salah satu informan dalam tulisan ini. Bu Nunuk pernah diangkat Presiden Habibie menjadi komisioner di Komnas Perempuan pada tahun 1998, karena membantu kawan-kawan aktivis mendampingi korban kerusuhan Mei 1998. Beliau juga seorang aktivis yang gencar mengobati luka batin para perempuan korban kekerasan dan trauma.

Dengan demikian, dapat dipetik makna bahwa untuk tetap konsisten meneruskan visi misi kebangsaan perlu usaha keras mengabdikan secara tulus bekerja untuk Negara dengan menjadi Ibu bagi para generasi baru, tanpa meninggalkan kewajiban baik dalam pekerjaan profesi maupun rumah tangga. Para perempuan Indonesia tentunya tidak lupa juga bersyukur bahwa kodrat sesungguhnya diciptakan untuk saling melengkapi. Seperti apa yang telah diuraikan beberapa surat Kartini yang menghadirkan kodrat kemanusiaan yang sesungguhnya. Dinyatakannya secara tegas bahwa tugas mendidik

adalah kerjasama besar putra-putri Bangsa. Seperti suratnya kepada Ny. M.C.E. Ovink- Soer 1900 berikut:

“Saya akan mengajar anak-anak saya baik laki-laki atau perempuan untuk memandang sebagai makhluk yang sama. Saya akan memberikan pendidikan yang sama untuk mereka, tentu saja menurut bakatnya masing-masing. Untuk membuat anak gadis menjadi perempuan baru misalnya saya tidak memaksanya untuk belajar, apabila ia tidak menyukai atau tidak berbakat. Tapi untuk mengurangi haknya dengan mendahulukan kakaknya yang laki-laki, tidak akan!”

“Saya tidak dapat dan tidak mau percaya bahwa laki-laki yang beradab dan terpelajar akan segera menjauhi pergaulan dengan perempuan yang tingkat kesopanan dan kecerdasannya sederajat dengan nya. Untuk menjatuhkan diri ke perempuan yang hina”

“ Kami anak perempuan dapat berbuat banyak supaya anak muda laki-laki berjalan pada jalan yang benar”

Hal ini juga diperkuat oleh organisasi PNI sebagai organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional yang memandang bahwa jika seorang perempuan memenuhi kewajibannya dalam hal-hal kemajuan zaman alangkah indah budinya bagi masyarakat dan bangsa, seperti yang diuraikan dalam sebuah untaian kata berikut:

”Supaya anak-anak laki-laki kami seperti pokok yang tumbuh dengan suburnya pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kami seumpama tiang penjuru yang terpahat akan perhiasan mahligai...Bahwa seorang isteri yang berbudi lebih besar harganya dari manikam, mampu mengatur pekerjaan dahulu dan menyediakan ladang agar kemudian membangun impiannya”. (Persatoean Indonesia: 1929)

Semoga buku ini berkenan dilihat para pembaca semua yang sadar akan komitmen kebangsaan dan mau memperbaharui diri tanpa meninggalkan semangat perjuangan yang menjadi memori kolektif bangsa ini.

Jakarta, 08 November 2019

Direktur Sejarah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aminur' or similar, written in a cursive style.

Dra. Triana Wulandari, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Penyayang karena kasih dan cintanya, penulis dapat menyelesaikan buku “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia”. Buku ini merupakan karya tulis yang disadur dari tugas akhir penulis pada tahun 2012 dan diolah dengan berbagai data terbaru melalui proses metodologi sejarah. Banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari pentingnya komitmen bersama untuk membangun bangsa yang maju. Salah satu hal terpenting yang dapat ditawarkan buku ini ialah menghadirkan kembali cita-cita Kongres Perempuan Indonesia Pertama yaitu memberantas diskriminasi buruh, memperjuangkan pendidikan anak usia dini, memberantas perkawinan dini, dan beberapa hal yang urgen dan relevan untuk dibahas menyangkut permasalahan bangsa saat ini. Cita-cita Kongres Perempuan Indonesia I-IV menjadi suram tatkala berhadapan dengan era Jepang yang mengubah politik Indonesia menjadi politik yang terstruktur bahkan menekan perempuan dengan konsep “ibuisme” bukannya, dimana bangsa Indonesia harus kembali kepada kodrat budaya yang terstruktur dan bukan kodrat alam seperti yang diuraikan dalam konsep “mother earth”. Domestifikasi secara terstruktur bahkan berlanjut pada era Orde Baru, bahkan semakin menyempitkan makna dan peran perempuan sesungguhnya.

Untuk membuka beberapa tabir itu dibangun sebuah jalan untuk menempatkan kembali peran perempuan kepada posisi yang sesungguhnya dan menghadirkan perannya juga sebagai pembangun bangsa seperti pada masa pergerakan nasional. Buku ini juga

memaparkan refleksi kebangsaan untuk menemukan jalan alternatif dimana komitmen kebangsaan dapat memperbaharui mental generasi saat ini ke arah integrasi.

Hadirnya buku ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Ibu Triana Wulandari Direktur Sejarah, dan rekan-rekan di Direkotrat Sejarah, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkat bantuan pemerintah yang memfasilitasi penulisan Sejarah. Penulis berterimakasih kepada para pengumpul data diantaranya Agnes Berlina Printina, Mesakh Misael Warsiyanta, Griselda Afni Wulandari, dan Sisilia Eva. Terimakasih pula para tim reviewer buku diantaranya penyunting substansi Hendra Kurniawan, M.Pd, penyunting tata bahasa Heri Priyatmoko, MA, dan sebagai pembimbing Ibu Dra. Theresia Sumini, M.Pd yang bersedia menyediakan waktunya. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada narasumber uji petik sekaligus informan sumber lisan buku ini diantaranya Dr. Baskara T. Wardaya selaku pengamat konsep kebangsaan dan Ibu A. Nunuk Prasetyo Murniati selaku pengasuh padepokan GAIA dan aktivis perempuan yang gencar menyembuhkan luka batin para perempuan korban kekerasan.

Penulis juga berterimakasih kepada keluarga besar yang memotivasi penulis dengan segala pengorbanannya. Kepada putriku dan suami tercinta Gracia Ivona A.K, suami Iwan Kastomo, Bapak Supriyono, Ibu Wiwik Agustin yang tak hentinya memberi kekuatan, Bapak Kasiman dan Ibu Sutarni yang selalu memotivasi, dan sanak keluarga lainnya.

Akhirnya penulis berterimakasih kepada semua yang ikut ambil bagian dalam proses perjuangan penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat dinikmati dan dimaknai sebagai cerminan komitmen kebangsaan yang bersinergi untuk memajukan Negara tercinta Indonesia.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa buku yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 14 November 2019

Penulis,

Brigida Intan Printina

ABSTRAK

Kajian mengenai perempuan menjadi hangat setelah perempuan mendapatkan tempat dan kesempatan atau bahkan mendapatkan tekanan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan gerakan perempuan untuk menyatukan visi misi melalui kongres dan itu terwujud melalui Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Setelah itu ada banyak dinamika dan tantangan perempuan karena berbagai budaya dan pemahaman yang masuk ke nusantara sehingga sulit untuk mewujudkan kemerdekaan dan cita-cita bangsa yang sesuai visi-misi kongres. Buku ini membahas topik “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia”. Buku ini membahas beberapa rumusan diantaranya; 1. Cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia; 2. Lika-liku perjuangan perempuan Indonesia pasca Kongres; 3. perjuangan visi kongres perempuan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengajaran. Buku ini disusun berdasarkan metodologi sejarah dengan tahapan : 1) Pemilihan Topik; 2) Heuristik; 3) Verifikasi; 4) Interpretasi.

Kata Kunci: *Kebangsaan, Komitmen, Cita-cita KPI*

ABSTRACT

The study of women becomes warm after women get a place and opportunity or even get pressure. There have been several attempts by the women's movement to unite the vision and mission through the congress and that was realized through the first Indonesian Women's Congress. After that there were many dynamics and challenges of women because of various cultures and understandings that entered the archipelago, making it difficult to realize the independence and ideals of the nation in accordance with the congress's vision and mission. This book discusses the topic "Caring for Memory, Fostering Nationality: Commitment to the ideals of the Indonesian Women's Congress". This book discusses several formulations including; 1. Forerunner of the Indonesian Women's Congress; 2. The twists and turns of the struggles of Indonesian women after the Congress; 3. struggle for the vision of a women's congress through Non-Governmental Organizations and Teaching. This book is organized based on historical methodology with stages: 1) Selection of Topics; 2) Heuristics; 3) Verification; 4) Interpretation.

Keywords: *Nationality, Commitment, the Indonesian Women's Congress*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN KOLOFON	ii
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	xi
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING/PENDAMPIN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
GLOSARIUM	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xxiii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Lingkup Penelitian.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka	8
1.5 Kerangka Konsep/Kerangka Pemikiran	31
1.6 Metode Penelitian	36
1.7 Sistematika Penulisan.....	42
BAB II: CIKAL BAKAL KOMITMEN KEBANGSAAN	44
2.1. Perjalanan Awal Kongres Perempuan Indonesia	44
2.2. Pelopor Kongres Perempuan Indonesia	54
2.3. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.....	65
2.4. Perjuangan Organisasi Perempuan.....	78

2.5. Komitmen Organisasi Perempuan untuk Kebangsaan.....	95
BAB III: LIKA-LIKU PASCA KONGRES	104
3.1 Nasib Perempuan Indonesia pada Masa Kolonial ..	108
3.2 Penonaktifan Organisasi Perempuan dan Perlawanan Praktik Jugu Ianfu	109
3.3 Tantangan Perempuan Mewujudkan Cita-Cita Awal Kemerdekaan	115
3.4 Domestifikasi Perempuan Masa Orde Baru	123
3.5 Kasus Buruh Perempuan.....	133
BAB IV: PERJUANGAN VISI KONGRES PEREMPUAN MELALUI LSM DAN PENGAJARAN	141
4.1 Transformasi Visi Misi Kongres Melalui LSM.....	141
4.2 Pendidikan sebagai Jalur Transformatif Penguat Prinsip Kongres	177
KESIMPULAN.....	201
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN.....	216
DAFTAR INFORMAN.....	216
HASIL WAWANCARA.....	217

GLOSARIUM

Agrobisnis	usaha yang berhubungan dengan (tanah) pertanian
Aklamasi	pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara
Ameliorasi	peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau buruk menjadi makna yang baik
Diversitas	perbedaan, kelainan, keragaman budaya
Demokratisasi	pendemokrasian
<i>Common Project</i>	Proyek Umum
<i>Gemeenteraad</i>	Dewan kota
<i>Gender and Development</i>	Gender dan Pembangunan
<i>Grass root</i>	Akar rumpun, mendalam, menyeluruh
Feminisme	Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria
<i>Fujinkai</i>	Organisasi Perempuan pada masa Pendudukan Jepang
Indoktrinasi	pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau

	<p>penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja</p>
Intensifikasi	<p>meningkatkan kegiatan yang lebih hebat</p>
<i>Jugun Ianfu</i>	<p>Perempuan-perempuan penghibur para tentara militer pada masa pendudukan Jepang</p>
<i>land reform</i>	<p>reformasi tanah, kebijakan tentang kepemilikan tanah</p>
Kolot	<p>cara (adat istiadat dan sebagainya) yang tradisional atau kuno</p>
Peyorasi	<p>perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya</p>
<i>Provinciale</i>	<p>Provinsi</p>
Revitalisasi	<p>proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan</p>
Ibuisme	<p>Paham ke-ibuan, tindakan kearah kodrat berdasarkan budaya</p>
<i>Stakeholder</i>	<p>elemen/ pihak yang berkepentingan</p>
Stratifikasi	<p>pembedaan penduduk atau</p>

	masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise
Subordinasi	kedudukan bawahan (terutama dalam kemiliteran);
Hak Pilih Aktif (<i>aktief kiesrecht</i>)	hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan
Hak Pilih Pasif (<i>passief kiesrecht</i>)	rakyat; hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat;

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : R. A Kartini dan Dewi Sartika sebagai pelopor . organisasi-organisasi perempuan Indonesia	48
Gambar 2.2: Infografis Ketua KPI I.....	56
Gambar 2.3: Infografis Wakil Ketua KPI I.....	57
Gambar 2.4: Infografis Sekertaris I KPI I.....	58
Gambar 2.5: Infografis Sekertaris 2 KPI I	59
Gambar 2.6: Infografis Bendahara 2 KPI I.....	60
Gambar 2.7: Infografis Penggerak KPI I.....	61
Gambar 2.8: Infografis Anggota KPI I.....	62
Gambar 2.9: Infografis Anggota KPI I.....	63
Gambar 2.10: Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22- 25 Desember 1928, di Yogyakarta	68
Gambar 2.11: Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia.....	69
Gambar 2.12: Infografis Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember 1928.....	72
Gambar 2.13: Peringatan Hari Ibu.....	75
Gambar 2.14: Infografis Keanggotaan Gerwis	81
Gambar 2.15: KUPP Perwari disaksikan oleh konsultan Perwari Ms. Karen H. Smith, menyerahkan penghargaan kepada seorang pengurus gedung (Seksi Umum)	88

Gambar 2.16: Kerjasama Perwari dan Soekarno dalam penyelenggaraan program perwari.	89
Gambar 2.17: Anggota organisasi perempuan (dahulu Gerwis diganti Gerwani 1960).....	89
Gambar 2.18: Dari kiri-kanan... organisasi Gerwani	88
Gambar 2.19 : Barisan Laskar Putri	96
Gambar 2.20:Salah satu aksi revolusioner	99
Gambar 3.1: Ny. Suwarni Pringgodigdo	111
Gambar 4.1: infografis fakator-faktor.....	149
Gambar 4.2: Konferensi Pers SIP	154
Gambar 4.3: Peluncuran Buku oleh LBH APIK dan para LSM Perempuan	157
Gambar 4.4: Kegiatan LSM Perempuan dalam menanggulangi bencana alam.....	169
Gambar 4.5: Kesadaran Berorganisasi	172
Gambar 4.6: TK Perwari Tasik 1952-1953.....	189
Gambar L.1: Wawancara dengan Dr. Baskara T. Wardaya	217
Gambar L.2: Wawancara dengan A. Nunuk Prasetyo Murniati	223

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Konsep Pembentukan Bangsa Indonesia	11
Bagan 1.2: Bagan Kerangka Berpikir	36
Bagan 2.1: Napak Tilas Organisasi-organisasi	102
Bagan 3.1: Infografis Domestifikasi Politik Orde Baru	129
Bagan 4.1: Infografis Faktor-faktor organisasi perempuan.....	147
Bagan 4.2: Infografis Organisasi Perempuan Non-Pemerintah	167
Bagan 4.3: Program yang ditawarkan kepada LSM Perempuan	169

DAFTAR SINGKATAN

ASIB	<i>Al emene Steum Fonds voor Indlandsche Bihoeftigen</i>
APIK	<i>Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan</i>
GAKTPI	<i>Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia</i>
GERWANI	Gerakan Wanita Indonesia
GERWIS	Gerakan Wanita Isteri
GOW	Gabungan Organisasi Wanita
GWS	Gerakan Wanita Sosial
HASPARI	Himpunan Serikat Perempuan Indonesia
IIKP	Ikatan Istri Kementerian Penerangan
IWKA	Ikatan Wanita Kereta Api
KOWANI	Kongres Wanita Indonesia
KHD	Ki Hadjar Dewantara
KORPRI	organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan
KPI	Kongres Perempuan Indonesia
KOWANI	Kongres Wanita Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LPSM	Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat
SIP	Suara Ibu Peduli
P4A	Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
PERWARI	Persatuan Wanita Republik Indonesia
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PPI	Perikatan Perempuan Indonesia
PPII	Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia
PPPI	Perserikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia
MWK	Musa Wanita Katolik
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SERUNI	Seruan Perempuan Indonesia
UKIDA	Usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak
PERSIT	Persekutuan Istri Tentara
PIKAT	Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun
YASANTI	Yayasan Annisa Swast

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bergulirnya proses transisi demokrasi menjadi fenomena menarik bagi masyarakat Indonesia, terlebih kaum perempuan dengan populasi terbesar di telatah Indonesia. Kendati Presiden Jokowi menyediakan kesempatan partisipasi perempuan dalam parlemen, tetapi sukar dipungkiri masih berjubel perempuan Indonesia belum memahami kemampuan dan perannya.

Ada setumpuk alasan yang menjadi tolok ukur tulisan ini diangkat. Pertama, seluruh perempuan di Indonesia lintas generasi perlu memadukan asa mulia kemerdekaan dan perlu adanya pengetahuan dan komitmen mendalam sebagai agensi yang mampu menanggapi problem kebangsaan.

Kedua, minimnya akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di level lokal maupun nasional agar perempuan memperoleh kesempatan membangun bangsa tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu bagi para generasi pembangun bangsa.

Ketiga, belum ada sarana mentransformasikan ide kebangsaan para tokoh penggerak perempuan. Kala ini, terdapat banyak media yang bisa dipakai untuk sarana menggali karakter kebangsaan. Namun acapkali kaum pemuda tenggelam dalam suasana dan situasi yang pragmatis. Hal itu memicu disintegrasi di tingkat keluarga hingga masyarakat.

Sejumlah riset perihal perempuan menyoroti pelabelan negatif yang terstruktur dan masif pasca kemerdekaan. Namun tulisan ini hendak mengangkat sepele pandangan bahwa generasi detik ini sanggup mengecap kebaikan dan prestasi perempuan dalam pembangunan bangsa. Sitti Soendari salah satu tokoh perempuan dalam Kongres Perempuan di Yogyakarta pada Desember 1928 menguatkan jiwa kebangsaan dalam kerangka keberagaman dengan mengusung tema “Kewajiban dan cita-cita putri Indonesia” (Rahayu, 2017). Cita-cita mengenai kebangsaan merupakan napak tilas yang diusung para tokoh organisasi-organisasi kebangsaan dalam sumpah pemuda yang mampu mengorganisasi semangat kaum perempuan untuk memperjuangkan gagasan kebangsaan.

Kebangkitan perempuan Indonesia pada arah kebangsaan dimulai dari transformasi tokoh penggerak Kartini dan Dewi Sartika. Kala itu, pandangan mereka mulai mendapatkan arahnya selepas pembaharuan organisasi nasional oleh Budi Utomo. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi perempuan Indonesia yang baru memulai langkah awal bagi cita-cita luhur bangsa. Sebelum Budi Utomo berdiri, barisan tokoh perempuan mengusung misi memperjuangkan generasi perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang serta menentukan kehidupan keluarga (Pringgodani, 1970: 20-21). Sejatinya, ada angan besar dalam benak Kartini guna membebaskan kaum perempuan Indonesia lewat pendidikan. Terbukti, Kartini dua kali angkat pena menyoroti pendidikan. Lewat suratnya bertarik 11 Oktober 1901, ia menulis (Kartini, 1987:76):

Menurut ayah, menjadi gurulah yang terbaik bagi kami...Di mana lagi aku akan dapat menyebarkan cita-citaku secara lebih baik dari pada di situ, sebagai pendidik angkatan muda yang akan menjadi perempuan ibu masa depan?...

Kemudian dalam secarik surat y6ang dialamatkan kepada Ny. Abendanon tertanggal 21 Januari 1901, ia tanpa ragu mengatakan:

Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan...dan makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan?... Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat.

Asa itu sekian waktu terpendam, hingga cita-cita itu terwujud melalui Kongres Perempuan Indonesia. Semula, Kongres digelar demi mengukuhkan suatu organisasi dan dimulai dari Kongres Pemuda yang sudah dikerjakan lebih dulu sebelum Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Pemuda yang dihelat 28 Oktober 1928 (kini dirayakan sebagai hari Sumpah Pemuda) ialah cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta, tepatnya di gedung yang kini dinamai gedung Wanitatama, sekaligus saksi pembaharuan organisasi perempuan Indonesia lewat Kongres Perempuan Indonesia kali pertama (Soewondo, 1955:128). Beberapa organisasi gegas meriahkan kongres perempuan diantaranya Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanito Moeljo dan perempuan yang tergabung dalam Sarekat Indonesia, Jong

Islaminten Bond serta Wanita Taman Siswa (Wieringa, 1988:12).
Sedikit contoh untuk menyebut sederet tokoh organisasi perempuan:
Nyi. Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, Ny. Soekonto
dari Wanita Oetomo dan Sujatin Kartowijono dari Poeteri Indonesia
(Prasetyo, 1998:17).

Kiprah ibu periode modern dalam membina masa depan generasi melalui keluarga begitu pokok. Hal ini senafas dengan buliran ide yang terbuhal dari kepala Kartini. Pada 4 Oktober 1902 Kartini angkat pena untuk bercakap-cakap bersama Prof. G.K. Anton dan Nyonya dari Jena (Mouton, 1960):

Jika kami menginginkan pendidikan dan pengajaran bagi kaum perempuan... itu bukan karena kami ingin menjadikan perempuan saingan lelaki...tetapi... kami ingin menjadikan perempuan lebih cakap melakukan tugas besar yang diberikan Ibu Alam ke tangannya agar menjadi ibu: pendidik umat manusia yang utama... Kepada kaum ibu, pusat kehidupan rumah tangga, dibebani tugas besar mendidik anak-anaknya...

Mimpi agung sebagai pedagog ialah secuil gagasan kebangsaan rombongan tokoh penggerak kongres perempuan yang kontekstual dan mampu menggelorakan gagasan generasi bangsa. Semua itu akan disuguhkan secara mendalam melalui buku yang berjudul “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia”. Pada bagian pertama diuraikan cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia. Program membentuk badan federasi, menerbitkan surat kabar, memperkokoh pendidikan, mencegah perkawinan anak-anak, pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, membentuk perkumpulan

berasaskan kebangsaan, kerakyatan, dan kenetralan terhadap agama dengan tujuan Indonesia Raya. Beberapa hal tersebut menjadi program pokok yang mewarnai cikal bakal lembaga sosial. Hal ini penting karena masih menjadi permasalahan yang urgen untuk dibahas berlandaskan prinsip kebangsaan.

Bagian kedua akan menyoroti tantangan (lika-liku) perjuangan perempuan pasca kongres. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan para perempuan lewat jalan organisasi dan pendidikan namun di beberapa era masih terjadi diskriminasi dan berbagai tekanan yang menimpa perempuan Indonesia.

Terakhir, hendak disajikan beberapa karya perempuan yang beraktivitas melalui LSM dan berpegang teguh pada prinsip pembangunan bangsa. Gagasan para mantan aktivis yang masih hidup juga akan diangkat dalam penulisan berlandaskan prinsip-prinsip kebangsaan. Bab ini menguraikan beberapa hal mengenai Lembaga Masyarakat Perempuan yang muncul periode Reformasi dan karya-karya pendidikan untuk menguatkan prinsip kongres.

Dari beberapa poin di atas, penulisan buku sejarah ini mengangkat judul “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia” dengan harapan mendalam agar generasi memahami prinsip kebangsaan yang mesti menjadi karakter kolektif dalam membangun bangsa.

1.2 Permasalahan dan Lingkup Penelitian

A. Permasalahan

1. Bagaimana cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia?

2. Bagaimana lika-liku perjuangan perempuan Indonesia pasca Kongres?
3. Bagaimana perjuangan visi kongres perempuan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengajaran?

B. Lingkup Penelitian

Penulis memakai metode penelitian historis dan kualitatif dalam karya ini. Pada topik permasalahan pertama dan kedua penulis menggunakan metode historis sedangkan pada permasalahan ketiga menggunakan data kualitatif. Penulis membatasi riset berdasarkan teknik, sumber, teori, dan waktu. Adapun beberapa batasan pokok dalam riset ini:

1. Lahirnya Kongres Perempuan Indonesia dengan kepeloporannya
2. Cita-cita Kongres Perempuan Indonesia melalui organisasi-organisasi dari masa ke masa
3. Tantangan menuju cita-cita Kongres Perempuan Indonesia
4. Dampak pembatasan pada cita-cita Kongres Perempuan Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan sebagai komitmen pada cita-cita Kongres Perempuan Indonesia
5. Komitmen pada cita-cita Kongres Perempuan Indonesia di bidang pendidikan

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan penelitian:

1. Menganalisis cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia dalam merespon tantangan kebangsaan
2. Menguraikan lika-liku perjuangan perempuan Indonesia pasca Kongres.
3. Memperdalam perjuangan visi kongres perempuan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengajaran.

B. Manfaat

1. Memperkuat memori kolektif perjuangan perempuan Indonesia

Penulisan buku sejarah “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia” dapat memperkuat memori kolektif perjuangan perempuan Indonesia. Politik kebangsaan yang diusung para pelopor organisasi nasional seperti Budi Utomo menjadi jembatan bagi perempuan untuk mendedikasikan diri bagi bangsa kala itu. Semangat inilah yang mestinya disemaikan sebagai suatu wadah bagi perempuan Indonesia sebagai pahlawan keluarga sekaligus menjadi pahlawan bangsa.

2. Memperkuat kesadaran kebangsaan di setiap elemen masyarakat maupun pemerintahan

Dengan program-program kritis dalam Kongres Perempuan Indonesia diharapkan kesadaran kebangsaan bukan hanya tugas para pemerintah namun juga masyarakat. Banyak masyarakat khususnya bagi komunitas sosial baik di perkotaan maupun di

pedesaan belum menyadari bahwa ada prinsip-prinsip pembangunan bangsa harus terarah dan memiliki komitmen pada pembangunan untuk mempertahankan eksistensinya sehingga diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi komunitas atau lembaganya namun juga bagi bangsa.

3. Memperkuat karakter kebangsaan melalui media inovatif di era global

Adanya penulisan buku ini diharapkan agar saban generasi menyadari terpikulnya tugas membangun bangsa tidak terbatas pada derajat dan status, namun semua kalangan khususnya para pemuda milenial yang saat ini mudah terombang-ambing oleh situasi yang dapat memicu pragmatisme dan radikalisme. Dengan adanya media inovatif sebagai sarana merawat memori dan memupuk kebangsaan gagasan kritis Kongres Perempuan Indonesia, pemuda serta pemudi bangsa mengerek asa sanggup memperdalam karakter kebangsaan seperti jiwa kepemimpinan, kejujuran, keadilan, demokratis, dan kemanusiaan. Buahnya, proses pembangunan bangsa kian kokoh lantaran dilandasi karakter kebangsaan.

1.4 Kajian Pustaka

A. Merawat Memori

Judul utama “merawat memori” untuk mengingatkan kembali falsafah Rahim bahwa jika ada kekuatan dalam memahami kesetaraan gender dan gerakan feminisme. Meski ada berbagai dinamika yang datang atas kebudayaan Indonesia yang heterogen namun lebih dari itu bahwa

perempuan Indonesia harus memaknai dirinya memahami konsep peran perempuan yang pernah ada sepanjang rekam jejak perjuangan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya.

Salah satu hasil dari pembudayaan manusia adalah pendidikan. Dalam buku ini juga banyak mengangkat kutipan dan relevansi pendidikan saat ini yang sangat urgen. Banyak pemahaman mengenai konsep gender dan feminis yang beragam. Hal ini pula yang terjadi dengan budaya yang ada di Indonesia.

Sebagian orang memandang, budaya adalah ciptaan manusia yang dilandasi situasi lingkungan yang yang tidak dipahami manusia (misteri). Pandangan ini memberikan peluang untuk mengubah ciptaan tersebut, apabila akibatnya tidak membuat manusia selamat. Disisi lain, ada pandangan yang percaya bahwa budaya adalah kodrat alam yang tidak dapat diubah. Dua pandangan ini dapat mengaburkan kebenaran dan mempengaruhi pendidikan perempuan(Murniati, 2004:18).

Untuk merawat memori komitmen kebangsaan diperlukan kerjasama antar semua pihak baik laki-laki maupun perempuan. Kebangkitan perempuan yang sudah berabad-abad ditandani dengan perjuangan perempuan untuk membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang tidak adil. Sejak perempuan sadar bahwa dirinya sebagai manusia diperlakukan tidak adil, maka mereka memberontak. Namun, karena gerakan pembodohan perempuan juga telah terjadi, maka usaha kebangkitan perempuan melalui

pendidikan seperti yang diupayakan Kartini membutuhkan waktu yang lama pula. Upaya peningkatan pengetahuan perempuan melalui pendidikan ini, akan terhambat apabila pihak-pihak yang menyelenggarakan pendidikan perempuan tidak mempunyai visi yang sama, atau bahkan bertentangan. (Murniati, 2004: 19)

B. Mempupuk Kebangsaan

Tekad membentuk sebuah bangsa telah tertanam dibenak para pendahulu ketika diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda yang terdiri atas perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok suku bangsa di kepulauan Nusantara mengikrarkan janji sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia yang memiliki tanah air dan satu bahasa. Tekad itu juga diperkuat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai salah satu tanda kebesaran suatu bangsa.

Tradisi mengikrarkan suatu konsensus melalui janji dan sumpah telah ada semenjak zaman kerajaan dan menjadi wawasan Nusantara untuk membentuk bangsa ini. Untuk menyatukan Nusantara, Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari (1268-1293) menganggap perlu menaungi Nusantara dalam satu kekuasaan politik agar mampu menghadapi serangan dari luar. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu mengumandangkan *Doktrin Cakrawala Mandala Dwipantara* (Marwati Djoened Poesponegoro dkk, “Sejarah Nasional Indonesia”). Doktrin tersebut dilanjutkan oleh Ratu Tribuana Tungadewi (1328-1350) dan Raja Hayam Wuruk (1350-1389)

dari Kerajaan Majapahit dengan perwujudan perjuangan Patih Gajah Mada pada tahun 1331 hingga tahun 1357 dengan sumpahnya “*amukti palapa*” (Wahyono: 2007).

Ketika Republik Indonesia terbentuk doktrin yang menjadi strategi dan tradisi untuk menyatukan wilayah pada masa Kerajaan Singasari diangkat kembali pada tahun 1957 dalam Deklarasi Juanda dan selanjutnya pada tahun 1966 disebut sebagai wawasan Nusantara.

Bagan 1.1: Konsep Pembentukan Bangsa Indonesia



Wahyono (2007:65) menegaskan, Sumpah Pemuda tahun 1928 mengandung tiga konsepsi kebangsaan sekaligus, yaitu konsepsi tentang bangsa atau *nation conception*, konsepsi tentang wilayah atau *space conception*, dan konsepsi tentang kebudayaan atau *cultural conception*.

Sukarno mengkaji teori terjadinya bangsa dan mengutip gagasan Ernest Renan bahwa adanya sekelompok manusia yang ingin bersatu, *le desire d'être ensemble*. Sedangkan OTTO Bauer, seorang ahli ilmu politik juga menambahkan persyaratan adanya unsur persatuan nasib. Dari kedua pandangan itu Sukarno mengungkapkan (dalam pidato “Lahirnya Pancasila” 1945) bahwa kedua unsur itu saja tidak cukup, harus ada satu lagi, yaitu unsur tempat di mana kelompok manusia yang ingin bersatu memupuk persatuan nasib berpijak pada satu tempat yang sama. Bangsa adalah persatuan antara manusia dan tempat, yaitu bumi di mana kaki berpijak, tempat itu adalah tanah air (Wahyono, 2007: 66).

Wawasan Nusantara dikembangkan menjadi Wawasan Kebangsaan Indonesia. Suku-suku bangsa adalah satu bangsa dengan satu tanah air dengan komitmen tidak hanya menjiwai perjuangan bangsa melawan penjajah namun satu wawasan menjadi bangsa yang bersatu merdeka adil dan makmur. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan L.B Moerdani dalam buku “*Menggerakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*”(1991), mengatakan ada tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara

keseluruhan agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi itu ialah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan merupakan kesadaran bangsa yang tumbuh pada setiap pribadi karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan organisasi-organisasi perempuan pada masa pergerakan dan menjaga komitmen kebangsaan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat melalui program-program sosial demi kemajuan bangsa. Rasionalisasi rasa kebangsaan akan melahirkan paham kebangsaan yaitu gagasan nasional mengenai hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya rasa dan paham kebangsaan secara bersama akan mengibarkan semangat kebangsaan berupa komitmen bersama baik dari organisasi sosial yang juga diilhami dari pergerakan perempuan, kaum marginal dan bekerjasama dengan elit politik melawan semua ancaman disintegrasi bangsa.

Wawasan mengenai kebangsaan diharapkan sejalan dengan pelaksanaannya. Salah satu kesadaran kebangsaan ialah melihat peluang lain dengan meneguhkan komitmen pemuda khususnya cita-cita perempuan dalam berorganisasi dan berlembaga pasca Sumpah Pemuda yang diupayakan dalam Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1928.

Dalam suatu wawancara salah satu ahli sejarah Dr. Baskara T. Wardaya menyatakan bahwa kebangsaan sejak awal sudah mendapat tantangan, misalnya pemberontakan daerah tahun 1956-1958, ada separatism di Maluku, dan DI/TII di Jawa. Pemberontakan itu bisa diatasi sebagai bangsa. Namun untuk jangka pendek ada pula ideologi trans-nasional yang sudah masuk ke Indonesia, radikalisme masuk di situ dengan memakai kendaraan agama.

Jika ingin membangun kebangsaan harus diperjuangkan dari beberapa segi tersebut; 1) dari dalam negeri; 2) ada penyaringan dari luar negeri; 3) dan ada kegagalan-kegagalan masa lalu dari beberapa pihak yang harus diatasi; 4) juga kelompok-kelompok radikal yang harus ditindak tegas. Jika tidak akan terancam Negara kita sebagai bangsa, sama seperti Negara lain yang mempunyai masalah yang sama seperti Yugoslavia dan Negara-negara Timur Tengah dimana konsep kebangsaannya masih kacau atau “gagal” mengelola rasa kebangsaan.

C. Perempuan

Kata *Perempuan* dalam pandangan masyarakat Indonesia mengalami degradasi semantis atau *peyorasi* yaitu penurunan nilai makna (arti sekarang lebih rendah dari arti dahulu), sehingga kata wanita dianggap mengalami *ameliorasi* (perubahan makna yang semakin positif atau arti sekarang lebih tinggi daripada arti dahulu). Ameliorasi hanya terjadi dalam

Kamus Bahasa Indonesia dalam banyak edisi yang sudah mengalami "jawanisasi" atau "kramanisasi", tetapi dalam konteks sejarah kata perempuan memiliki makna dan arti tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai sumber sebagai berikut:

- 1) **Menurut KBBI**, *keperempuanan* juga berarti kehormatan sebagai perempuan. Di sini sudah mulai muncul kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia bergender femininis. Tersirat juga makna “kami jangan diremehkan” atau “kami punya harga diri” (*TPKPB*, 1988:670).
- 2) **Secara etimologis**, kata *perempuan* berasal dari kata *empu* yang berarti tuan, (orang yang mahir atau berkuasa), maka dikenal juga kata-kata seperti; *empu jari* (ibu jari) dan *empu gending* (orang yang mahir mencipta tembang). Kata *perempuan* juga berhubungan dengan kata *ampu* (penyangga), kata *mengampu* artinya menahan agar tak jatuh, kata *mengampukan* berarti memerintah. Kata *perempuan* juga berakar erat dari kata *empuan*, kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya sapaan hormat pada perempuan, sebagai pasangannya ialah kata *tuan* yang artinya sapaan hormat pada lelaki (Mardiwarsito, 1986:6).
- 3) **Prof. Slametmuljana** mengakui bahwa kata yang sekarang sering direndahkan, ditempatkan di bawah *wanita*, ini berhubungan dengan makna 'kehormatan' atau 'orang terhormat'. Tetapi, ia juga melihat hal lain

yang dipahami kelompok masyarakat tertentu. Maka, ia pun tidak mampu menyembunyikan keheranannya berikut ini: "...apa sebab perempuan tempat kehormatan itu semata-mata diperuntukkan bagi wanita, sedangkan hormat dan bakti setinggi-tingginya menurut adat ketimuran justru datang dari kaum wanita, terhadap suami" (Slametmuljana, 1964:61).

- 4) *Dari sudut sejarah organisasi-organisasi nasional*, kata *perempuan*lah yang telah menyumbangkan kontribusi historisnya. Dalam kongres pertama organisasi dinamai "Kongres Perempoean Indonesia Pertama, yang berlangsung pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta (Rahayu, 1996:29-42). Dalam Kongres I ini disepakati bahwa persamaan derajat hanya dapat dicapai bila susunan masyarakatnya tidak terjajah. Langkah organisasi pertama yang dilakukan adalah membentuk "Perserikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia" (PPPI). Terkait itu, dalam perjalanan sejarah lahir Kowani, Perwari, Perwani, yang selalu diikuti huruf /W/ merupakan jejak-jejak historis lingual lebih dipilih kata "wanita", dan bukan "perempuan", sehingga saat ini yang dikehendaki bukan perempuan mandiri, melainkan perempuan penurut.
- 5) *Masa kemerdekaan*, seperti disebut di atas, derap Kongres Perempuan Indonesia sudah hilang dari peredaran. Muncul pengganti-penerusnya, seperti; Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Sejak pra-

kemerdekaan, para istri pegawai sangat mendominasi. Sejak inilah wanita secara resmi menggeser makna perempuan. Sejak saat itu setiap partai-partai politik di Indonesia juga mempunyai anak organisasi wanita, bukan perempuan, misalnya Wanita Demokrat dan Organisasi Wanita Marhaen (PNI), Organisasi Wanita Indonesia (Gerwani, PKI), dan pasca-1965 ada Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), serta Dharma (1974) (Rahayu, 1996:30-31).

Secara umum perempuan ialah untuk seluruh kaum perempuan baik kelas atas maupun bawah. Terbukti dari berbagai tulisan sejarah Indonesia menunjukkan organisasi-organisasi perempuan dalam penulisannya.

Pada perkembangan selanjutnya, dilakukan studi lebih lanjut mengenai organisasi-organisasi perempuan dan makna perempuan yang digunakan di Indonesia oleh *Cora Vreede-De Stuers*. *Cora* melihat perjuangan organisasi-organisasi perempuan Indonesia, baik dalam hal melawan adat maupun kolonial. Dalam hal ini, ia merekonstruksi beberapa aspek. Pertama, mengenai identitas “perempuan Indonesia” ditinjau dari asal-usul sosio-kulturalnya dan yang mencapai kesatuan pandang dalam melawan hukum perkawinan (kawin paksa dan poligami) dan pembodohan terhadap perempuan. Kedua, ia pun merekonstruksi kesadaran personal, kesadaran organisasi, hingga seluruhnya itu berujung pada organisasi perempuan nasional dalam himpunan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) (Rahayu, 2008).

Dari berbagai pemaknaan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa *organisasi perempuan* merupakan usaha sekelompok orang untuk mencapai cita-citanya yaitu membebaskan diri dari diskriminasi dan eksploitasi, sehingga dapat mengurangi anggapan umum yang menyatakan perempuan sebagai kelompok inferior atau subordinasi (Nurliana, 2000:16).

Pada masa pergerakan nasional organisasi-organisasi perempuan menjadi tonggak sejarah yang membuktikan peran besar kaum perempuan dalam perjuangan revolusi nasional. Untuk itu, masa-masa ini dapat menjadi pedoman di masa selanjutnya, agar organisasi-organisasi perempuan Indonesia dapat terus berkarya.

Sumber yang dapat digunakan dalam menjelaskan organisasi-organisasi perempuan Indonesia dari sudut sosiologi dan sejarah ialah *Potret Organisasi-organisasi Wanita di Indonesia*. Organisasi perempuan muncul sebagai reaksi atas adanya organisasi sosial dan kelompok-kelompok formal yang timbul dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akibatnya menunjukkan berbagai variasi dalam kehidupan berorganisasi dalam perkembangan masyarakat (Suyochondro: 1984).

Organisasi perempuan tersebut memunculkan kaum feminim yang memahami permasalahan perempuan dan berbagai ideologi feminisme. *Ideologi feminisme* berisi gagasan-gagasan yang mendeskripsikan seksisme di dalam suatu masyarakat serta bagaimana kondisi ini dapat dihilangkan di

masa depan. Salah satu contoh seksisme adalah gagasan mengenai peran domestik perempuan. Gagasan ini banyak diserang kaum feminis karena mengacu pada citra konservatif mengenai kondisi sosial perempuan. Landasan setiap ideologi feminis mengacu pada nilai-nilai dan sasaran yang akan memungkinkan tercapainya kondisi sosial ideal untuk perempuan (JP, Edisi 7 Mei-Juli 1998). Ideologi feminisme terdiri dari berbagai macam ideologi, diantaranya; Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Sosial. Di Indonesia dikenal feminisme liberal dan feminisme sosial untuk menanggapi persoalan kebijakan kolonial dan pengaruhnya terhadap perempuan serta masyarakat (Fakih, 1997:73).

Selain ideologi feminisme, kaum perempuan juga menggunakan teori gender sebagai ukuran atas perannya sebagai kaum feminim. Untuk memahami persoalan gender diperlukan pemahaman ideologi, sosial maupun struktural budaya, yang dibangun ke dalam setiap kehidupan (Fakih, 1997:64). Karena permasalahan gender menyangkut hasil bentukan sistem dan membudaya secara struktural pasca kolonialisme (PPSW:115).

Ideologi gender membatasi penggalan potensi perempuan dan diaktualisasikan lewat potensi-potensi yang berkaitan erat dengan peran-peran dan kegiatan dalam lingkup domestik. Pelestariannya yang terus menerus akan menimbulkan kerugian bagi pemanfaatan sumber daya manusia (PPSW).

Gender sebagai konstruksi sosial, yang telah disosialisasikan, ternyata disalahartikan. Sebuah manifestasi ketidakadilan diciptakan oleh penguasa dengan menimbulkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, serta pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan. Oleh karena itu permasalahannya bukan terletak pada “kaum perempuan” tetapi dalam sistem, struktur yang membudaya yang bersumber dari ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Usaha yang lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender ini dikenal sebagai pendekatan *Gender and Development* atau *GAD* (PPSW:vii).

Pendekatan *GAD* memandang bahwa yang menciptakan ketidakadilan laki-laki dan perempuan adalah struktur dan proses sosial politik. Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada akses dan kontrol sumber daya, kesempatan dan manfaat, serta dalam pengambilan keputusan (partisipasi dan representasi). Dalam prosesnya suatu masyarakat dan berbagai institusi mengubah cara berpikir dan praktik untuk mendukung persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan (PPSW).

Kelebihan teori *GAD* ialah menjangkau hal-hal yang bersifat teknis, seperti politis dan merupakan proses transformasi. Teori ini menantang ketidakadilan, sehingga selalu menghubungkan dengan kebutuhan praktis dan strategis (Fakih, 1997:77).

Untuk mencapai konstruksi sosial yang mempengaruhi perubahan struktur gender, organisasi perempuan melihat persoalan *politik* menjadi salah satu faktor yang menentukan organisasi-organisasinya. Dalam *Sexual Politics (1970)* Kate Millent mendefinisikan *politik* sebagai hubungan kekuasaan terstruktur yang terbentuk ketika sekelompok orang berada di bawah kontrol kelompok yang lain. Para feminis kontemporer dalam hal ini melihat politik ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan politik (kekuasaan). Feminis mendefinisikan *kekuasaan* sebagai politik seksual di mana kekuasaan dipegang oleh pihak laki-laki. Pola budaya tradisional melahirkan ketidakseimbangan dan menempatkan kegiatan publik yang didominasi laki-laki, sebagai pusat nilai. Maka perempuan berada dalam lingkup domestik yang tidak mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sosial (*JP* Edisi 7 Mei-Juli 1998). Organisasi perempuan melihat *politik kekuasaan* sebagai alat untuk menentukan peran mereka yang sering bertentangan dengan cita-cita kaum feminis.

Sebagai perbandingan dijelaskan studi kasus organisasi-organisasi perempuan, salah satunya ditunjukkan perkembangan organisasi perempuan pada masa kolonial (abad ke-19) di Amerika Latin. Di sini kolonialisme berjalan selama satu abad. Selama itu, semua hal yang ada di koloni, baik bahan baku maupun penduduknya dilihat sebagai sumber daya alam untuk dieksploitasi, maka baik laki-laki maupun perempuan merupakan satu bentuk manusia (lebih rendah) yang berbeda,

“yang dasarnya” inferior. Untuk itu, perempuan termasuk alam bagi para kolonis, akhirnya hukum “hak laki-laki” ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam semua kultur, sehingga menimbulkan subordinat. Untuk itu, organisasi perempuan muncul sebagai bagian dari proses penindasan selama masa kolonial. Budaya feodal itu perlahan-lahan dapat diubah dengan partisipasi organisasi perempuan untuk meningkatkan peran perempuan serta membantu masyarakat marginal, meski hukum gender atau kodrat tidak dapat dilawan (Fakih, 1997:116).

Pada pasca kolonial, di tahun 1970-an, pengaruh kolonial masih terasa yaitu penekanan pada kekayaan pribadi. Di India pada kisaran tahun yang sama, perkembangan perundang-undangan tentang kekayaan pribadi tak terelakan membuat perempuan menyerah ketika hak tanah diletakan atas nama suaminya. Kaum perempuan mendominasi lapangan kerja musiman, tanpa tanah meski mungkin mereka pencari nafkah utama dalam keluarga. Budaya kapitalisme, industrialisasi yang pesat, dan urbanisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perbedaan ini, maka pemerintah pun turut dalam tradisi yang mereka terima sebelumnya. Pembangunan selama pasca kolonial di India seperti agribisnis mungkin tampak membuka kesempatan kerja, tetapi sesungguhnya semata-mata mengeksploitasi sumber daya dan buruh setempat, khususnya buruh perempuan. Studi ini akan melukiskan cara bagaimana perempuan berorganisasi menanggulangi bentuk “pembangunan” semacam itu.

Analisis gender dalam pembangunan ditunjukkan oleh organisasi perempuan di Brazil, Argentina, Peru, Uruguay, dan Chile. Mereka memperlihatkan proses dan peranan pembangunan mobilisasi kaum perempuan, sehingga secara otomatis ada perubahan politik rezim militer yang otoriter menuju dekade 1970-an (Jaquette, 2003:ii). Dalam hal ini organisasi perempuan sempat mengalami tekanan politik dari negara salah satunya di Chile. Di bawah rezim Pinochet situasi politik Chile mendapat perhatian. Jaquette mengatakan bahwa organisasi baru mobilisasi perempuan merupakan sebuah tahap baru dalam organisasi hak-hak perempuan (Jaquette, 1985). Konsep-konsep ini digunakan untuk melihat dinamika perjuangan perempuan Indonesia dari masa kolonial hingga orde baru.

Kedadaan ekonomi dan politik di Chile sempat dipegang oleh kekuasaan militer. Dalam bidang ekonomi upah riil terus mengalami penurunan, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi turun. Selain itu ada kebijakan anti serikat buruh oleh pemerintah, serikat buruh merupakan salah satu organisasi politik yang direpresi. Kemudian ada organisasi ekonomi populer (*Organizaciones Economicas Populares* OEPs), yang diciptakan oleh pemerintah, dimana mayoritas perempuanlah yang terlibat dalam pembentukan dan menjalankannya (Jaquette, 2003:184).

Salah satu reaksi perempuan terhadap kekuasaan adalah menolak bentuk kekuasaan, dan mencoba mendefinisikan kekuasaan yang tidak memerlukan pola dominasi. Judith Newton (1981) mendefinisikan kekuasaan perempuan sebagai

‘kemampuan’, yang disertai keterlibatan perempuan sebagai agen yang aktif. Dalam hal ini diperlukan rekonstruksi masyarakat hingga pengertian dominasi bukan lagi menjadi bagian yang mendasar dari suatu masyarakat. *Hannah Arent* merefleksikan tentang *politik kekuasaan* ialah budaya politik santun yang memenuhi syarat-syarat kondisi manusiawi berkat jaminan pemberdayaan ruang publik (Jaquette, 2003). Konsep ini digunakan untuk membahas masalah pada BAB IV di buku ini bahwa melalui bidang social dan pendidikan perempuan mendapatkan tempat untuk membangun bangsa.

D. Organisasi Perempuan, LSM Perempuan

Ada beberapa istilah mengenai pergerakan perempuan pada pasca kemerdekaan hingga Orde Baru diantaranya Ornop (Organisasi Non Pemerintah), NGO (*Non-Government Organization*), SGO (Civil Society Organization), dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

Istilah Ornop muncul sekitar awal 1970-an dan digunakan sebagai terjemahan dari NGO (*Non-Government Organization*) dalam lingkup internasional. Richard Holloway menganggap istilah NGO kemudian di Indonesia dikenal dengan Ornop dimana arti luasnya dapat berlaku bagi organisasi lain yang bukan bagian dari pemerintah. Meskipun demikian Holloway membenarkan bahwa NGO adalah suatu bagian dari *civil society* (Serrano, 1994).

Pada tahun 1950-1960 hingga saat ini pemaknaan Ornop dan NGO dengan sendirinya menunjukkan identitas yang

berbeda, sehingga agak sulit menyamakannya dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain, organisasi sosial (orsos), organisasi bisnis/ swasta, ataupun organisasi keagamaan. (Anggara, 2008).

Berdasarkan perjuangan pergerakan perempuan pasca Orde Baru, ada konsep lain yang mendekati pengertian Ornop. Pengertian lain tentang Ornop adalah sebagai PVO (Private Voluntary Organization). Konsep ini berasal dari konteks Amerika dan digunakan oleh USAID serta Bank Dunia untuk melihat peran yang dimainkannya. Tetapi perbedaan antara NGO dan PVO bukan sekedar istilah, melainkan lebih substansial. Rajesh Tadon dalam Rusmin Rumanggor (2005) menyebut PVO sebagai teori “Tiga Sektor”, yaitu pemerintah, bisnis atau korpoeasi dan organisasi *voluntary* (kerelawanan) yang saling memperkuat dan komplementer. PVO, yang masuk dalam sektor ketiga, jauh berbeda dengan rumusan NGO/ Ornop perlu dilihat sebagai sebuah institusi publik yang terlibat dalam proses penguatan masyarakat sipil dalam berhadapan dengan negara dan penguasa. (Anggara, 2008).

Sedangkan LSM mulai digunakan sebagai istilah dalam sebuah Seminar Ornop di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1980, atas iniatif Bina Desa, Walhi dan YTKI. Alasan utama untuk tidak memakai istilah Ornop karena dikhawatirkan akan menimbulkan pengertian yang salah, yakni organisasi yang “berlawanan dari pemerintah” atau oposan pemerintah (Witoelar, 1981). Namun sesungguhnya lembaga

keswadayaan ini tidak selalu berada pada posisi yang berlawanan dengan pemerintah. (Anggara, 2008).

E. Pendidikan dan Sosialisme

1. Pendidikan

Perjuangan untuk membebaskan kaum perempuan dari segala bentuk penindasan telah dimulai di berbagai belahan dunia sebelum kepeloporan R.A Kartini menggugah kesadaran melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh luar atau pendidikan model barat. Bahkan para pemikir perempuan seperti para feminis dan Sukarno sekalipun menguraikan pemikiran perempuan melalui dasar pendidikan Barat.

Dalam bukunya *Sarinah*, Sukarno menguraikan pikiran feminis Barat dalam bahasanya agar mampu dipahami oleh gerakan perempuan Indonesia. Selain itu, Sukarno mengolah pemikirannya dan pemikiran feminis Barat dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sukarno juga melihat gejala ketimpangan gender yang ada di Nusantara. Sukarno mempunyai konsep bahwa soko guru Negara itu adalah pemuda, perempuan, buruh, tani, dan nelayan. Antara lain kan perempuan, maka Bung Karno mendorong gerakan perempuan (Wawancara, 14 Oktber 2019).

A.Nunuk Murniati menguatkan gagasannya mengenai konsep pendidikan bahwa ada hal yang

mengaburkan pandangan mengenai pendidikan yang juga sangat mempengaruhi pendidikan perempuan. Pendidikan adalah suatu usaha pembudayaan manusia. Maka pendidikan tak dapat lepas begitu saja dari pengaruh budaya. Budaya adalah ciptaan manusia yang berlandaskan situasi lingkungan. Pandangan ini memberi celah yang dapat mengubah suatu citra apabila dampaknya tidak membuat manusia selamat. Disisi lain, ada beberapa pandangan percaya bahwa budaya merupakan kodrat alam yang tak mampu diubah. Pandangan-pandangan ini dapat mengaburkan kebenaran dan sering sekali mendorong ketidaksadaran bahkan dalam keadaan yang stabil. Hal ini juga yang mempengaruhi pendidikan bagi kaum perempuan termasuk di Indonesia (Murniati, 2004:17).

Telah berabad-abad masalah perempuan diperjuangkan salah satunya melalui pendidikan. Namun perjalanan untuk mewujudkan solusi sering menemui jalan terjal dan dinamika yang amat beragam khususnya di Indonesia. Upaya peningkatan pendidikan dari awal kepeloporan Kartini hingga saat ini juga sudah dilakukan. Namun, perjuangan itu belum mencapai hasil maksimal dan tahap ideal. Kebangkitan perempuan yang ditandai dengan perjuangan perempuan untuk membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang tidak adil dengan berbagai aksinya juga diiringi dengan gerakan pembodohan. Artinya bahwa ada berbagai sudut

pandangan yang membudaya bahkan terjadi di berbagai belahan dunia mengenai kodrat perempuan yang disubordinatkan atau melalui indoktrinasi yang sepihak. Akhirnya gerakan kebangkitan perempuan melalui pendidikan membutuhkan waktu yang lama pula. Upaya peningkatan perempuan melalui pendidikan, terhambat apabila banyak pihak yang menyelenggarakan pendidikan perempuan juga tidak memiliki visi yang sama atau bahkan bertentangan (Murniati, 2004:17).

Usaha memperluas cakrawala perihal dinamika perjuangan perempuan Indonesia menjadi awal bagi generasi baru untuk membangun bangsa. Beberapa komunitas atau lembaga sosial dan perempuan telah menunjukkan eksistensinya untuk dapat memperbaiki moral, batin, dan pengetahuan generasi di Indonesia agar mampu memandang segala aspek kehidupan yang beragam menjadi padu dan setara.

Gejolak masa lalu yang membayangkan-bayangi para aktivis yang amat khawatir bahwa generasi masa kini hanya mengecap kehidupan pragmatis tanpa memandang kesetaraan dan nilai keutamaan kehidupan berbangsa. Beberapa hal yang dikhawatirkan para feminis diantaranya proses mereproduksi pengetahuan bahwa dalam kajian gender ada proses untuk melakukan perlakuan atas praktik-praktik hegemoni yang diam-diam menerima dan mempertegas, memproduksi tatanan sosial yang bersifat menindas melalui tatanan relasi

kuasa yang didalamnya berbasis gender, kelas ras, orientasi seksual dan sebagainya.

Lebih dari itu karya ini ingin menegaskan bahwa ada proses damai yang amat mendasari suatu bangsa ke arah kemajuan. Namun apabila beberapa kajian belum mampu mencapai upaya rekonsiliasi dan solusi maka komitmen kebangsaan ke arah persatuan yang dicita-citakan para pendahulu akan sulit tercapai.

Ben Anderson menguatkan gagasannya bahwa betapa penting menerapkan common project atau “proyek bersama” dalam membangun kebangsaan. Hal ini juga ditanamkan Sukarno bahwa setiap orang yang menjadi komunitas adalah bangsa yang utuh. (Baskara, 2017:4).

2. Sosialisme

Paham sosialisme menurut kaca mata pendiri bangsa Sukarno ialah adanya pabrik kolektif. Adanya industrialisme, produksi, distribusi pendidikan yang kolektif. Adanya semangat gotong royong sebagai soko guru sosialis. Sosialisme merupakan kecukupan berbagai kebutuhan dengan pertolongan modernisme yang telah dikolektivisasikan.

Sukarno juga mengutip pendapat Karl Marx yang mengatakan bahwa runtuhnya kapitalisme itu tidak otomatis berarti berdirinya sosialisme dimana masyarakat Indonesia saat ini mengenalnya dengan sila ke 5 Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia). Sosialisme hanya berdiri jika didirikan. Jika tidak ada yang mendirikan maka terjadi *chaos* yang tiada hingjanya. Hal ini terbukti pada masa rezim orde baru, dimana perempuan juga mendapatkan pengaruh hasil kapitalisme rezim.

Dalam bukunya Sarinah, Sukarno juga menulis beberapa hal terkait konsep sosialisme:

“Teori sosialismelah yang membawa kita pada pengertian tentang keadaan-keadaan objektif di dalam masyarakat Indonesia di masa sekarang dan masyarakat dunia. Teori sosialismelah yang memberi pengetahuan pada kita bahwa tingkatan Revolusi kita sekarang tak mungkin lain daripada tingkat nasional. Teori sosialismelah, dan bukan borjuis, yang menunjukkan, bahwa bagi kita sekarang belum datang kemungkinan untuk melaksanakan sosialisme.” (Sukarno, 1963:298)

Salah satu kutipan mengenai misi sosial Sukarno yang diharapkan dapat sampai kepada gerakan revolusi nasional dan kebangkitan bagi kaum perempuan ialah kutipan dari Henriette Roland Holst dalam bukunya berjudul “*een overgang tot het Socialisme*”

“Ya, het kapitalisme is dood, althans in Europa, evengoed dood als het Tzaristisch-teocratische Rusland dit was in 1927. Het zal niet weder opstaan. Maar wat in zijn plaats komen zal, dat moog in desterren geschreven, of, theologisch uitgedurkt, door Gods ondoorgroendelijk raadsbesluit van eeuwigheid af vastgesteld zijn. Een zachte stem in ons binnenste zegt met een

accent van absolute overtuiging: "Het menselot is in mensenhand gegeven", en wiy voelen dat zij waarheid spreekt. De groei naar het socialisme voltrekt zich niet noodzakelijk als de groei van een dier of een plant. Die groei vereist helder inzicht in de taken en de middelen tot verwezenlijking, vaste wil en wijsheid, zelbeheering en zilverloochening ... Zich allerlei opofferingen getroosten terwille van de algemene zaak; met zorgvuldige hand uitgaan tot zaaien, etend, dat anderen zullen oogsten; daar komt het op aan. Wij zeggen niet als de Russische boskewisten: "wij zijn mest op de velden ter toekomst". O neen, menselijke wezens zijn nimmer enkel mest. Wij willen de dragers der toekomst zijn, de stenen aandragen tot haar bouw, haar fundamenteen leggen. Wij zijn akkers, ook in ons ontkiemt het zaad!"

Artinya:

"Ya, kapitalisme memang telah mati, setidak-tidaknya di Eropa, sama matinya dengan Rusia Tsaristik-teokratis di tahun 1927. Ia tak akan bangun kembali. Tetapi apa yang menggantinya, itu telah tertulis di bintang-bintang. Satu suara ukel dalam jiwa kita berkata dengan keyakinan yang pasti, "Nasib manusia tertetak dalam tangan manusia sendiri," dan kita merasa, bahwa suara itu benar. Pertumbuhan ke arah sosialisme tidak berlaku seperti pertumbuhannya binatang atau tanaman. Pertumbuhan ke arah sosialisme itu meminta pengetahuan yang terang tentang wujud-wujudnya dan cara-cara melaksanakannya, keamanan yang keras dan kebijaksanaan, pengekangan diri dan peniadaan diri ... keridaan berkorban untuk keperluan

umum; denan cermat menyebar benih, meski mengetahui bahwa orang lainlah yang akan memetik buah; itulah yang perlu. Kita tidak berkata seperti kaum Blsyewik Rusia, “Kita ini pupuk tahi sapi saja di ladang-ladangnya hari kemudian” O, tidak manusia bukan seperti itu, namun kita mau menjadi pemikul-pemikul di hari kemudian, membawakan batu-batu yang perlu untuk membinanya, memasang alas-alasnya. Kita adalah ladangm di dalam pangkuan kita juga bersemi benih!”

Lebih lanjut Sukarno melihat sikap perempuan Marhaen yang ia gambarkan layaknya Sarinah dan perempuan kelas atas sama-sama mengalami penurunan derajat kemanusiannya dalam masyarakat feodal dan kapitalistik:

“...di kalangan si Marhaen inilah, karena dorongan *struggle for life*”

Sebagaimana penjelasan Sukarno bahwa sosialisme dan di masa sekarang kita mengenalnya sebagai upaya sosial, perempuan harus mengerti bahwa sosialisme mampu membantu mengatasi segala diskriminasi dan ketidaksetaraan. Karena dengan berbuat sosial perempuan telah ikut serta dalam perjuangan nasional dengan berbagai cara dan karyanya. Sukarno juga mengutip pesan dari Ernest Douwes Dekker (Setiabudhi) bahwa: “*Men moet zich geheel geven, geheel! De hemel verwerpt het gesjachter met meer of minder!*” yang berarti: “Janganlah setengah-setengah, berilah jiwa ragamu sama sekali!”

Dengan misi sosial kaum perempuan Indonesia bisa melakukan perjuangan nasional yang sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, ruang gerak perempuan pada masa pergerakan nasional dengan berbagai aksi revolusioner dapat diperbaharui melalui aksi-aksi sosial dalam bentuk LSM dengan misi misalnya memperjuangkan hak para buruh. Perjuangan sosial perempuan juga dipertegas Sukarno yang mengutip gagasan dan pengalaman Fannina W. Halle bahwa:

“Kaum buruh perempuan sudah ikut serta aktif pada pemberontakan-pemberontakan buruh dalam tahun 1874 di Petersburg di pabrik-pabrik tenun. Dalam pemberontakan buruh yang termasyhur di OryekhowoSuyewo, di daerah tekstil Wladimir, yang berhasil mencapaikan larangan kerja malam bagi perempuan dan kanak-kanak dari pemerintah, maka perempuanlah yang berdiri di barisan yang paling depan. Memang adalah menarik perhatian bahwa sumber-sumber pemogokan-pemogokan dan pemberontakan-pemberontakan buruh, yang selalu menggelorakan dunia proletar Rusia di kanan-kirinya tahun tujuh puluhan dan di bagian pertama dari tahun delapan puluhan, terutama sekali terdapat pada cabang-cabang perusahaan tenun, yaitu cabang –cabang perusahaan yang kaum buruhnya buat bagian yang terbesar terdiri dari perempuan. Dengan demikian maka tidaklah dilebih-lebihkan, jika orang mengatakan, bahwa bagian yang terbesar (het leeuwenaandeel) daripada perjuangan-perjuangan ekonomis dan politis dalam masa itu ialah dilakukan oleh perempuan!”

1.5 Kerangka Pemikiran

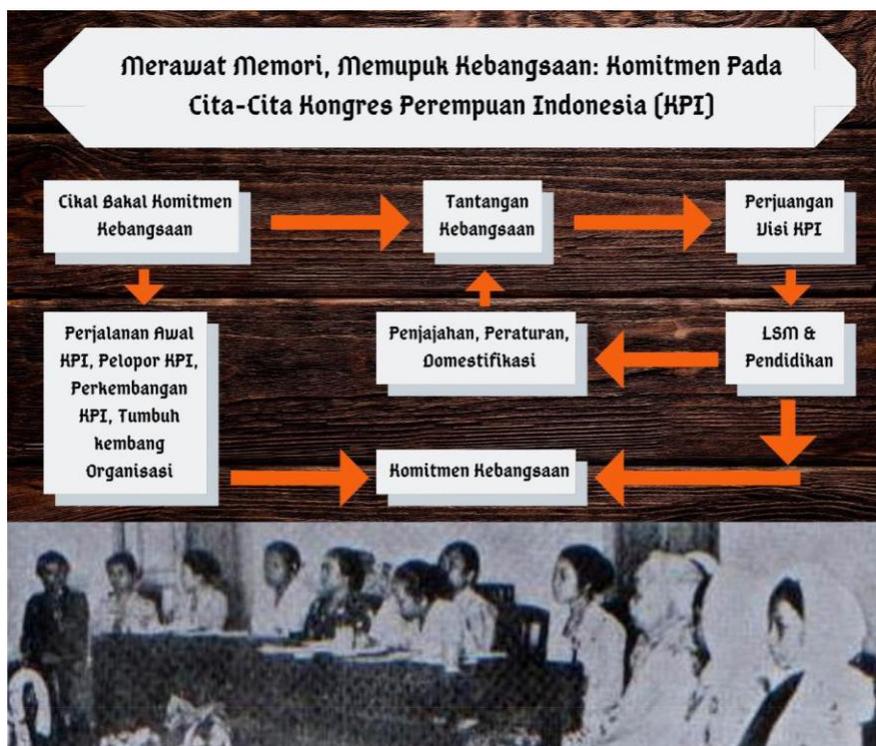
Di bagian pertama diuraikan cikal bakal komitmen kebangsaan. Komitmen ini disingkap secara ringkas dan mendalam mulai dari permulaan perjalanan Kongres Perempuan Indonesia, para aktivis atau pelopor Kongres Perempuan Indonesia, hingga semaraknya organisasi. Cita-cita tersebut diupayakan oleh berbagai organisasi perempuan yang lahir periode awal pergerakan nasional hingga pra-kemerdekaan sebagai bentuk komitmen kebangsaan yang ajeg disemai dan menjadi suatu tradisi. Cita-cita kebangsaan diuraikan dalam program Kongres Perempuan Indonesia dengan membentuk badan federasi, menerbitkan surat kabar, memperkokoh pendidikan, mencegah perkawinan anak-anak, pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, membentuk perkumpulan berasaskan kebangsaan, kerakyatan, dan kenetralan terhadap agama dengan tujuan Indonesia Raya. Beberapa hal tersebut menjadi program pokok yang mewarnai cikal bakal lembaga sosial perempuan pasca Orde Baru. Hal ini penting karena masih menjadi permasalahan yang urgen untuk dibahas berlandaskan prinsip kebangsaan.

Pada bagian kedua dibentangkan lika-liku perjuangan kebangsaan yang dihadapi perempuan Indonesia. Dalam hal ini dijelaskan jawaban dan tantangan atas permasalahan mengenai ketidakadilan oleh karena penjajahan kolonial, kejahatan tentara pada masa pendudukan Jepang, peraturan pemerintah pasca kemerdekaan yang tidak memihak perempuan mengenai

poligami, dan strukturalisasi rezim orde baru secara masif yang diperkuat melalui sistem ibuisme dan domestifikasi perempuan.

Di bab terakhir buku disajikan semangat kebangsaan melalui organisasi perempuan era pergerakan nasional yang bertransformasi melalui berbagai LSM Perempuan. Beberapa mantan aktivis Kongres Perempuan Indonesia masih beraktivitas melalui LSM dan berpegang teguh pada prinsip pembangunan bangsa. Beberapa aksi dilakukan untuk mempertahankan cita-cita kebangsaan para pendahulu. Di bagian akhir Bab ini ditekankan beberapa komitmen mendalam sebagai refleksi bagi masa depan bangsa Indonesia. Selain itu diuraikan perjuangan perempuan melalui pendidikan seperti yang ditorehkan R.A. Kartini bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meneruskan tradisi kebangsaan para pendahulu seperti yang diupayakan melalui kongres perempuan Indonesia. Jika dengan jalan politik (yang telah diangkat sebelumnya) banyak ditemukan jalan berliku maka pendidikanlah salah satu jalan yang tepat untuk meneruskan cita-cita kebangsaan Kongres Perempuan Indonesia.

Bagan 1. 2: Bagan kerangka berpikir



1.6 Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dikaji mengenai prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis atas permasalahan yang dikaji. Metode atau cara dalam pengumpulan sumber dalam penelitian historis ini adalah deskriptif analitis yaitu menginventarisir dan menganalisis tulisan-tulisan berupa buku-buku, analisis berita, dan media cetak. Metode sejarah terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis data, pendekatan dan penulisan. Metode sejarah mempunyai empat kegiatan pokok yaitu heuristik atau

pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi terhadap sumber dan penulisan sejarah (Syamsyudin, 2007:86).

Berikut merupakan tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian historis analitis dan deskriptif oleh penulis, di antaranya:

1. Pemilihan Topik

Penulis memilih topik “Merawat Memori, Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia” karena timbul dari kedekatan emosional dan kedekatan intelektual dengan topik tersebut.

a. Kedekatan Emosional

Penulis tertarik menulis tentang organisasi perempuan dengan segala usaha perjuangannya hingga tekanan politik yang dialami, karena usaha selama perjuangan mendapat banyak tantangan baik dari segi struktural budaya maupun sosial masyarakat. Adapun alasan pemilihan topik ini ialah karena kedekatan emosional, karena tergerak dengan kegiatan dan program yang ditunjukkan organisasi perempuan HASPARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) di DIY. Mereka membuat program kerja yang ditujukan untuk penanganan permasalahan sosial khususnya masyarakat marginal. Mereka menunjukkan peran begitu besar dalam kemajuan bangsa. Dengan pengamatan ini, meski organisasi perempuan terus berjuang untuk menguatkan visi kebangsaan kepada generasi pasca Kongres Perempuan Indonesia.

b. Kedekatan Intelektual

Pemilihan topik tulisan ini juga menambah kekayaan pengetahuan penulis. Penulis mulai masuk kepada permasalahan perempuan dengan meninjau banyak buku terkait perjuangan perempuan Indonesia. Tidak hanya pengetahuan yang bersumber dari studi pustaka, tetapi juga dari media lainnya. Penulis meninjau karangan mengenai usaha organisasi perempuan dan perjuangan akan kaumnya, seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang seperti Mansour Fakih, Saskia Eleonora Weirenga, Hikmah Diniah, A.Nunuk P. Murniati, Susan Blackburn, Surat-surat Kartini, dan berbagai sumber dari Kongres Perempuan yang hingga kini perjuangannya terus didengungkan. Jadi, dengan kedekatan intelektual ini, penulis berusaha meninjau perkembangan organisasi perempuan dalam perjuangan dan tantangan yang dihadapi. Untuk menanggapi penelitian awal, peneliti juga menambahkan kajian pendidikan di bagian akhir penulisan yaitu komitmen generasi pasca Kongres Perempuan Indonesia dalam berbagai bentuk seperti LSM maupun aksi pemuda di perguruan tinggi melalui media pembelajaran sejarah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan inti permasalahan yang akan diamati, penulis melakukan penelitian historis deskriptif terlebih dahulu untuk melihat gambaran yang dijelaskan dalam setiap sumber. Kemudian sumber tersebut dianalisa untuk dikaji

permasalahan pada sumber dan dikaitkan dengan permasalahan sesungguhnya yang memberi dampak sebagai hasil permasalahan tersebut. Secara keseluruhan bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber pustaka, lisan, dan proyek lapangan.

Sumber-sumber yang digunakan ialah dengan metode wawancara dan studi pustaka. Sumber sekunder didapat melalui wawancara dengan Ibu Nunuk Prasetyo Murniati merupakan salah satu pelaku serta aktivis organisasi perempuan termasuk dalam anggota Perikatan Solidaritas Perempuan. Selain itu, bahan-bahan penunjang lainnya didapat di perpustakaan Kolose Kota Baru, Universitas Sanata Dharma, dan arsip nasional RI. Sumber tersebut di antaranya: (*Habis Gelap Terbitlah Terang*) karangan Raden Ajeng Kartini, (*Sarinah*) karangan Ir. Soekarno, dan beberapa diantaranya telah disebutkan dalam tinjauan pustaka.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber-sumber yang relevan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik atas sumber yang ada atau verifikasi. Kritik sumber yang dilakukan adalah untuk mengetahui kebenaran informasi atau untuk menguji otentisitas dan juga kredibilitasnya. Hal tersebut sangat diperlukan karena tidak semua sumber terbebas dari unsur kekeliruan dalam hal pencatatan ataupun unsur yang lainnya. Menurut Kuntowijoyo (2001:101) Kegiatan verifikasi atau kritik sumber ini terdiri dari dua macam yaitu, kritik ekstern (keaslian sumber atau

otentisitas), dan kritik intern (kebiasaan dipercayai atau kredibilitas).

Kritik intern dapat digunakan untuk mengetahui nilai kebenaran suatu data yang diperoleh atau data tersebut dapat dipercayai atau tidak. Kritik intern ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap, sedangkan kritik ekstern adalah untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam melakukan penulisan. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan meneliti bahan yang digunakan lewat pemakaian bahasa dalam penulisannya, corak penulisannya, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya proses kritik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar, apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah, pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang diberikan oleh sumber terbanyak.

Selain melakukan perbandingan cara lain yang digunakan dalam proses kritik sumber ini adalah dengan pembacaan secara intensif dan mencermati secara seksama berbagai sumber yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis memverifikasi hasil wawancara mengenai perkembangan dan komitmen Kongres Perempuan Indonesia. Harapannya hasil tersebut dapat mewakili aspirasi perempuan Indonesia untuk menguatkan komitmen kebangsaan melalui berbagai karya.

4. Interpretasi (Penafsiran)

Data berupa informasi yang sudah dianggap valid kemudian diinterpretasikan. Interpretasi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji dan untuk menganalisis sumber supaya dapat menghasilkan suatu fakta yang teruji kebenarannya. Kuntowijoyo (2001:101) menguatkan interpretasi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) data atau fakta-fakta yang telah terkumpul. Mengingat sumber kajian utama ini adalah teks, maka diperlukan penafsiran yang cermat agar makna aslinya dapat ditangkap secara tepat. Teori penafsiran teks itulah yang disebut dengan istilah hermeneutika. Langkah ini diambil dengan memperlihatkan landasan teori yang dipakai dalam penelitian.

5. Pendekatan

Langkah yang selanjutnya setelah melakukan analisis data adalah menentukan pendekatan. Pengertian pendekatan dalam penelitian sejarah adalah pola pikir atau cara pandang dari penulis terhadap suatu kejadian atau peristiwa sejarah dari sudut pandang tertentu. Menurut Sartono Kartodirjo dalam penelitian sejarah pendekatan sangat diperlukan sebagai cara sejarawan atau penulis untuk memandang suatu peristiwa atau kejadian karena pendekatan akan membantu sejarawan atau penulis dalam memandang dimensi-dimensi mana yang perlu diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diungkapkan dan sebagainya

(Kartodirdjo, 1992: 4). Pendekatan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi penulisan sejarah sebab hasil penulisan tentang peristiwa masa lampau sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai oleh penulis.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan historis dan sosial budaya. Pendekatan historis digunakan untuk melihat secara keseluruhan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Kongres Perempuan Indonesia. Pendekatan sosial budaya digunakan seberapa besar konsep gender dan peran organisasi perempuan Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan bangsa. Semua pendekatan akan digunakan penulis untuk mempermudah penulis untuk mengkaji serta menganalisis pokok permasalahan.

Setelah mengumpulkan data, kritik sumber dan interpretasi dijalankan barulah kemudian dilakukan langkah berikutnya yaitu penulisan hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian merupakan penyusunan hasil penelitian secara kronologis dan sistematis.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini akan dibahas sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama buku ini berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Konsep/Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab kedua berisi uraian sub topik Cikal Bakal Komitmen Kebangsaan, Perjalanan Awal Kongres Perempuan Indonesia, Pelopor Kongres Perempuan Indonesia, Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia, Dinamika Organisasi Perempuan, Komitmen Memperkuat Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia.

Pada Bab 3 buku ini membahas Lika-Liku Pasca Kongres membahas beberapa rumusan diantaranya; Nasib Perempuan Indonesia pada Masa Kolonial, Praktik Perjuangan, Tantangan Organisasi perempuan pada masa kemerdekaan, Domestifikasi Perempuan Masa Orde Baru, Kasus Buruh Perempuan.

Pada akhir bab buku ini (bab 4) membahas Perjuangan Visi Kongres Perempuan Melalui LSM dan Pengajaran diantaranya menguraikan Penguatan Cita-cita Kongres Perempuan dan Pendidikan sebagai Sarana Penguat Prinsip Kongres.

BAB II

CIKAL BAKAL KOMITMEN KEBANGSAAN

2.1 Perjalanan Awal Kongres Perempuan Indonesia

Perlu dicermati, KPI mengalami dinamika begitu rumit lantaran situasi yang dialami perempuan Indonesia. Dalam pustaka berjudul “Getar Gender”, Murniati (2004) merujuk pernyataan Bung Karno bahwa gerakan perempuan Indonesia musti dibedakan menjadi dua: (1) gerakan revolusioner, yaitu aksi masyarakat melawan penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan. Gerakan ini berproses ke arah kemerdekaan dan kebebasan, (2) Gerakan reaksioner, atau mempertahankan *status quo* dari situasi ketidakadilan. Gerakan itu membatat penjajahan dan ketidakadilan, baik disadari maupun tidak. Ditambahkan pula oleh Murniati, ada klasifikasi periode yang membuat dinamika pergerakan perempuan yang tanpa sadar mengubah komitmen KPI periode awal terbentuknya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Periode sebelum penjajahan, tidak/belum banyak terekam faktanya. Memang sudah dimuat dalam karya Peter Carey perihal “Perempuan-Perempuan Perkasa” yang menyorot perempuan Jawa, namun tulisan lokal lainnya yang ada di berbagai wilayah Nusantara masih sangat jarang.
- 2) Periode 1602-1928, sifat gerakan masih individual. Hal ini terlihat dari perjuangan perempuan daerah seperti Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Meutia, Malahayati

dan masih banyak lagi perempuan yang memperjuangkan wilayahnya dari penjajahan kolonial.

- 3) Periode 1928-1945, gerakan perempuan sebagai ibu, paham ibuisme mendobrak penjajah. Lantaran perjuangan menghebat dan pendidikan dari kolonial membuka mata perempuan di Nusantara salah satunya Kartini, untuk menggerakkan semangat juang perempuan Indonesia sehingga lahirnya para pelopor pergerakan perempuan lainnya seperti Suyatin Kartosuwiryo, Nyi Hadjar Dewantara dan pejuang lainnya untuk membentuk pergerakan pasca kongres pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Periode ini merupakan cikal bakal pergerakan perempuan Indonesia dengan segala dinamikanya. Kemunduran dialami pula para perkumpulan perempuan akibat tekanan besar dari pendudukan Jepang.
- 4) Periode 1946-1965, gerakan perempuan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan gagasan dan program yang diperjuangkan oleh Sukarno.
- 5) Periode 1966-1980, gerakan PKK perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pada masa ini mengalami subordinasi dan domestifikasi secara struktural dan massif dari pemerintahan saat itu, sehingga sangat jelas bahwa pada masa ini komitmen awal KPI menjadi pudar.
- 6) Periode 1980-1998, gerakan terpecah dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu gerakan PKK yang mendukung pembangunan dan gerakan perempuan menuju kepada keadilan gender. Ada dua macam gerakan perempuan melahirkan

organisasi perempuan pemerintah (dependen) dan organisasi perempuan non-pemerintah (ornop/ non-depeden/independen)

- 7) Periode 1998-sekarang, gerakan berjaringan internasional hingga nasional menuju pada keadilan gender dan bersifat inklusif melalui peningkatan wawasan perempuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini akan dibahas pada bab akhir sebagai satu solusi yang ditawarkan untuk menjaga komitmen awal KPI yaitu gerakan mempertahankan *status quo* dari situasi ketidakadilan.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang dibangun sejak abad ke-19 menjadi media kebangkitan nasional. Organisasi perempuan berkembang dan dijadikan sebagai alat kontrol sosial, untuk mencapai cita-cita yang luhur, seperti kemerdekaan, penghapusan segala bentuk penindasan, dan budaya imperialis yang merugikan. Untuk itu, muncullah perempuan-perempuan yang sadar dan menciptakan gagasan transformatif yang sekiranya dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap kemampuan kaumnya. Pada akhirnya, lahirlah berbagai organisasi perempuan yang membangun organisasi lebih besar pada masa pergerakan nasional untuk meningkatkan kemampuan perempuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mereka berkembang dan selalu berpedoman pada dasar perjuangan hidup para tokoh yang menginspirasi mereka, misalnya Srikandi hingga Kartini. Melalui kisah hidup perempuan tangguh ini, mereka mulai membuka cakrawala baru untuk mencapai harapan yang utama, yaitu kesetaraan bagi hidup perempuan, dan selebihnya mereka perjuangkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tidak sedikit tokoh perempuan menyumbang gagasan untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini, organisasi perempuan mempunyai visi dan misi mengubah cara pandang masyarakat terhadap tradisi perempuan dipingit dan tanpa memperoleh pendidikan. Untuk itu, beberapa tokoh ini berusaha menghapus penindasan dengan membaca, bersekolah, dan mengumpulkan perempuan Indonesia supaya tidak terjadi penindasan yang sama. Pengalaman ini dikerjakan kali pertama oleh pelopor organisasi perempuan R. A Kartini dan Dewi Sartika (Sueryocondro, 1984:68-69).

Kartini menyadari bahwa perjuangan menuju pembebasan dan kemerdekaan tidak dapat dilakukan sendiri. Meskipun Kartini menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan pembuka jalan:

“Akan datang juga kiranya keadaan baru dalam dunia Bumi putra; kalau bukan oleh karena kami, tentu oleh karena orang lain” (Surat kepada nona Zeehandelaar 9 Januari 1901)

Selanjutnya Kartini juga memahami bahwa harus ada kepercayaan pada diri sendiri dalam hal ini para perempuan di Nusantara. Karena kemerdekaan hanya bisa diterima oleh bangsa yang percaya akan kekuatan dirinya. Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Kartini bahwa:

“Sudah jauh dan sangat lama kami mencari, dan kami tiada tahu, amat dekatnya, senantiasan pada kami barang yang kami cari itu ada di dalam diri kami sendiri” (*Surat kepada Nynya van Kol 21 Juli 1902*)

“Yang berubah itu sebenarnya di dalam diri kami, maka disinarilyalah segala yang aada dengan cahayanya,” (*Surat kepada nyonya Ovink-Soer, Oktober 1900*)

Gambar 2.1 : R. A Kartini dan Dewi Sartika sebagai pelopor organisasi-organisasi perempuan Indonesia



The infographic is divided into several sections. At the top, a red decorative flourish is above a dark brown box with a white border containing the text 'TOKOH PEJUANG EMANSIPANSI PEREMPUAN'. Below this, there are two rows, each featuring a circular portrait of a woman on the left and a text block on the right. The first row is for Raden Ajeng Kartini, and the second is for Dewi Sartika. To the right of the text blocks is a large black and white photograph of a woman smiling and holding a baby. At the bottom, another red decorative flourish is above a blue rectangular area.

TOKOH PEJUANG EMANSIPANSI PEREMPUAN

RADEN AJENG KARTINI

Tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah wanita (Sekolah Kartini) demi memajukan perempuan pribumi Jawa yang pada saat itu berada pada status sosial yang rendah. Melalui sekolah ini, ia melampiasakan cita-citanya untuk berjuang menuntut persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

DEWI SARTIKA

Tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah "Sekolah Istri" untuk perempuan supaya semua perempuan dapat menempuh pendidikan yang layak dan dapat menjadi seorang istri yang baik nantinya. Beberapa tahun Sekolah Istri berubah nama menjadi Sakola Kautamaan Istri dan pada tahun 1929 sekolah tersebut diganti menjadi Sekolah Raden Dewi.

Sumber materi: Ruth Indiah Rahayu (Rahayu:88)

Selang beberapa tahun berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1912 didirikan organisasi perempuan yang pertama bernama Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan dan mendorong mereka agar perempuan tampil di depan umum, membuang rasa takut dan mengangkat perempuan pada kedudukan yang sama atau setara dalam hal lapangan pekerjaan (Wieringa, 1999:105).

Sebelum berdirinya Budi Utomo para tokoh perempuan memiliki misi memperjuangkan generasi perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang serta menentukan kehidupan keluarga (Pringgodani, 1970: 20-21). Hal ini diperjelas dengan cita-cita besar Raden Ajeng Kartini (1879-1904) bahwa kaum perempuan Indonesia di masanya harus terbebas dari persoalan kawin paksa dan poligami. Seruan ini lantaran ia juga mengalami hal yang sama dan dirasa menyakitkan baginya di mana Kartini dikawinkan secara paksa dengan seorang yang berpoligami bernama RMAA Djodhiningrat. Sesungguhnya ada angan besar dalam benak Kartini untuk membebaskan kaum perempuan Indonesia melalui pendidikan. Terbukti Kartini menulis hingga dua kali mengenai pendidikan. Dalam suratnya pada 11 Oktober 1901, ia menulis (Kartini, 1987:76):

Menurut ayah, menjadi gurulah yang terbaik bagi kami...Di mana lagi aku akan dapat menyebarkan cita-citaku secara lebih baik dari pada di situ, sebagai pendidik angkatan muda yang akan menjadi perempuan ibu masa depan?...

Kemudian dalam suratnya kepada Ny. Abendanon pada 21 Januari 1901, ia mengatakan bahwa:

Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan...dan makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan?... Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat.

Hal serupa dirasakan pelopor perempuan, namun berjuang setelah kepeloporan Budi Utomo. Semua ditunjukkan untuk menambah lapangan pengajaran dan mempertinggi kecakapan sebagai perempuan. Peran Budi Utomo kedua mencuat dalam organisasi perempuan diantaranya Kongres Perempuan. Semula, Kongres digelar guna mengukuhkan suatu organisasi dan dimulai dari Kongres Pemuda yang sudah dilakukan sebelum Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Pemuda berlangsung tanggal 28 Oktober 1928 (saat ini diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda) merupakan cikal bakal Kongres Perempuan Indonesia yang berdiri pada 22 Desember 1928 (sekarang dikenal sebagai Hari Ibu). Tidak heran, pembaharuan pola pikir perempuan Indonesia yang maju berkat jasa Budi Utomo.

Selepas itu bermunculan aneka organisasi perempuan bervisi hampir sama dengan organisasi nasional pada umumnya, yaitu sosial politik dan budaya. Setelah organisasi perempuan pertama (Putri Mardika) berdiri, disusul organisasi Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915.

Kedigdayaan organisasi perempuan Indonesia dalam berpolitik dibuktikan sedari periode kebangkitan nasional. Mereka membentuk perencanaan dan program kerja dari tingkat nasional hingga lokal. Mereka juga memberi pemahaman perihal cara berorganisasi kepada kelompok kecil perempuan, sehingga anggotanya siap mengemban tugas. Buktinya, Persatuan Perempuan Indonesia (PPI) merangkul organisasi kecil menjadi satu kesatuan dalam federasi organisasi perempuan (Kartini, 1987:76).

Budi Utomo berperan mengorganisasi kaum perempuan Indonesia, antara lain 1) memotivasi lahirnya organisasi perempuan pertama Indonesia, yaitu Putri Mardika; 2) mentransformasikan visi kaum perempuan dalam hal mengangkat derajat kaum perempuan dalam bidang sosial, budaya dan politik; 3) memacu tumbuhnya organisasi perempuan yang subur tahun 1928-1940 dari Putri Mardika hingga Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia di Jakarta.

Membangun masyarakat dan negara merupakan tugas kolektif tanpa pandang status dan kelas. Maka, sulit bagi bangsa untuk tumbuh tanpa mengkaji lebih dalam atau mengenal organisasi pemuda era pergerakan nasional. Tanpa kaum pemuda dan perempuan Indonesia, bangsa ini tidak akan pernah ada. Saat ini pun masih dibutuhkan semangat yang ada pada masa organisasi nasional baik peran Budi Utomo maupun semangat organisasi perempuan yang diharapkan masih dipegang teguh para pemuda detik ini.

Kesetaraan perempuan maksudnya memperjuangkan posisi perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang

serta menentukan kehidupan keluarga. Semua ditunjukkan dengan menambah lapangan pengajaran, dan mempertinggi kecakapan sebagai perempuan. Ini merupakan visi dan misi utama bagi organisasi perempuan periode selanjutnya (Pringgodani, 1970:20-21). Organisasi perempuan berkembang berpedoman pada organisasi emansipasi di Indonesia yang melembaga dalam organisasi perempuan. Persatuan organisasi perempuan dibuktikan dalam Kongres Perempuan Pertama Indonesia tanggal 22 Desember 1928 (Soerasno, 1955:128; Depdikbud, 1991; Suryocondro, 1984; Prasetyo, 1998:17; Wieringa, 1988:12).

Pada perkembangannya organisasi perempuan lebih aktif dengan menunjukkan berbagai aksi nasional, sehingga pada masa pendudukan Jepang, muncul organisasi perempuan bawah tanah yang melawan organisasi perempuan bentukan Jepang dengan sebutan Fujinkai. Organisasi perempuan bawah tanah ini ditindas oleh tentara Jepang dan program pelaksanaannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Organisasi perempuan ini membaur menjadi satu dengan suatu misi dan visi memerdekakan Indonesia baik dari penindasan kolonial maupun penguasa lokal pribumi (Rahayu, 1960:67).

Era kemerdekaan pergerakan perempuan begitu didukung Presiden Sukarno. Dalam buku *Sarinah*, Sukarno mengatakan pergerakan perempuan melalui wadah organisasi merupakan pergerakan progresif yaitu aktif menuntut hak untuk bekerja. Tuntutan ini berasal dari perempuan kelas borjuis kepada perempuan proletar. Lebih dari itu, pemikiran ini lalu dikembangkan sebagai ide

dan kebutuhan masyarakat bumi Nusantara sewaktu kolonialisme hadir.

Sukarno mengutip pula pemikiran feminis dari Belanda Ny. Henriette Roland Holst bahwa:

“In werlijkheid echter is haar beweging een klassenbeweging, wat zij wil is voornamelijk de opheffing der wetten, het doorbreken der tradities en de verandering der zeden, die de vrouwen der bezitten- de en heersende klassen nog juridisch, social, economisch en politisch...” “

Artinya: “pada hakikatnya, pergerakan mereka itu adalah pergerakan kelas; yang mereka tuju ialah terutama dihapuskannya hokum-hukum, meleburnya kebiasaan-kebiasaan dan berubahnya adat-adat, yang di atas lapangan yuridis, sosial, ekonomis dan politik ...” (Sukarno: 1984)

Sukarno mampu memahami asa perempuan bahwa keinginan diterima masyarakat dan memperoleh keadilan juga menjadi impian semua masyarakat Indonesia. Hingga Sukarno mengutarakan:

“Tetapi di dalam suatu Dunia Baru yang berkesejahteraan sosial, dimana manusia tidak dauber-uber sampai hamper putus napas oleh hantu *struggle for life*, di dalam satu Dunia Baru dimana pencaharian hidup bukan satu azab yang meremukkan jasmani dan rohani, tetapi satu kewajiban yang gembira, di dalam dunia yang demikian itu manusia tidak ‘takut’ kepada pekerjaan di dunia ramai, dan somah tidak pula menjadi tempat perlindungan atau tempat mengembalikan nafas. Di dalam dunia yang demikian itu, maka batas antara somah dan masyarakat akan makin menjadi tipis, bahkan akan makin menjadi indah, laksana batas antara wananya pelangi hujan yang bersambung satu

dengan yang lain dan menyusun satu harmoni yang gilang-gemilang.”

2.2 Pelopor Kongres Perempuan Indonesia

Indonesia abad XIX telah memiliki tokoh perempuan Indonesia dilambiri spirit menunjukkan peran sertanya menghapus penindasan dari neo-kolonialisme dan imperialisme. Pejuang nasional perempuan yang memacu semangat juang wanita Indonesia ialah Martha Christina Tiyahahu (wafat 1818) dari Maluku, Cut Nyak Dien (wafat 1908), dan Cut Nyak Meutia (wafat 1910) dari Aceh (Soerasno, 1955:128; Depdikbud, 1991; Suryocondro, 1984; Prasetyo, 1998:17; Wieringa, 1988:12).

Pelopori organisasi perempuan Indonesia selanjutnya ialah Raden Ajeng Kartini (21 April 1879-17 September 1904). Mimpinya agung mengorganisasi kaum perempuan Indonesia tertuang dalam kumpulan suratnya yang dibukukan dengan judul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”. Dikemukakan persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia pada masanya, semisal kawin paksa (perempuan kawin dengan lelaki yang belum dikenal), poligami (terutama golongan atas) sudah menjadi kebiasaan pria beristri lebih dari 1 dan semua istri biasanya berdiam dalam satu rumah. Dampak poligami terasakan betul oleh Kartini, sebab ayahnya sendiri berpoligami. Kemalangan menimpa Kartini tatkala dipaksa kawin dengan bupati Rembang bernama RMAA Djodhiningrat yang juga berpoligami. Kartini tertimpa perceraian dengan sewenang-wenang dari pihak suami. Kaum perempuan kurang memperoleh kesempatan bersekolah atau memperoleh pendidikan (Soerasno, 1955:126).

Selain R.A Kartini, ada Raden Dewi Sartika (4 Desember 1884-11 September 1947) dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan Indonesia. Dengan segenap pengetahuan, Dewi Sartika membangun sekolah gadis tahun 1904. Sekolah tersebut adalah Sekolah Isteri pertama, yang bersalin nama menjadi Sekolah Keutamaan Isteri. Akhirnya ada 9 sekolah gadis didirikan hingga tahun 1912 di berbagai kabupaten (*PPSW*, 1990:118). Dewi Sartika sohor sebagai pelopor pendiri sekolah perempuan Indonesia (*PPSW*, 1990:127).

Sebelum Kongres Perempuan Indonesia dihelat, terdapat sejumlah organisasi perempuan yang telah berdiri dan mendukung diselenggarakannya kongres di antaranya Wanito Utomo, Wanito Taman Siswo, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Jong Java, Aisyah, JIBDA (*Jong Islamienten Bond Domes Afdeeling*). Beberapa organisasi ini memikul mimpi luhur, namun tidak sanggup menyatukan misi apabila tidak menggelar kongres. Maka, Ny. Sukonto, Nyi Hajar Dewantoro, dan Ny. Sujatien memprakarsai kongres berupaya mencari jalan agar segenap organisasi perempuan itu berkumpul bareng mengulas nasib perempuan dan pemuda Indonesia di masa depan. Gagasan ketiga pemrakarsa dibantu oleh Sunaryati sebagai juru tulis untuk mengundang berbagai organisasi perempuan agar dapat menghadiri Kongres Perempuan Indonesia (Sutjiatiningsih, 1991: 11).

Berikut merupakan para tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang disadur dari Buku Biografi Kongres Perempuan Indonesia yang diuraikan melalui media infografis:

Gambar 2.2: Infografis Ketua KPI I



Gambar 2.3: Infografis Wakil Ketua KPI I



The infographic features a dark green background with decorative borders at the top and bottom. The name 'SITI MUNJIAH' is written in large, white, bold, uppercase letters. Below the name, there are two bulleted lists of achievements and characteristics. A central black and white photograph shows Siti Munjiah wearing a white headscarf and a patterned garment. The text is separated by horizontal green lines.

SITI MUNJIAH

- Wakil Ketua Kongres Perempuan Ke-1 (1928)
- Pengurus organisasi Aisyiyah (1917)



A black and white portrait of Siti Munjiah, a woman wearing a white headscarf and a patterned garment, looking directly at the camera.

- Rajin mencari pengalaman dengan tidak memilih-milih pengetahuan dan memperluas pandangan.
- Bekerja dengan penuh kesabaran dan tidak jemu melakukan sesuatu dengan cerdas dan berhati-hati.

Gambar 2.4: Infografis Sekertaris I KPI I



Gambar 2.5: Infografis Sekertaris 2 KPI I



SUNARYATI SUKEMI



JABATAN

- Sekertaris Ke-2 KPI I (1928)
- Ibu Pamong Organisasi Wanita Taman Siswa (1927-1942)
- Penulis I pada Kongres PPI I (1929-1930)
- Anggota Kongres All Asian Women Conference (1931)
- Ketua Pengurus Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) (1932)
- Wakil Ketua KOWANI VIII (1950)

MOTIVASI

Beliau ingin menggerakkan pemikiran kaum perempuan supaya dapat menjunjung martabat mereka dan mampu bekerjasama dengan kaum laki-laki dalam memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan.



VISI & MISI

- Ikut serta menerbitkan surat kabar, bersama dengan anggota redaksi terdiri: Nyi Hajar Dewantoro, Ny. Hajinah, Ny. Ali Sastroamoyojo, Ny. Ismudiyati, dan Ny. Budiah.
- Mendirikan suatu badan tetap untuk menyelidiki keadaan kaum buruh perempuan.

- Mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial, agar:
 - a. Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak.
 - b. Tunjangan yang bersifat pensiun tidak dicabut.
 - c. Memperbanyak Sekolah-sekolah untuk putri.
- Melakukan demonstrasi pawai pada hari ulang tahun kemerdekaan pertama NKRI.



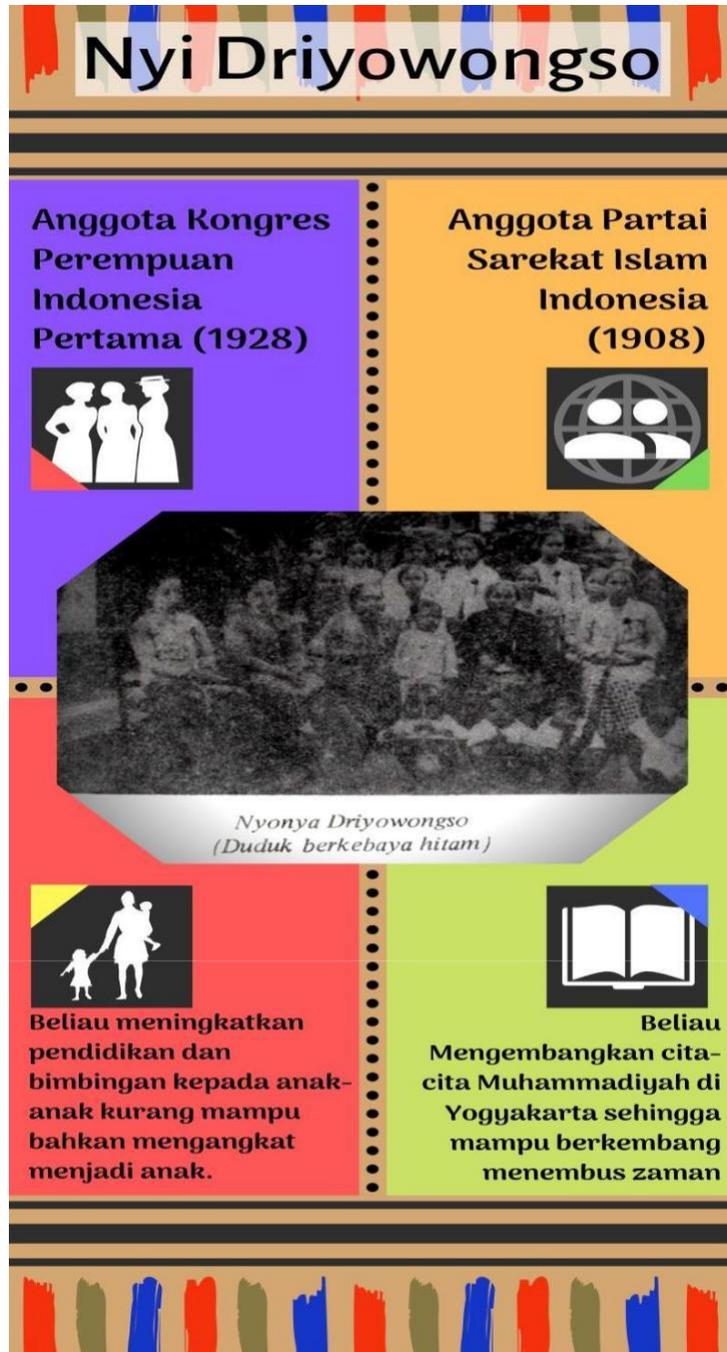
Gambar 2.6: Infografis Bendahara 2 KPI I



Gambar 2.7: Infografis Penggerak KPI I



Gambar 2.8: Infografis Anggota KPI I



Gambar 2.9: Infografis Anggota KPI I



The infographic features a dark brown background with orange accents. At the top, there is a header bar in orange. Below it, a black and white photograph of Hajjinah Mawardi is shown. To the left of the photo are icons: an open book, a pencil, and a document with lines. The name 'HAJJINAH MAWARDI' is written in large, bold, orange letters across the bottom of the photo. Below the photo, the section 'JABATAN' is followed by a list of her roles. To the right of the list is an orange silhouette of a woman's head. The next section, 'HASIL PENCAPAIAN', includes an icon of a document and a paragraph of text.

HAJJINAH MAWARDI

JABATAN

- Anggota Aisyiyah (1917)
- Anggota pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1928)

HASIL PENCAPAIAN

Beliau telah menggugah aspirasi perempuan Indonesia berupa karya tulisan dalam surat kabar Soeara Asiyah salah satu judul yaitu "Kemajuan", yang mengungkapkan bahwa pembaca tidak salah bahwa bangsa Jawa sekarang senang terhadap kemajuan atau senang maju, tetapi sayang mereka belum mengerti benar apa yang dimaksud kemajuan itu. Karena itu apabila mereka dilarang agar tidak berpergian atau berdandan yang berlebihan, mereka akan menjawab "Inikan jaman kemajuan". Bila disuruh menyapu lantai mereka akan menggerutu, "Sudah maju masih disuruh nyapu". Apalagi bila diberi tahu bahwa ada tingkah laku yang tidak pantas dan sebagainya. Mereka akan menjawab, "Kolot (kuno), Kolot!"...

Ada beberapa penggagas lainnya seperti Raden Ayu C.S.H yang menjabat Ketua Pengurus Wanito Katholik (pribumi), Ketua Komite Buruh Perempuan, Bendahara I pada Kongres Perempuan

Indonesia I. Visi misi diusung Raden Ayu diantaranya, yakni menyerukan tujuan Organisasi Wanita Katolik semisal mengadakan kursus menjahit untuk keperluan gereja dan diri sendiri, menggelar kursus pemberantasan buta huruf, mengadakan *baby crash* di pabrik Cerutu Taru Murtani, menghelat kursus PPPK, mengadakan perawatan untuk orang sakit, memperhatikan edukasi anak-anak dan perempuan, melindungi perlakuan buruk dari para pengusaha Jepang dan Tionghoa terhadap perempuan Indonesia.

Selain itu, Raden Ayu berikhtiar Kongres Perempuan Indonesia I agar menjadi pertalian antara perkumpulan perempuan Indonesia, berembug bersama menyoal kewajiban dan kemajuan perempuan Indonesia. Raden Ayu juga menyelenggarakan Kongres Wanita Katolik dengan hasil seperti membentuk Pusara Wanita Katolikme, membentuk pemuda Wanita Katolik yang diberi nama Musa Wanita Katolik (MWK) sebagai kader Wanita.

Ada pula Badiyah Muryati yang menjabat Ketua Jong Java di Salatiga, anggota Kongres Perempuan Indonesia Pertama, Pemimpin kepanduan Jong Java KURCACI, Pendiri persatuan perempuan di Karanganyar bernama Sri Paniti, Pengurus *Al emene Steum Fonds voor Indlandsche Bihoeftigen* (ASIB), anggota Fujinkai, anggota PMI, Ketua Yayasan Usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak (UKIDA), anggota KOWANI, anggota Ikatan Isteri Dokter Indonesia. Ia berperan mendirikan Sri Paniti bertujuan sosial menambah keterampilan para ibu serta memupuk persatuan di kalangan ibu; menggerakkan aksi sosial dalam perkumpulan ASIB yaitu mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak, mendirikan kursus memasak serta menjahit; membangun dapur umum dan posko kesehatan (posko

khusus makanan dan penanganan mayat yang gugur) di Kebumen kala itu wilayah ini menjadi status quo (perbatasan antara daerah pendudukan Belanda dan daerah RI). Beberapa anggota terakhir dari Kongres Perempuan Pertama seperti Ismudiyati Abdul, R.A Suryo Mursandi, Raden Ayu Bintang Abdulkadir.

2.3 Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia merupakan momentum sejarah yang amat penting bagi kebangkitan perempuan Indonesia. Hal ini merupakan tonggak sejarah dan lembaran baru dimana diletakkan dasar-dasar perjuangan perempuan yang memberanikan diri menyatakan kesatuan dan persatuan (Ridjal: 1993).

Gerak langkah perempuan pada masa pergerakan nasional telah didukung sepenuhnya oleh organisasi pemuda saat itu. Dalam konferensi P3KI yang dihadiri oleh utusan-utusan dari masing-masing organisasi seperti PSI, PNI, Pasundan, *Indonesische Studieclub*, mereka menyampaikan persetujuannya terhadap berbagai keputusan tentang ruang gerak tiap pergerakan kebangsaan.

Pada abad XX dikutip dalam sebuah surat kabar *Persatoean Indonesia*, sehabis peperangan besar munculah rupa-rupa pergerakan trisitimewa pergerakan kebangsaan (Nasionalisme), bahwa kaum perempuan bangkit dari menuju kemerdekaan untuk seluruh Asia, meski di Indonesia pada saat itu baru terdengar perkumpulan-perkumpulannya. Kaum pemuda dalam organisasi nasional memandang secara sadar bahwasanya kaum perempuan bergerak

untuk kehidupan yang layak dan berjuang bersama kaum laki-laki untuk kemajuan bangsa.

Berikut kutipan yang terantai dalam surat kabar *Persatoean Indonesia*:

”Roh kemerdekaan pun bernyala-nyala, berapi-api padanya, serta diharapkan Roh itu takkan padam lagi. Berdampinglah di sisi kaum laki-laki karena laki-laki sukar menggunakan sayapnya sendiri kalau sayap yang di kiri tak membantunya. Jikalau dua-dua kokoh dan teguh tak dapat tinggi terbangnya”.

Organisasi pemuda Indonesia memandang bahwa pergerakan kaum perempuan laksana air sejuk bagi orang yang haus dahaga. Mereka mengharapka bahwa kaum perempuan yang bangkit lewat organisasi tetap teguh pada pekerjaannya, serta mempertahankan dirinya meninggalkan segala bentuk yang tidak berfaedah bahkan merusak moral kaum perempuan (*Peratoean Indonesia*: 1929).

Pergerakan kaum perempuan sesungguhnya amat membantu perkembangan organisasi kebangsaan pada abad XX dan dianggap sebagai mahkota yang terindah bagi tumpah darah dan bangsa. Kemunduran bagi organisasi pemuda saat itu dirasakan apabila kaum perempuan hanya memikirkan soal bedak, rok pendek, *bobbed hair* dan sepatu hak tinggi, karena itu akan melalaikan kewajiban perempuan (dalam berorganisasi) terhadap bangsa (*Peratoean Indonesia*: 1929).

Apa yang telah diperjuangkan organisasi perempuan bagi kaumnya sangat didukung oleh pergerakan kebangsaan. Dalam surat kabar *Persatoean Indonesia* ditambahkan pula bahwa hal-hal yang tidak bermoral itu bukannya meninggikan derajat dan kemajuan

tanah tumpah darah dan bangsa, namun sebaliknya menjunjung moral yang dicita-citakan kaum lelaki, yakni kebebasan Indonesia menentang kolonialisme.

Tanggal 25 dan 26 Desember tahun 1928 diadakan konferensi P3KI yang dipelopori salah satunya organisasi PNI. Dalam pidatonya ditegaskan wakil pemerintah urusan umum dalam *Volksraad* mendukung sepenuhnya pergerakan organisasi pemuda Indonesia termasuk organisasi perempuan (*Peratoean Indonesia: 1929*).

”Pemerintah meletakkan tanggungan sepenuh-penuhnya atas sekalian partai, atau semua pemimpin rakyat, tidak saja bagi perasaan pribadi ataupun kepentingan lain. Dia akan memberi tanggungan sepatutnya bagi setiap pemuda bangsa untuk berbicara dalam batas-batas ketertiban umum... dan kebebasannya melahirkan pikiran (gagasan).”

”Kita tahu bahwa jalan kita banyak rintangan duri, ranjau dan lumpur, akan tetapi sebanyaknya itu, makin maju dan besar hati kita, makin banyak gelombang yang menerpa perahu namun hati kita tetap kuat seperti nahkoda...” (*Peratoean Indonesia: 1929*)

PNI sebagai organisasi pemuda era pergerakan nasional memandang jika seorang perempuan memenuhi kewajibannya dalam hal kemajuan zaman alangkah indah budinya bagi masyarakat dan bangsa, sebagaimana tertuang dalam selarik kalimat berikut:

”Supaya anak-anak laki-laki kami seperti pokok yang tumbuh dengan subur pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kami seumpama tiang penjuru yang terpahat akan perhiasan mahligai...Bahwa seorang isteri yang berbudi lebih besar harganya dari manikam, mampu mengatur pekerjaan dahulu dan menyediakan ladang agar kemudian membangun impiannya”. (*Persatoean Indonesia: 1929*)

Perempuan yang memiliki kemampuan dan memiliki niat ke arah pembaharuan dapat membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bergerak pada cita-cita kebangsaan ”*Handen aan den ploeg, is de beste methode*” (Peratoean Indonesia: 1929)

Gambar 2.10: Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22- 25 Desember 1928, di Yogyakarta



Sumber: artikel_kolomkitajournalism.org diakses 28 Oktober 2011

Gambar 2.11: Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia



KONGRES PEREMPUAN INDONESIA

Kongres Perempuan Indonesia ke-1 diselenggarakan di Yogyakarta, Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra dan bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan.



PENCAPAIAN

Pada 22 Desember 1953, dalam acara peringatan ke-25 Kongres ini, Presiden RI Soekarno menetapkan sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI No. 316 Tahun 1953. Sejak saat itulah, setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia.



CIKAL BAKAL KPI

Melalui kongres Pemuda ke-2 (28 Oktober 1928) yang menghasilkan "Sumpah Pemuda" telah menginspirasi tokoh-tokoh perempuan dari kelompok guru muda Jong Java yang telah membentuk cabang Poetri Indonesia di Yogyakarta, untuk membentuk Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia dari kiri ke kanan, yaitu Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa), Ibu Soekonto (Wanita Oetomo-Ketua Kongres), dan Nn. Soejatin (Putri Indonesia).



Sumber materi dan foto: rep. Idayu (Susan Blacburn)

Gambar 2.12: Infografis Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember 1928.



Sumber materi dan foto: rep. Idayu (Susan Blacburn, op.cit.)

Dalam Kongres Perempuan Indonesia I (KPI) pada tahun 1928 di Dalem Djojodipuran, Yogyakarta (sekarang menjadi Kantor

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional) oleh Ibu Soekonto dari Wanita Utama diperoleh putusan-putusan penting diantaranya:

- 1) Membentuk badan pemufakatan yang diberi nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)
- 2) Mendirikan Studenfonds (beasiswa) untuk gadis-gadis yang pandai, namun finansial tidak mampu
- 3) Mencegah perkawinan anak-anak
- 4) Menggalakan kepanduan bagi gadis-gadis
- 5) Menerbitkan surat kabat yang redaksinya terdiri dari: Nyi. Hadjar Dewantara, Ibu Ali Sastramidaja, Ibu Hajinah, Ibu Ismoedijati, Ibu Badiah, Ibu Soenarjati

Satu hal kesepakatan kongres perempuan pertama bahwa kongres perempuan kala itu disepakati pelaksanaan Hari Ibu yang diselenggarakan setiap 22 Desember, bahkan tahun 1950 tanggal 22 Desember dijadikan Hari Besar Nasional. Ini merupakan hal bersejarah yang dirasakan organisasi perempuan Indonesia hingga saat ini (Blackburn, 2007:xii).

Seperti yang diuraikan salah satu pemenang lomba menulis pada hari Ibu dengan tema “Makna Hari Ibu” bahwa:

“Hari ini kita merayakan Hari Ibu supaya kita memuji, ... jasa dari perempuan yang telah bersedia menjadi ibu anak-anak, istri suaminya dan warga masyarakat, ...

Jasa ibu yang mengelola ekonomi rumah tangga, yang mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya, yang menjaga dan mempertahankan kesejahteraan keluarganya disamping ia juga aktif di masyarakat. Ibu memberi bentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ia mempersiapkan anak-anak menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tanggal 22

Desember 1928 dilihat sebagai hari dimana perempuan Indonesia menjadi perempuan yang sadar sepenuhnya akan kodratnya, tugasnya, kedudukannya, dan posisinya di masyarakat”

Atas ditetapkannya hari Ibu, maka lahirnya prinsip “Ibuisme” yang disalahgunakan oleh penguasa khususnya pada masa Jepang dan pasca kemerdekaan. Tidak lagi gerakan perempuan revolusioner yang unjuk kemampuannya untuk membangun bangsa bersama dengan pemuda. Akhirnya komitmen awal KPI menjadi redup hingga lahirnya gerakan perempuan reaksioner untuk mendukung komitmen awal KPI.

Gambar 2.13: Infografis Peringatan Hari Ibu



Kongres Pertama menghasilkan federasi organisasi perempuan yang bernama Persatuan Perempuan Indonesia (PPI). Setahun berlalu, PPI diubah menjadi PPII (Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia). PPII bergiat di bidang edukasi dan usaha penghapusan perdagangan perempuan. Kongres Nasional berikutnya di 3 kota, yaitu Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941). Kongres nasional yang acap dilakukan menyuntik semangat nasionalisme kepada berbagai organisasi perempuan Indonesia (Blackburn, 2007:xii).

Tahun 1929 Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) diubah menjadi Perserikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII). PPI diubah badannya menjadi PPII menunjukkan bahwa visi-misi kongres awalnya menjadi luas sehingga mulai saat itu ada banyak dinamika yang muncul dalam tubuh pergerakan perempuan Indonesia. Murniati (2004) menjelaskan:

”ternyata di kalangan perempuan sendiri, masih terjadi perebdaan pendapat, bahkan sampai masa reformasi, khususnya mengenai aspek kehidupan politik agama dan budaya...”

Dari berbagai dinamika yang ada memperlihatkan bahwa berbagai perkumpulan dan perikatan sangat tertekan akibat aspek kehidupan politik, agama dan budaya, apabila berjuang secara mandiri, karena periode itu seperti masa percobaan bagi berbagai organisasi perempuan dimana pasca KPI I kian banyak organisasi perempuan lahir. Murniati (2004) menegaskan perempuan Indonesia masih diliputi kecemasan dan takut untuk mengarahkan perjuangan kaum perempuan kepada ranah kehidupan yang diimpikan.

Salah satu pelopor Kongres, Nyi Hadjar Dewantara merupakan isteri dari Suwardi Suryaningrat yang ikut dalam organisasi pemuda, sehingga gerak langkah perempuan kian dikuatkan oleh organisasi pemuda era pergerakan nasional. Badan itu merupakan gabungan yang anggotanya terdiri dari perkumpulan perempuan. *Studiefonds* dinamai Seri Derma dan sampai kini masih berjalan baik. Adapun modal pertamanya adalah harta peninggalan dari Ibu Moegaroemah seorang aktivis KPI I yang meninggal beberapa bulan sesudah kongres berlangsung (Ridjal: 1993).

KPI II berlangsung pada tahun 1935 di Jakarta, dipimpin oleh Ibu Sri Mangensarkoro dari Wanita Tamansiswa. Formulasi "Ibu Bangsa" dicetuskan dalam kongres ini. Ditetapkan bahwa kewajiban perempuan Indonesia yang terutama ialah menjadi ibu bangsa yang berarti bahwa setiap perempuan Indonesia wajib berusaha akan tumbuh sebagai bangsa yang baru dan lebih sadar akan kebangsaannya (Buku 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, hlm 30). Pada kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (Kongres Perempuan Indonesia), dan PPII dibubarkan. Perhatian tertuju kepada kaum perempuan miskin, tetapi keanggotaannya masih berasal dari lapisan atas, meski tuntutan yang disuarakan sebagian besar mengarah pada kepentingan kaum perempuan golongan atas (Weirenga, 1998:12). Sejak saat itu organisasi nasional khususnya organisasi perempuan semarak, dan terlihat pula tanda tumbuhnya nasionalisme. Semangat itu tampak saat awal pendudukan Jepang, Perempuan Serikat Rakyat (PSI) dan Istri Sedar menentang pemerintah kolonial Belanda, mereka juga

memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme (Weirenga, 1998:13).

Kemudian KPI-III berlangsung tahun 1938 di Bandung diketuai Ibu Emma Poeradiredja dari Pasundan Isteri. Dalam kongres ini diputuskan adanya Hari Ibu dan dipilih tanggal 22 Desember, hari pertama KPI-I. Perjuangan politik maju selangkah dengan diberikannya hak pilih pasif (*passief kiesrecht*) oleh pemerintah jajahan kepada 4 orang perempuan menjadi anggota Dewan Kota (*Gemsente Raad*), yaitu Emma Poeradiredja (Bandung), Sri Oemijati (Cirebon), Soenarja Mangoenpoespito (Semarang), dan Siti Soendari Soedirman (Surabaya). Hak pilih perempuan merupakan salah satu indikator pengakuan terhadap perempuan sebagai warga negara.

Pencetus gagasan Hari Ibu adalah Soetinah Soeparta, kemudian bernama Ibu Said Soearjadinata dari Isteri Indonesia. Mereka berusaha mengubah pandangan dan anggapan masyarakat dengan mengadakan kegiatan kesetaraan. Kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas perempuan itu dilaksanakan pada suatu hari tertentu yang diberi nama *Hari Ibu*. Usulan Hari Ibu diterima secara aklamasi yang jatuh pada 22 Desember. Pada Hari Ibu diharapkan segenap masyarakat Indonesia dapat memperingati jasa dan pengorbanan perempuan Indonesia yang memikul tugas: 1) isteri pendampung suami (tidak harafiah), mitra sejajar dan seimbang dalam suka dan duka; 2) ibu dari anak-anaknya, pemangku turunan (KHD), 3) penerus nilai luhur kehidupan, pengasuh dna pendidik pertama dan utama; 4) anggota masyarakat/warga negara.

Jasa ibu dibalas dengan budi bakti, kepada Ibu Pertiwi dengan mengadakan usaha sosial kemanusiaan sebagai perwujudan usaha yang dapat membawa kaum perempuan ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang dikehendaki bersama. Maksud Hari Ibu tidak untuk memuja kaum perempuan dan tidak perlu memanjakannya. Atas permohonan KOWANI, di bawah pimpinan Ibu Mr. Maria Ulfah Santosa, maka dengan Kepres No. 316, 16 Desember 1959, pemerintah telah mensahkan Hari Ibu sebagai Hari Besar Nasional, bukan hari libur dan sama nilainya dengan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan sebagainya. Segenap lapisan masyarakat patut berperan serta (Ridjal: 1993).

Kongres Perempuan IV dilangsungkan di Semarang dalam gedung "*Dependance Stadstuin*" dengan perhatian publik yang luar biasa. Kongres dihelat malam hari, Sabtu-Minggu 24-25 Juli 1941. Dalam perkembangannya khususnya pada Kongres Perempuan Indonesia IV digambarkan bahwa Kongres Perempuan Indonesia IV didukung sepenuhnya oleh pemuda seperti Surya Wirawan, Natipij, Hisboel Wathan, Paria, Pemuda Gerindo dan Laskar PAI yang mengatur keamanan dalam kongres tersebut (Ridjal: 1993).

Di dalam gedung pertemuan dihiasi sebuah pigura besar bergambar sebuah putri Indonesia berdiri di pinggir sawah bersama anak kecil. Di tengah sawah ada seorang tani sedang membajak sawahnya. Pertemuan dihadiri kurang dari lebih 900 orang dengan mayoritas perempuan. Muncul pula beberapa anggota *gemeenteraad* dan *provinciale* Jawa Tengah, Suroso, wakil PVPN, anggota dewan rakyat, Dr. Buntaran, direktur CBZ Semarang. Organisasi luar

Semarang juga mengirimkan wakilnya seperti pengurus Perkino dan Majelis Luhur Taman Siswa (*Pemandangan*, 1941).

Wacana diusung Kongres Perempuan IV ialah membimbing kaum perempuan Indonesia, juga meninggikan derajat kaum perempuan dari segala tingkatan (*Pemandangan*, 1941). Ketua KPI IV, yakni Ibu Soenarja Mangoenpoespito dari Isteri Indonesia. Dalam Kongres dilakukan mosi tidak kepada pemerintah jajahan, agar perempuan Indonesia diberi pula hak pilih aktif (*aktief kiesrecht*) (Ridjal: 1993).

Tahun 1941 Komisi Visman, suatu komisi yang meneliti keinginan bangsa Indonesia akan bentuk pemerintahan di Indonesia, mengundang 2 tokoh perempuan: Ibu Soenarjo Mangoenpoespito dari Isteri Indonesia menyatakan keinginannya "Indonesia Berparlemen"; Ibu Sri Mangoensarkoro dari Wanita Tamansiswa menyatakan keinginannya "Indonesia Merdeka". (Fauzie Rizal: 1993).

Selanjutnya, KPI V digelar di Surabaya tahun 1943, tidak dapat terlaksana karena tahun 1942 Jepang datang menduduki Tanah Air. Sepucuk keputusan penting, yakni terbentuknya gabungan PPI. Dalam perjalanannya, lembaga ini berkembang dan berubah nama serta strukturnya menjadi *Badan Kongress Wanita Indonesia* disingkat KOWANI yang disesuaikan tuntutan perempuan kala itu. KOWANI mewakili gerakan perempuan Indonesia baik di dalam negeri maupun di forum internasional dan menjadi anggota International Council of Women, saat ini KOWANI beranggotakan 64 organisasi perempuan. KOWANI mengadakan kongresnya 5 bulan sekali. Putusan lain yang sampai sekarang masih dianggap

penting dan perlu diantaranya: 1) Yayasan Seri Darma, Studiefonds;
2) mencekah perkawinan di usia muda/anak-anak (Ridjal: 1993)

2.4 Perjuangan Organisasi Perempuan

Menangkis nafsu menindas mendorong berdirinya organisasi perempuan Indonesia. Penindasan tersebut menjadi tantangan dari masa ke masa. Permulaan organisasi wanita abad XIX, bentuk penindasan terhadap perempuan Indonesia berupa kawin paksa, poligami, perceraian, dan minimnya kesempatan bersekolah atau mencecap pendidikan (Ridjal, 1993).

Abad XX, sejumlah alasan pendirian organisasi perempuan: memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan tampil di publik, membuang rasa “takut” dan mendongkrak kemampuan perempuan, seperti lapangan pekerjaan, membawa perubahan sosial dan spirit pemuda-pemudi Indonesia, bertujuan menangkis imperialisme dan kolonialisme, menuntut persamaan hak, yaitu hak perempuan dan kesejahteraan kaumnya, berperan aktif dalam politik meningkatkan kondisi kerja yang baik bagi buruh perempuan serta mendukung pendidikan nasional bagi perempuan pekerja (Ridjal, 1993).

Dari waktu ke waktu, organisasi perempuan muncul dan berkembang kian bervariasi. Timbul aneka corak organisasi dipengaruhi kebutuhan masyarakat kala itu dan kreatifitas pemrakarsa atau pengurusnya. Namun, tidak seluruh organisasi bisa subur sampai sekarang, bahkan banyak yang tenggelam, lantaran dibubarkan atau melompong pengurus yang aktif (*PPSW:119*). a. Organisasi Perempuan Era Pergerakan Nasional

1) Periode 1912-1928

Organisasi perempuan Indonesia dimulai awal kebangkitan nasional tahun 1908-1928, ditandai lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sejarah mereka lahirnya organisasi perempuan pertama: Putri Mardika di Jakarta tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan edukasi bagi perempuan, mendorong perempuan tampil di publik, membuang rasa “takut” dan “mengangkat” perempuan pada posisinya setara seperti laki-laki dalam aspek lapangan pekerjaan (Blumberger, 1978:160; Wieringa, 1999:105). Tahun selanjutnya, bermunculan organisasi perempuan, seperti Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915.

Seiring terbentuknya organisasi nasional dan partai politik, maka organisasi perempuan mulai terbentuk sebagai sayap (bagian dari organisasi perempuan) maupun wadah organisasi yang dilaksanakan oleh perjuangan perempuan di satu sektor atau tingkat tertentu. Di sisi lain, perkembangan organisasi berbasis agama, seperti Muhammadiyah membentuk organisasi perempuan Aisyiah. Aneka karya jurnalisme meluas, kiprah sejumlah sastrawati muncul ke permukaan (Sekneg RI:1).

Aisyah berdiri tahun 1917 dipelopori Nyi Ahmad Dahlan (isteri KH Ahmad Dahlan). Misi pendirian Aisyah ialah menyemaikan Islam untuk perempuan (Weiringa, 2010:21). Organisasi ini berkibar dan sanggup mensejajarkan diri dengan organisasi perempuan lainnya. Selain Aisyah, di daerah dibentuk pula organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun (PIKAT)

di Manado tahun 1917, Purborini di Tegal, Wanito Soesilo di Pemalang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1919, dan Poetri Boedi Sedjati di Surabaya tahun 1919 (blog organisasi perempuan: 17 April 2012).

Setahun kemudian, tepatnya 1920, Wanita Utomo berdiri di Yogyakarta yang dipelopori oleh Budi Utomo mengusung perubahan sosial dan spirit kawula muda Indonesia guna menabrak imperialisme dan kolonialisme. Gairah Wanita Utomo membunch bersama organisasi wanita lainnya menuntut persamaan hak perempuan dan kesejahteraan kaumnya (Weiringa, 2010:120). Di tahun yang sama, berdiri organisasi perempuan daerah seperti Wanito Muljo di Yogyakarta dan Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukit Tinggi (Sekneg RI:1).

Disusul Wanita Taman Siswa berdiri 3 Juli 1922 yang digagas Ki Hajar Dewantara bersama belahan hatinya. Mereka memadukan metode pendidikan Barat dalam pendidikan tanpa melepas nilai dan budaya Jawa. Sekolah Liar mereka yang bebas menolak subsidi pemerintah (Sekneg RI:129).

Pada 26 Juni 1924 berdiri Wanita Katolik. Organisasi ini beranggotakan ibu-ibu Katolik yang dipelopori R.Ay.C. Hardjadiningrat. Semula anggotanya para guru putri dan karyawan wanita pabrik Cerutu "*Negresco*". Misi yang dianyam adalah mengaktrol kedigdayaan wanita dari sisi intelektual dengan mengajari membaca dan menulis, juga menyodori bahan bacaan supaya pengetahuan mereka tambah jembar.

Gambar 2.14 : Tahun 1912-1928 dikenal sebagai era pendidikan bagi perempuan Indonesia (*Van Deventer School Solo*).



Sumber: Ruth Indiah Rahayu (Rahayu:119)

2) Periode 1928-1942

Spirit berorganisasi kaum perempuan mencuat selang beberapa bulan usai Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan para pemuda tahun 1928. Buktinya, dihelat Kongres Perempuan Pertama di Yogya. Ribuan orang menyemut dalam pembukaan resmi Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Lantas, tanggal 22 Desember dikukuhkan sebagai hari Ibu Nasional, sebab saat itu kaum wanita Indonesia dinilai sadar memperbaiki posisinya dalam masyarakat (*Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita*). Mengemuka aneka topik persoalan dari Aisyah,

Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, dan berbagai organisasi kecil saat itu (Blackburn, 2007:xi).

Pengaruh Kongres Perempuan tahun 1928 memicu lahirnya organisasi istri paling menonjol adalah Isteri Sedar. Organisasi ini memperjuangkan perempuan Indonesia berkecimpung aktif di jagad politik, meningkatkan perbaikan kondisi kerja bagi buruh perempuan dan mendukung pendidikan nasional bagi para perempuan pekerja (blog organisasi perempuan: 17 April 2012).

Tahun 1932 PPII menerbitkan maklumat mengajak seluruh anggota dan kaum ibu se-Indonesia membantu Tamansiswa menentang *Onderwijs Ordonantia* dan *Wilde Scholen Ordonantie* yang hendak dijalankan pemerintah kolonial mulai 1 Oktober 1932. Isteri Sedar juga berkiprah aktif (*Pusara*, November 1932: 2021). Tahun 1932, dalam kongresnya, PPII meniadakan isu perjuangan melawan perdagangan perempuan dan sepucuk keputusan pokok diambil, yakni mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A) (Sekneg RI:1).

Pada 1935 menuntut hak pilih perempuan pertama di sebuah kongres. Pasalnya, pemerintah kolonial membuka peluang perempuan Indonesia tanpa hak suara (Stuers, 1960:95). Maka, dilakukan kampanye dan perempuan supaya terlibat dalam *Volksraad*. Perempuan pertama mengenyam pendidikan Belanda sebagai pengacara adalah Maria Ulfa. Hak suara untuk perempuan pun mulai dibuka (Scholten, 2000).

Perkembangan berikutnya, hadir sekelompok pemerhati buruh perempuan diketuai Ny. Sujatin. Bersama kelompoknya, Ny. Sujatin pergi ke Lasem menyelidiki kondisi buruh batik yang sejatinya tersandera. Mereka memprotes atas kondisi kerja buruh perempuan, namun juga mempercakapkan persoalan nasib perempuan penghibur dan gundik lelaki pemilik usaha batik (Rambe, 1983:43-44).

Tahun 1940 kali pertama, Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia lahir di Jakarta. Perkumpulan ini beranggotakan para perempuan pekerja kantor pemerintah maupun swasta seperti guru, perawat, pegawai kantor, dan lainnya. Namun, ditengok dari kegiatannya, organisasi itu belum bisa disebut organisasi profesi, sebab umumnya corak kegiatannya pada edukasi keterampilan keperempuanan dan pemupukan kesadaran kebangsaan, sehingga tidak jauh beda dengan kegiatan organisasi perempuan lainnya (Sekneg RI).

3) Periode 1942-1945

Era okupasi Jepang (1942-1945), segala bentuk organisasi dilarang. Kemudian dibentuk organisasi baru oleh Jepang berdalih sebagai propaganda untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa Asia Timur Raya. Organisasi perempuan dibentuk para istri pegawai di daerah, dan diketuai istri saban kepala daerah yang disebut Fujinkai. Kegiatan Fujinkai dibatasi hanya pada urusan keperempuanan dan peningkatan keterampilan domestik, selain menghibur tentara yang sakit dan kursus buta huruf. Bagi perempuan berwawasan luas, pembatasan ini merisaukan. Buahnya, mereka emoh masuk

Fujinkai. Kenyataan ini membelah orientasi di kalangan aktivis perempuan, yaitu yang bernaung di bawah Dai Nippon dan yang non-kooperatif atau memilih bergerak diam-diam di bawah tanah (Sekneg RI). Mereka bergerak di bawah tanah menentang kolonialisme disebut GWS (Gerakan Wanita Sosial). Banyak kaum nasionalis, termasuk anggota perempuan, ditangkap dan dibunuh (Wieringa:12).

b. Organisasi Perempuan pada Pasca Kemerdekaan

Presiden Sukarno menghimbau kepada perempuan Indonesia membahu membantu pemerintah mencapai tujuan kemerdekaan secara serius. Dalam karyanya berjudul “Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia” Sukarno meminjam beberapa kalimat dari Agust Bebel dalam bukunya berjudul “*Die Frau und der Sozialismus*” yaitu:

“Juga di atas pundak perempuanlah terletak kewajiban untuk tidak ketinggalan di dalam perjuangan ini, dimana diperjuangkan kemerdekaan mereka dan pembebasan mereka. Mereka sendiri harus membuktikan, bahwa mereka mengerti benar-benar tempat mereka dalam perjuangan sekarang yang mengejar masa depan yang lebih baik itu, bahkan mereka telah bertetap hati ikut serta dalam perjuangan itu. Pihak laki-laki berkewajiban membantu mereka itu dalam membuang semua prasangka yang salah, dan membantu mereka itu ikut serta dalam perjuangan...” (Sukarno: 1984)

1) Organisasi Perempuan Pada Masa Revolusi Nasional (1945-1949)

Usai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda mencoba memasuki Indonesia dengan bantuan sekutu. Periode ini diwarnai revolusi fisik. Juga iklim politik detik itu merangsang tumbuhnya organisasi perempuan bermisi turut membela dan menegakkan kemerdekaan negara (*PPSW:122*).

Membantu perjuangan dari garis belakang, maka dibentuk Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) tanggal 17 Desember 1945 di Klaten, Jawa Tengah. Disebut organisasi perempuan sekuler berazaskan Pancasila, sebab organisasi kemasyarakatan perempuan yang berorientasi pada kesatuan budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Tidak menjadi organisasi politik mana pun, tetapi anggotanya leluasa berpartisipasi dalam politik.

Salah satu tokoh yang berkontribusi besar bagi perkembangan PERWATRI ialah Suyatin. Ia lahir dari keluarga kelas menengah pada 7 Mei 1907, di Wates, Yogyakarta. Ayahnya, Joyohadirono, seorang pegawai Jawatan Kereta Api dan juga salah satu pendiri Budi Utomo, di Sumpiuh. Masa kecilnya dihabiskan di Sumpiuh, beberapa kilometer dari Yogyakarta. Suyatin sepanjang hidup menekuni dan menjadi bagian organisasi perempuan, seperti PERWARI. Laiknya anak yang *mikul dhuwur mendem jero*, sosok ibunya yang lembut dan begitu halus ditulis Suyatin dalam memoar berjudul “*Sumbangsihku bagi Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*”. Ayah Suyatin juga mengajarnya berpikiran bebas,

realistis dan apa adanya, selain memahaminya sebagai unsur edukasi. Suyatin merenung, kebebasan berpikir tidak lagi dihambat oleh aturan adat atau norma tradisional yang irasional.

Kehidupan era kolonial dan masyarakat feodal memicu keprihatinan Suyatin atas diri perempuan yang menjadi selir dan garwa padmi. Semangat revolusionernya tergugah atas pemikiran R.A Kartini yang ditorehkan dalam bukunya *Habis Gelap terbitlah terang*, yang disimaknya saat berusia 12 tahun. Pustaka ini mendedah sikap menentang feodalisme, kaum aristokrasi yang memposisikan perempuan sebagai *konco wingking*.

Pengaruh Kartini meluap dalam diri Suyatin terbukti saat memimpin organisasi PERWARI bahwa gerak, perjuangan dan kegiatan yang dilakoni adalah refleksi ide dan pemikiran Kartini. Suyatin mendirikan sekolah dan asrama perempuan, serta menolak poligami dengan regulasi perkawinan.

Suyatin menjadikan organisasi sebagai wadah mengaktualisasikan pemikiran Kartini dan apa yang telah dirintisnya membuka kesempatan perempuan mendapat hak pendidikan dan hukum. Ia mulai berkegiatan sedari sekolah di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) atau setingkat sekolah menengah pertama. Ide dan pemikirannya tak sedikit dituangkan dalam tulisan di *Suara Perwari* majalah semacam jurnal yang terbit sejak tahun 1950.

Ketika peringatan Hari Ibu ke-25 tahun 1953, ia menulis opini di surat kabar *Merdeka*. Dijelaskan, perempuan Indonesia memasuki fase pertama feminisme, yaitu liberal yang

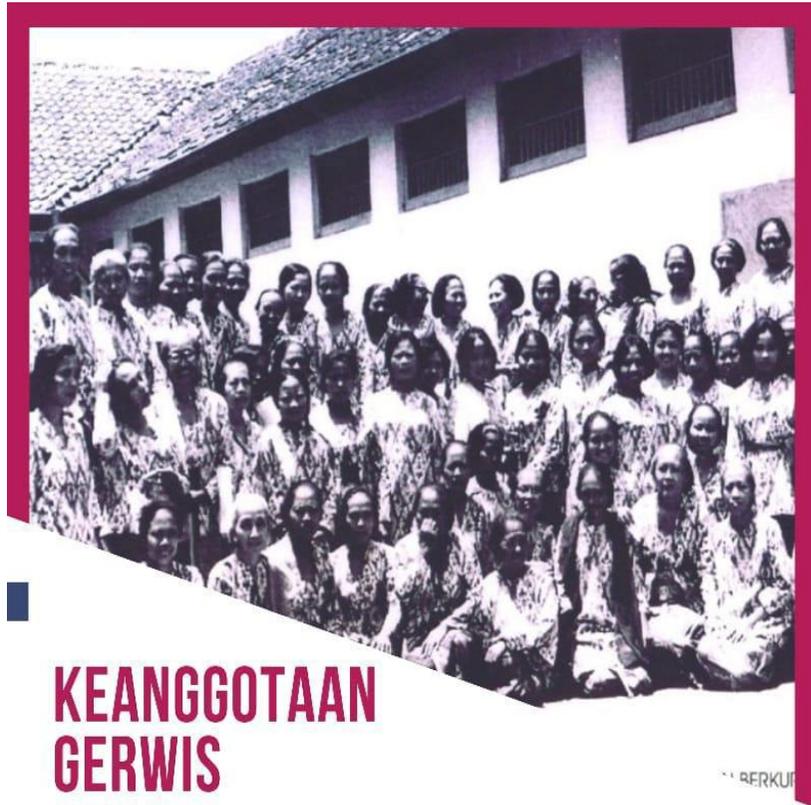
perjuangannya menitik beratkan pada lingkup publik dengan sarana edukasi, hukum, dan umumnya tuntutan persamaan kesempatan.

Dari hidup Suyatin, terpancar pelajaran penting. Pertama, perjuangan untuk bangsa bisa dimulai dari daerah di segala bidang, sehingga mampu memajukan daerahnya lewat kemitraan dengan berbagai lembaga. Kedua, kebutuhan diri bisa diperoleh dengan pikiran kritis dan budi luhur. Tak ayal, ciri khas perempuan bersahaja tercemin lewat tindakan tulus dan cerdas, bukan semata bersolek diri. Ketiga, berniat dan bersemangat memperjuangkan hak-hak yang tertindas dengan kegiatan berorganisasi hingga partisipasi dalam parlemen.

Gagasan lainnya adalah penting bagi perempuan menimba ilmu pengetahuan seluas mungkin, terutama kaum ibu sehingga jago mengasuh anak. Selain menguasai ilmu pengetahuan, menurutnya dapat memanfaatkan untuk misi perdamaian seperti yang dibeberkan dalam tulisan “Wanita dan Perdamaian”. Patutlah kita berjuang demi bangsa dengan mendalami karakter para tokoh bangsa, khususnya perempuan Indonesia yang mengikuti jejak Kartini. Namun, langkah ini musti didukung pemerintah supaya para aktivis sosial dan politik di lingkaran perempuan bebas menyalurkan aspirasi mewakili suara masyarakat Indonesia.

Waktu bergulir, didukung dinamika organisasi dan kebijakan pemerintah, banyak anggota Perwari masuk partai politik atau organisasi perempuan baru seperti Gerwis.

Gambar 2.15: Infografis Keanggotaan Gerwis



KEANGGOTAAN GERWIS

Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis) merupakan cikal bakal Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), salah satu organisasi perempuan yang sangat disegani. Gerwis didirikan di Semarang pada 4 Juni 1950 oleh Umi Sarjono dan SK Trimurti beserta enam organisasi perempuan: Rupindo (Rukun Putri Indonesia, Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerwindo (Gerakan Wanita Indonesia, Kediri), Wanita Madura (Madura), dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruan).

Program utama Gerwis adalah menuntut UU Perkawinan dan mengkampanyekan hak-hak perempuan. Banyak penekanan ditempatkan pada undang-undang perkawinan, yang memberikan prioritas kepada kebiasaan setempat bahwa di banyak tempat membatasi kemampuan perempuan untuk mewarisi harta atau untuk menolak pernikahan poligami secara paksa.

Gambar 2.16 : KUPP Perwari disaksikan oleh konsultan Perwari Ms. Karen H. Smith, menyerahkan penghargaan kepada seorang pengurus gedung (Seksi Umum)



Sumber : <http://www.perwari.org/web/index> diaskes 14 Maret 2012

Gambar 2.17 : Kerjasama Perwari dan Soekarno dalam penyelenggaraan program perwari.



Sumber: <http://www.perwari.org/web/index> diaskes 14 Maret 2012

Kelompok perempuan bekerja di masa sebelumnya hanya bergerak di bidang pendidikan dan sosial, tetapi pada masa ini mulai mempertajam statusnya sebagai elemen organisasi buruh yang mengikuti seluruh ideologi dan cara perjuangan kelompok sosial. Mereka tergabung dalam Barisan Buruh Perempuan. Ada juga kelompok perempuan terbentuk lewat partai politik, seperti Masyumi dengan Muslimatnya, dan Organisasi Pemuda Islam Indonesia dengan bagian puterinya. (*PPSW:122*)

Variasi organisasi perempuan era ini dibuktikan dengan munculnya organisasi khusus dari kalangan istri Angkatan Bersenjata seperti Persiti (Persekutuan Istri Tentara, 1946) mengusung spirit membantu sesama keluarganya yang turut berjuang (*PPSW:122*).

Tahun 1948 berdiri Partai Wanita Rakyat atas inisiatif Ibu Sri Mangunsarkoro di Yogyakarta. Partai ini berazaskan ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan. Juga punya program perjuangan yang militan. Demikian pula keputusan kongres Kowani tahun 1948 dan 1949, sarat muatan politis dan militan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Partai berdiri pada 1948, dan Nyi Mangunsaekoro menyuarakan monogami (Vreede-de Stuers 1960).

2) Masa Demokrasi Liberal (1949-1959)

Masa ini sohor sebagai periode demokrasi yang menyedot perhatian publik untuk gegas membangun di segala bidang. Sebagian organisasi perempuan memilih

berjuang dan terlibat merebut kemerdekaan bangsa. Mereka membentuk Organisasi Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) pada 4 Juni 1950 di Semarang. Tujuannya, berjuang dan memperhatikan aspirasi kaum perempuan miskin. Pada Kongres Nasional I, Desember 1951, Gerwis memutuskan program kerja ke depan yaitu mengubah nama dan arah perjuangan yang lebih menyatu dengan kaum perempuan buruh, tani dan yang ada di basis massa. Pada 1951 dibentuk Wanita Demokrat Indonesia sebagai afiliasi Partai Nasional (PNI). Ada pula organisasi khusus detik itu seperti Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. tahun 1953 berdiri Wanita Nasional sebagai afiliasi Partai Indonesia Raya (PIR) (*PPSW:122*).

Akhirnya, dalam Kongres Nasional II Maret 1954 di Jakarta, Gerwis bersalin nama menjadi Organisasi Wanita Indonesia (Gerwani). Perubahan nama ini bermaksud menghilangkan kesan “karakteristik sempit” dari Gerwis. Gerwani menekankan pokoknya arti kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan atas dasar menghormati perbedaan. Juga membangun program seperti mempertahankan hak kaum perempuan, kebahagiaan anak, kemerdekaan nasional, dan perdamaian dengan membangun persatuan (*Diniah, 2007:97-98*).

Gambar 2.18 : Anggota organisasi perempuan (dahulu Gerwis diganti Gerwani 1960)



Sumber : [http://: artikel_kolomkitajournalism.org](http://artikel_kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

Gambar 2.19: Dari kiri-kanan: Rewang, Mulyono, Siswoyo, Sri Mulyani, Musayid, Jane Luyke, Kemi, Sri Fitnah dan Mun. Para perempuan ini adalah Pimpinan Organisasi Wanita Indonesia (Gerwani) Jawa Tengah. Mereka berfoto bersama di depan rumah Jl.Cidurian 19,Menteng, Jakpus.



Sumber : <http://Institut-Sejarah-Sosial-Indonesia.kaskus.com> diakses 12 Maret 2012

Organisasi perempuan ini ajeg memperjuangkan hak perempuan, dan itu dinyatakan dalam KOWANI tahun 1955, 1957, dan 1958. Dalam prosesnya banyak perempuan, termasuk organisasi tersebut kecewa gara-gara wakil perempuan sangat sedikit dalam parlemen. Partai Wanita Rakyat tidak mendapat banyak perhatian pemerintah (Saskia E. Weiringa: 229; Dinih:80). Partai yang berdiri tahun 1946 itu menganjurkan adanya monogami, tetapi sesudah Pemilihan Umum era Demokrasi Parleментар tidak terlihat lagi organisasinya.

Organisasi perempuan berkembang dan ikut berperan dalam dinamika politik perempuan masa demokrasi liberal, misalnya organisasi para isteri polisi, seperti Bhayangkari. Perjuangan para anggota tidak hanya terbatas pada kesejahteraan keluarga dan membantu suami, tetapi juga berjuang untuk hak-hak perempuan pekerja (Dinih, 2007:82).

3) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Tahun 1959, kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya sangat berpengaruh pada organisasi perempuan, terutama Gerwani, karena menjadi organisasi pendukung Presiden Sukarno. Hal ini juga memengaruhi organisasi perempuan lainnya seperti Kowani. Organisasi perempuan yang tergabung dalam keanggotaan (Kowani) mau tidak mau menghubungkan aneka kegiatannya dengan Nasakom, dan Manipol yang lazim saat itu (Dinih, 2007).

Perubahan tampak di tubuh organisasi Kowani, yang berhaluan kiri. Buktinya, melakoni tindakan penonaktifan organisasi perempuan Muslimat sebagai bagian dari perempuan Masyumi dikeluarkan Kowani. Pasalnya, Gerwani makin meluaskan pengaruhnya tahun 1960-an. Kowani dan Gerwani mendukung pembebasan Irian Barat. Kowani menjadi kian aktif dan giat berkegiatan perjuangan. Selanjutnya, Kowani menjalankan relasi dengan Organisasi Wanita (GOW), di berbagai daerah semakin meluas dengan pengadaan kursus pendidikan dan lain sebagainya, meski persoalan politik nasional tetap menjadi perhatian utama organisasi ini (Diniah, 2007).

Pengaruh Gerwani meningkat terlihat jelas di kongres KOWANI 1961. Ketika itu, Presiden Soekarno menasihati KOWANI supaya bekerjasama dalam upaya membangun masyarakat adil dan makmur (Suwondo, 1981a:198). Kongres menyetujui struktur baru lewat penggantian sekretariat dengan dewan eksekutif dan merombak sistem konsesus dengan mayoritas sederhana. Maka, organisasi perempuan Islam tidak lagi bisa menghalangi desakan KOWANI bagi monogami (Suwondo, 1981a).

Pada 8 Maret 1965, Gerwani merayakan kemenangannya. Federasi menjadikan hari itu juga sebagai Hari Buruh Perempuan. Untuk itu, hak dan aspirasi para buruh perempuan bisa disalurkan kepada pemerintah. Akhirnya, masyarakat sosial mendukung organisasi perempuan dalam menghapus penindasan.

2.5 Komitmen Organisasi Perempuan untuk Kebangsaan

Aneka perjuangan ditempuh organisasi perempuan Indonesia melawan penindasan terhadap kemiskinan dan memperjuangkan hak perempuan. Tidak jarang aksi mereka menyedot perhatian khalayak. Aksinya beragam, mereka berjuang membela kemerdekaan kaumnya dan negara tercinta Indonesia.

a. Perjuangan bagi buruh perempuan

Diawali rasa prihatin yang mendalam bagi nasib buruh perempuan tahun 1930-an, organisasi Isteri Sedar menegaskan aspirasinya dalam rapat umum Kongres Perempuan Indonesia. Berikut ini secuil propaganda memerdekakan perempuan perihal lapangan pekerjaan:

- 1) Melebarkan lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan agar tetap teguh menjaga jangan sampai ada jabatan yang tertutup bagi kaum perempuan
- 2) Menambah kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam bekerja
- 3) Mendapatkan aturan-aturan pekerjaan yang baik dan adil bagi kaum perempuan
- 4) Memajukan sarekat sekerja perempuan

Dalam rapat terakhir Kongres Perempuan di Gang Kenari, Ny. Soemadhi pidato blak-blakan:

“Pemerintah negeri harus memberi perlindungan dan penjiagaan secukupnya atas kaum buru perempuan, bahwa ternyata kaum perusahaan hanya untuk menghemat belanja, perusahaan mempergunakan kaum perempuan

buat pekerjaan yang bukan semestinya dilakukan oleh kaum perempuan. Hal semacam ini hendaknya dilarang...”
Jika setiap orang menyadari kaum perempuan Indonesia merupakan “Ibu Bangsa”, maka setiap orang harus berusaha tanpa pandang bulu memperhatikan kaum buruh perempuan yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan. Salah satu cara untuk mengontrol taraf hidup dan kecakapan kaum buruh perempuan ialah kursus bahasa Inggris.

Atas inisiatif tuan Abdullah Kadir, dibuka satu perguruan bahasa Inggris di Lahat yang bertempat di Pasar lama dengan nama “*Institute of English Education*”

b. Aksi-aksi Nasional

Aksi nasional telah dilakukan organisasi perempuan sedari awal abad XX. Antar lain, pendidikan perempuan, memperhatikan nasib anak yatim dan janda, perkawinan anak, reformasi aturan perkawinan dalam agama Islam, pentingnya rasa harga diri di kalangan perempuan, serta memperhatikan buruknya kawin paksa. Juga kampanye menentang perkawinan anak.

Gambar 2. 19 : Barisan Laskar Putri



Sumber : Ruth Indiah Rahayu (Rahayu:189)

Usaha tidak mandeg di situ, pada 1930 di Surabaya digelar kongres. Kongres tersebut membuat wacana baru seperti perdagangan perempuan dan hak suara perempuan, menurut Kowani (1978:38), diusahakan juga kantor penerangan kerja untuk perempuan dan penelitian tentang sanitasi di kampung dan tingginya angka kematian anak.

Periode 1930-an banyak organisasi perempuan menentang paksaan dari para gundik yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Organisasi Putri Budi Sedjati mendirikan asrama kaum perempuan dan gadis yang “ditelantarkan” dengan mengajarkan mereka menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya agar mereka dapat menjadi pembantu rumah tangga yang terampil (*Indisch Vrouwenjaarboek* 1936:12).

Ternyata kongres perempuan membantu seluruh organisasi perempuan dalam upaya dan aksi nasional. Kongres PPI 1932 menguatkan dukungan terhadap ide bahwa perempuan musti ambil bagian bersama kaum lelaki dalam perjuangan nasional. Dalam kongres ini juga digagas perempuan mengemban tugas khusus membantu kaum miskin (PPII, 1932:88). Pada kongres IV tahun 1933, PPII membangun fondasi organisasi berupa nasionalisme, wacana sosial, netralitas masalah agama, dengan aksi mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf (Idrus, 1980). Juga membentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia. Kelompok peneliti diketuai Sujatin Kartowiyono. Proyek penelitian pertama, yakni kaum buruh di Lasem (Kartowiyono, 1983).

Pada masa pendudukan tentara Jepang, salah satu kelompok pemerhati buruh perempuan adalah yang diketuai oleh Ny. Sujatin. Ia bersama kelompoknya pergi ke Lasem untuk menyelidiki kondisi buruh batik yang sebenarnya menjadi buruh tersandera. Kelompok perempuan ini melakukan aksi protes terhadap kondisi kerja para buruh perempuan. Tidak lepas dari itu mereka juga membicarakan masalah nasib para perempuan penghibur serta para gundik kaum lelaki pemilik usaha batik (Rambe, 1983:43-44).

Pada 1935, dilakukan tuntutan hak pilih perempuan pertama dalam sebuah kongres. Pasalnya, pemerintah kolonial membuka peluang perempuan Indonesia tanpa hak suara (Stuers:95). Untuk itu dilakukan kampanye agar perempuan terlibat dalam *Volksraad*. Saat itu perempuan pertama yang mengenyam pendidikan Belanda sebagai pengacara ialah Maria Ulfa, maka hak suara untuk perempuan pun mulai dibuka (Scholten, 2000; Wieringa).

Sebagai organisasi baru, Gerwani terbentuk Maret 1954, banyak menunjukkan aksi nasional seperti yang ditunjukkan organisasi perempuan sebelumnya. Dilamari spirit revolusioner organisasi ini membantu beberapa partai politik yang berbasis massa, dan menolong masyarakat sosial menghapus penindasan. Contoh aksi yang ditempuh: melawan pemberontakan DI-TII tahun 1951, menumpas pemberontakan terhadap RMS tahun 1956 dengan membantu pemerintah pusat dan mengkoordinasikan kader daerahnya, membantu TNI dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta (1957-1958) dengan

menjadi anggota Palang Merah, dan membantu kelancaran organisasi di daerah yang diduduki kekuasaan PRRI-Permesta, khususnya Sumatera dan Sulawesi.

Gambar 2.20:Salah satu aksi revolusioner organisasi perempuan (Gerwani) bersama dengan pemuda lainnya dalam pemberontakan DI/TII



Sumber : [http://: artikel_kolomkitajournalism.org](http://artikel_kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

Selain aksi revolusioner, organisasi perempuan juga mengelat aksi nasional menyangkut kesejahteraan masyarakat sosial. Semisal, perjuangan melawan krisis ekonomi tahun 1958 ditempuh kader Gerwani dengan mengirimkan delegasinya ke pemerintahan menuntut supaya lekas menurunkan harga pada September 1958. Meski pemerintah tidak menurunkan harga (HR 17 September 1958:2), perjuangan melawan krisis ekonomi tahun 1960 yang dilakukan Gerwani, SOBSI, Kowani serta organisasi sosial lainnya direspon Presiden Soekarno. Mereka

berjuang bersama untuk menurunkan harga sampai pada tingkatan yang layak dalam waktu 2 atau 3 tahun (*HR* 30 Januari 1960:2).

Tahun berikutnya, keadaan Indonesia makin memprihatinkan dengan perjuangan merebut Irian Barat tahun 1962. Banyak organisasi perempuan sosial seperti Gerwani dan Perwari mengirim relawan berjuang pembebasan Irian Barat dan peningkatan jumlah anggota (*Wieringa:258*). Kemudian kiprah dalam perjuangan Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964-1965) oleh Gerwani dan SOBSI. Mereka mendukung nasionalisasi perusahaan minyak Inggris Caltex lewat aksi boikot. Barisan pembantu rumah tangga menolak perintah majikan, aksi itu meluas ke restoran dan toko yang menolak melayani orang asing (*Vrouwengroep*).

September di tahun yang sama, mereka melatih sukarelawati dalam ganyang Malaysia. Latihan berupa baris-berbaris dan kemiliteran, termasuk pelajaran pidato presiden berjudul *Tavip*, *Marxisme*, persoalan yang bertemali dengan produksi. Ny. Subandrio memberi pelajaran soal organisasi perempuan kepada kader yang hendak memperkuat barisan progresif revolusioner. Ny. Subandrio bilang, negara diancam komplotan neo-kolonial Malaysia. Dari situ organisasi perempuan berdislipin karena pengalaman pahit kolonialisme dan latihan kaum buruh perempuan tidak akan tertinggal.

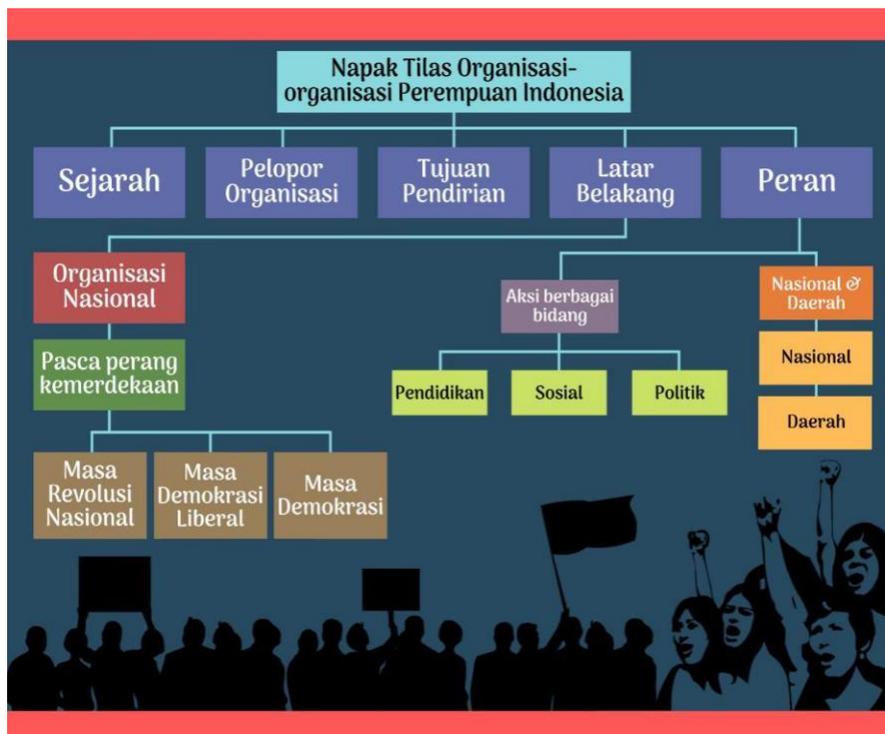
Aksi organisasi perempuan sosial dan kaum perempuan meluas, yaitu menentang AS tahun 1965 di Bandung dengan berbaris di jalan-jalan (*HR* 15 & 29 Januari, 30 September

1965). Organisasi ini jalan bergandengan tangan menuntut pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap imperialisme Amerika (Wieringa:269), tanpa kecuali menentang dan memboikot film AS yang merusak moral tunas muda (Diniah:145).

c. Aksi-aksi sosial di berbagai daerah

Organisasi perempuan kian direken ketika beraksi di level daerah. Kebanyakan aksi daerah dilakoni organisasi perempuan sosial, salah satunya Gerwani seperti aksi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara tahun 1955. Juga kelompok Perempuan Tani berbaris bersama di depan untuk menghalangi traktor yang akan meratakan tanaman kaum tani (Diniah:146). Ada pula aksi kontrol sosial mengajukan protes ke pihak berwenang menghapuskan perjudian dan mengurangi peluang suami untuk berbuat serong ketika sedang bertugas keluar kota oleh Ikatan Wanita Kereta Api (IWKA, 1955) dan Ikatan Istri Kementrian Penerangan (IIKP, 1954). Lalu kegiatan peningkatan mutu keahlian anggota dalam rangka melayani masyarakat, selain mengatasi kesulitan anggota sendiri di bidang sosial ekonomi oleh Ikatan Ahli Kecantikan Wijaya Kusuma (1958) di Jakarta (*PPSW*:122).

Bagan 2.1: Napak Tilas Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia



Mencermati bagan di atas, tergambar perkembangan organisasi perempuan dimulai pada organisasi nasional. Organisasi perempuan meluas usai bermunculan banyak tokoh penggerak pada masa itu, semisal Kartini. Alasan mendirikan organisasi perempuan ialah perjuangan melawan penindasan atas kawin paksa, kurangnya pendidikan, dan akhirnya perjuangan hebat melawan kolonialisme pun harus dilakukan. Organisasi perempuan dituntut pula bisa bermain politik. Lalu, peran organisasi perempuan meliputi beberapa aspek yang pertama lewat program perjuangan dan yang kedua melalui aksi-aksi, baik nasional maupun daerah. Program perjuangan telah dimulai oleh organisasi perempuan sejak organisasi perempuan

terbentuk. Selain itu peran perempuan dibuktikan lewat aksi daerah dan nasional. Aksi daerah seperti menghalang pentraktor di daerah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, aksi di Jengkol membela masyarakat kecil, dan lainnya. Lalu ada aksi nasional semisal perang organisasi perempuan dalam melawan pemberontakan pihak separatisme, aksi dalam pembebasan Irian Barat.

BAB III

LIKA-LIKU PASCA KONGRES

Sedari Kongres Perempuan Indonesia, ada setumpuk problem yang diusung barisan aktivis perempuan. Beberapa soal itu diangkat melalui media cetak, yang merentang periode kolonial hingga Orde Baru. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya organisasi perempuan mereformasi gerakannya dari organisasi menjadi lembaga non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sayatan hati Kartini yang perih atas nasib perempuan Indonesia, dituangkan dalam secarai tulisan. Memang, perjuangan perempuan era kolonial tidak banyak mengubah nasib perempuan Indonesia. Mari simak luapan kemarahan, jeritan hati, juga perubahan status perempuan dan kondisi wanita (dalam hal ini bukan hanya perempuan Jawa dan ningrat):

”...hati perempuan sudah cukup mengeluarkan darah, banyak anak kecil sudah cukup menderita.

...tariklah kami dari kubangan nista, di mana kami dijerumuskan oleh egoisme kaum laki-laki yang tak tahu berperilaku kemanusiaan itu...

Sebutan ” kaum laki-laki yang tak tahu berperilaku kemanusiaan itu...” (merujuk pada kejahatan pemerintah kolonial dan budaya feodal yang juga dipraktikkan raja-raja serta bupati lokal)

...saya telah mendengar dan melihat banyak bahkan mungkin terlalu banyak, yang meremas-remas hatiku, yang memecutkan untuk memberontak terhadap kebiasaan-kebiasaan kolot yang karatan, yang menjadi kutukan bagi kaum perempuan...

Saya sayang kepada perempuan. Saya menaruh perhatian besar kepada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat dalam banyak negeri dalam abad terang ini. Saya bela dengan senanga dan setia. (Surat kartini kepada Ny. Abendon Agustus 1900: 1992, 9-10)

Kendati belum mengenal nama Indonesia, namun Kartini telah memakai kata Hindia untuk Indonesia. Visinya tentang negara Hindia Belanda yang merdeka membuatnya pantas mendapat gelar nasionalis. Bahwa nasionalisme dalam sudut pandang feminis Virginia Woolfs kata "negara" hanya untuk kaum lelaki dan perempuan dapat memperoleh penghargaan bukan karena perjuangannya terhadap pembelaan hak-hak perempuan, namun semat telah membela negara. (JP: 1998)

Lebih dari itu, Kartini hadir dengan gagasan dan praktik pembebasan bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga masyarakat terjajah, kemiskinan dan adat istiadat yang merugikan. Hal itu diaktualisasikannya dengan memberikan bantuan pada seorang perajin perak dan kayu, dengan menjadi mediator yang memberikan pesanan kerajinan perak dan dibeli oleh kawan-kawannya di Belanda (Sutrisno:1899).

Saat Penetapan Keppres di atas, surat Kartini tidak terungkap seluruhnya pada publik, terutama surat tentang gagasan menentang penindasan terhadap perempuan. Walaupun sudah diterbitkan setengah dari jumlah surat Kartini, namun itu telah disensor Abendanon, bahwa kepatutan isi surat untuk diterbitkan menjadi pertimbangan. Karena pada tahun penerbitan tersebut 1921, tahun itu merujuk pada penyatuan antara kolonialisme dan feodalisme yang menyelimuti budaya nusantara dan kian

menonjolkan diskriminasi perempuan di berbagai segi kehidupan yang dibabar pada subbab ini (nasib perempuan Indonesia era kolonial).

Kemudian, dari pasca kemerdekaan hingga tahun 1964, pemikiran Kartini belum jua populer. Pemikiran sarat muatan penentangan atas penindasan kaum perempuan, pemikiran membawa suara pembebasan atas nama hak asasi manusia yang setara. Semua mengindikasikan bahwa pada zaman yang berbeda, era kolonial, pendudukan Jepang, Orde Lama (tahun 1964 saat Keppres propoligami dikeluarkan), dan masa Orde Baru pemikiran dan gagasan Kartini masih merupakan suatu momok bila diimplementasikan (Soeroto, 1984:65).

Bab ini juga menguraikan sub topik mengenai kebijakan pemerintah orde lama yang menanggapi poligami dengan Keppres yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dicita-citakan Kartini karena ia juga mengalami hal yang sama dan harus terulang kembali di masa kemerdekaan Indonesia. Masa tersiksa Kartini yang digambarkan dalam suratnya bertahun kemudian, tentang ketidaksiapannya ketika mengetahui ayahnya juga berpoligami. Poligami adalah hal dalam perkawinan yang membuatnya terlintas pikiran untuk bunuh diri (Soeroto, 1984:355).

Ternyata poligami harus dijalankannya karena terjebak dalam dua pilihan, ayahnya yang dicintainya atau meneruskan cita-citanya memperjuangkan hak perempuan yang juga menolak poligami. Akhirnya Kartini memilih ayahnya yang dicintainya, tetapi tetap memperjuangkan hak perempuan dalam hal ini pendidikan dengan harus membayar dan ikut pada apa yang

ditentangnya (poligami). (Umi Lasmina: 1998) Ia menyebutkan antara lain dalam suratnya kepada Ny. Ovink Soer:

”Jika tujuan yang saya kejar, dengan jalan ini akan lebih cepat dan lebih pasti dapat saya capai, apa salahnya untuk menempuh jalan itu”(Surat Kartini (terjemahan): 1992).

Orde Baru juga mengeluarkan UU Perkawinan 1974 bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan lelaki pencari nafkah. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan Kartini dipandang sebagai ide yang akan menghancurkan tatanan yang dibuat untuk menguntungkan suatu kepentingan pihak atas nama budaya, agama, bahkan ideologi bangsa.

Sebagai teladan kebangkitan dan kesadaran perempuan serta pahlawan penggerak Kongres Perempuan Indonesia, Kartini mungkin tidak menyadari apa yang ditulisnya merupakan refleksi beberapa kasus yang dihadapi perempuan Indonesia pasca Kongres Perempuan Indonesia (diuraikan dalam bab ini). Sepanjang masa, Kartini mungkin sedih bila tahu perempuan yang dapat membaca huruf latin dan menulis tidak pernah tahu akan jati dirinya dan perjuangan emansipasi perempuan Indonesia.

Menurut Umi Lasmina (1998) yang mengutip data Biro Pusat Statistik (1996:110) bahwa ada sekitar 85.105 perempuan Indonesia (45,24%) dari lulusan perguruan tinggi tahun 1998 (pasca Orde Baru), belum menemukan martabatnya sebagai manusia. Ribuan buku Kartini dengan berbagai macam bahasa belum mampu menggapai perempuan Indonesia terutama mereka yang berkesempatan bersekolah. Palsunya, pemikirannya tidak masuk dalam kurikulum pendidikan, yang diajarkan ialah kisah Kartini

yang mendirikan sekolah dibantu suaminya dan meninggal dalam usia muda beberapa saat setelah melahirkan.

3.1 Nasib Perempuan Indonesia pada Masa Kolonial

Goncangan ekonomi melanda perempuan Indonesia ketika ditinggal suaminya di medan pertempuran. Tidak hanya ekonomi saja yang jatuh, tetapi kehormatan pun melorot. Hal ini dialami janda kelas menengah ke bawah (Pemandangan: 1935).

Corak kehidupan seperti ini dipraktikkan pemerintah kolonial yang feodalis dan kapitalistik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Engels seorang sosialis revolusioner yang juga penulis dan aktivis. Dalam pustaka berjudul *The Origin of Family, State and Private Property* (1884), ia menyoroti industri modern memberikan kesempatan kepada perempuan berpartisipasi dalam produksi sosial kembali. Tapi, di satu sisi dia tetap diperbudak dalam keluarga (Pemandangan: 1935):

“Namun, dengan cara sedemikian rupa sehingga jika perempuan melaksanakan tugas-tugasnya dalam keluarga, dia menjadi terasingkan dari produksi dan tak bisa mendapatkan upahnya; dan jika ia ingin terlibat dalam industri dan mendapatkan upahnya secara mandiri, dia tak bisa memenuhi tugas-tugasnya dalam keluarga. Apa yang berlaku buat perempuan dalam pabrik juga berlaku terhadap perempuan di semua cabang usaha, sampai dengan pengobatan dan hukum. Keluarga modern didasarkan pada perbudakan domestic yang tersembunyi maupun terbuka terhadap kaum perempuan.”

Zaman ini istri memikul beban suaminya pasca ditinggal karena pertempuran dianggap hina, sebab pekerjaan yang dilakukannya ialah pekerjaan lelaki. Hal tersebut ditambah dengan perbedaan pendapatan yang harus diterima janda perempuan yang amat berbeda dengan suaminya dulu. Acap perempuan tidak kuat iman dan wawasannya menjual kehormatan diri karena upahnya sebagai buruh minim. Perusahaan tidak adil karena perbedaan upah dimana buruh mendapat pekerjaan berat dengan upah yang murah. Tersurat koran *Pemandangan* edisi Kamis, 25 Juli tahun 1935 bahwa di *gemeente* Tegal dan Cirebon kaum perempuan bekerja dari pukul 05.00-18.00.

Bahkan sering karena alasan mereka dengan menjual anaknya daripada hidup menderita. Di beberapa kota dan pedesaan Jawa, anak perempuan menjajakan makanan dan minuman. Rata-rata berusia 10-14 tahun dan sehari pun hanya mendapat tidak lebih dari 50 sen saja. Ini dikerjakan Ibu sebagai kaum perempuan yang tidak bisa menempuh pendidikan dan budi lantaran mencukupi kebutuhan yang mendesak.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan rumitnya ekonomi masa ini dengan banyaknya perusahaan dan perkebunan yang gulung tikar. Tidak sedikit pihak menanggung rugi dari kemerosotan itu, bahkan jumlah penganggur membengkak khususnya perempuan.

Keadaan ekonomi yang sulit membuat janda yang memiliki anak menjadi tidak fokus dalam mendidik anaknya. Masa ini setiap keluarga paling tidak memiliki anak antara 5-10, jarang sekali ditemukan keluarga yang memiliki anak secukupnya. Salah satu dampak yang amat terasa ialah perjodohan anak perempuan dan

laki-laki yang tidak memandang kemanusiaan. Hal semacam ini berakibat tidak pantas di kemudian hari yaitu perlakuan yang semena-mena yang dialami perempuan dan anak dalam keluarga.

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga banyak yang tak terdeteksi. Susutnya lapangan pekerjaan era Reformasi membuahkan kegiatan prostitusi subur, bahkan muncul perdagangan anak perempuan. Menurut survei Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) ratusan anak perempuan di bawah umur di Medan, Riau, dan Batam diculik dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Guna menanggapi ketidakadilan, digelar konferensi internasional yang sohor dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen di bidang hak asasi manusia yang khusus mengatur hak anak. Konvensi berisi 54 pasal diajukan dan disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku 2 September 1990 (Gautama, 2000).

Indonesia menyetujui isi dari Konvensi Hak Anak, seperti tersurat dalam Pasal 34:

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah: (a) bujukan atau paksaan agar anak terlibat, dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah; (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lain yang tidak sah; dan (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan

perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis” (Gautama, 2000:98-99).

Di soal lain, organisasi Isteri Sedar dan Pertuan Isteri menentang poligami. Mereka beropini, percuma punya golongan terpelajar namun tidak berperasaan untuk bangsanya (*Pemandangan*, Jumat 26 Juli 1935). Isteri Sedar dan Pertuan Isteri dianggap sebagai penentang ajaran.

Gambar 3.1: Ny. Suwarni Pringgodigdo (Penentang Polgami), Sumber Koran *Pemandangan* 1935



Ny. Suwarni menentang keras perkataan Ratna Sari diantaranya:

“Tiga tahun yang lalu, maka ramailah soal Poligami diperbincangkan di Indonesia sehingga menyebabkan rakyat bercerai-berai. Terhadap penghinaan Islam ini dan kaum-kaum yang memberi cap memonopoli poligami, terhadap mereka inilah saya ingin memberi nasehat supaya mempelajari Islam, supaya menentang poligami dan jangan mengadakan pertentangan di antara rakyat Indonesia”. (*Pemandangan*, Jumat 26 Juli 1935)

3.2 Penonaktifan Organisasi Perempuan dan Perlawanan Praktik *Jugun Ianfu*

Semasa pendudukan Jepang, organisasi perempuan mengalami depresi yang berat. Semua organisasi perempuan harus dibubarkan dan hanya boleh ada Fujinkai di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Organisasi perempuan seakan mati. Kendati demikian, ada celah mengadakan Peringatan Hari Kartini 1942. Didukung ormas pemuda Mataram yang dipimpin Istri Indonesia, meski semula sulit mengantongi izin dan peraturan ketat. Harus dijaga tentara Dai Nippon dengan bayonet terhunus, tempatnya di Gedung CHTH (KONI).

Seperti diuraikan di bab sebelumnya bahwa komimen KPI mengalami pasang surut bahkan meredup ketika datangnya Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang mengutamakan sistem patriarkh di Nusantara dan sejalan dengan budaya Timur dimana menjadi budaya yang dominan. Budaya menstigmakan perempuan sebagai manusia kelas dua. Pola pikir ini menghambat organisasi perempuan Indonesia yang lama lahir. Berbagai sistem dibentuk Jepang seperti menciptakan kurikulum wajib militer di pendidikan dasar. Banyak ormas agama yang terbentuk kala itu, sehingga domestifikasi dan pengekangan pergerakan perempuan terjadi secara spontan dan massif. Hal tersebut merupakan satu tujuan Dai Nippon sebagai “saudara tua” bagi rakyat Indonesia.

Selain itu praktik kekerasan terhadap perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat tidak menjunjung kemanusiaan yaitu dengan perempuan-perempuan *Jugun Ianfu*. Pada pertengahan Juli 1942, mantan *Jugun Ianfu* di Cina dan

Korea melakukan protes dan minta ganti rugi kepada pemerintah Jepang (Bernas. 17 Nov, 1997:8). Endang Kusuma Inten Soeweno yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa perempuan Indonesia yang merasa pernah menjadi *Jugun Ianfu* harus dicari dan dicatat (Tahiro, 2003:111). Menanggapi pernyataan itu, Endang Kusuma Inten Soeweno bersama Lembaga Badan Hukum Yogyakarta mulai melakukan penelitian dan membuka pelaporan dari mantan *Jugun Ianfu*. Bantuan juga datang dari anggota Federasi Pengahara Jepang untuk membantu mantan *Jugun Ianfu* menuntut kompensasi dari pemerintah Jepang (Bernas. 17 Nov, 1997)

Sejak awal pembukaan ruang pengaduan sepanjang bulan April hingga September 1993, Lembaga Badan Hukum Yogyakarta dibanjiri dengan pengaduan belasan ribu mantan romusha dan ratusan mantan *Jugun Ianfu* (Budi Hartono, Dadang Juliantoro, 1997: 179). Tercatat 1.156 mantan *Jugun Ianfu* dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang melapor kepada LBH Yogyakarta (Tahiro, 2003:112). Tidak semua mantan *Jugun Ianfu* mau mengakui dan melaporkan dirinya, mereka lebih baik diam dan menutup aib masa lalunya. Selain itu mantan *Jugun Ianfu* sudah banyak yang meninggal dunia.

Mardiyem merupakan mantan *Jugun Ianfu* yang menjadi koordinator mantan *Jugun Ianfu* terus menuntut keadilan. Dibantu LBH Yogyakarta, Mardiyem memperjuangkan hak-hak mantan *Jugun Ianfu*. Tuntutan yang terus disuarakan Mardiyem *pertama*, adanya permintaan maaf dari pemerintah Jepang secara kenegaraan kepada individu-individu mantan *Jugun Ianfu*. *Kedua*, pemerintah

Jepang harus memasukan sejarah mereka, sehingga isu *Jugun Ianfu* harus masuk dalam sejarah Jepang dan yang *ketiga*, adanya kompensasi (KR, 22 Des 2007:1).

Dukungan diberikan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam suratnya kepada Mardiyem. Depdiknas berjanji memasukkan isu *Jugun Ianfu* ke dalam buku pelajaran Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Mardiyem berkali ulang dijadikan narasumber berbagai lembaga formal untuk riset tentang *Jugun Ianfu* (KR. 22 Desember 2207,1). Masyarakat Indonesia sebenarnya mulai memahami *Jugun Ianfu* bukanlah perempuan yang sengaja menjual diri, namun korban kebiadaban Jepang masa Perang Dunia II.

Dukungan penuh juga disuarakan menteri Inten Suweno yang memakai dana santunan dari Jepang membangun panti jompo. *The Asian Women's Found* (AWF) ialah lembaga yang ditunjuk pemerintah Jepang untuk menyalurkan dana ke mantan *Jugun Ianfu*. Sayangnya, dana ini tidak bisa diberikan langsung ke mereka. Pemerintah Indonesia menerima uluran dana dari AWF secara bertahap. Pertama dana diterima senilai 770 juta rupiah untuk pembuatan panti asuhan (*Republika*, Agustus 1997:7). Mestinya, dana ini diberikan langsung ke mereka sebagai dana kompensasi dari Jepang. Pembangunan panti jompo juga akan sia-sia, sebab banyak mantan *Jugun Ianfu* menolak pindah dan tinggal di panti jompo.

3.3 Tantangan Perempuan Mewujudkan Cita-Cita Awal Kemerdekaan

Di awal kemerdekaan, organisasi perempuan mulai mencoba untuk memperjuangkan hak sebagai perempuan dan warga negara. Hal itu dibahas dalam Kongres KOWANI tahun 1952 di Bandung yang dihadiri oleh 63 organisasi, yang membahas berbagai masalah di bidang hukum, pendidikan, dan sosial ekonomi (Vreede-De Stuers, 2008:181). Dalam kongres ini setiap permasalahan yang dibahas diberikan solusi program ganda, program pertama memperhatikan masalah yang membutuhkan penanganan cepat, sementara program kedua mengusulkan tindakan secara umum sebagai berikut:

1. Hukum
 - a. Program cepat: mendorong kaum perempuan menunaikan tugasnya untuk memilih pada pemilihan umum, dan selanjutnya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perkawinan.
 - b. Program umum: menjalin hubungan dengan beberapa kementerian untuk mendapatkan persentase tempat yang lebih besar bagi perempuan sebagai pegawai.
2. Pendidikan
 - a. Program cepat: meningkatkan usaha memerangi buta huruf di kalangan perempuan.
 - b. Program umum: mengusulkan kepada cabang-cabang perkumpulan untuk mengorganisir kursus-kursus pendidikan moral, mendirikan kursus kejuruan, dan memberikan informasi serta bimbingan kejuruan.

3. Sosial Ekonomi

- a. Program cepat: meneliti besaran gaji yang diterima perempuan pegawai negeri sipil dan buruh, mengorganisir pengasuhan anak bagi perempuan yang sibuk bekerja, dan mendirikan kantor konsultasi yang berhubungan dengan masalah buruh, kesehatan, pendidikan, dan perkawinan.
- b. Program umum: mengorganisir darmawisata untuk mempererat ikatan yang mempersatukan kaum perempuan, dan mempertimbangkan kemungkinan pengesahan peraturan dana pensiun dan gaji kepada pegawai sipil dan karyawan (Vreede-De Stuers, 2008:182, 183).

Dapat disimpulkan bahwa dalam kongres KOWANI, para organisasi perempuan membahas cita-cita mereka yang menyangkut tentang hak-hak bagi perempuan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta perkawinan. Demi mewujudkan hal tersebut, KOWANI mengirimkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Menerima perempuan untuk bekerja di kantor yang mengurus pemilihan umum.
2. Mengambil tindakan segera untuk membuat undang-undang perkawinan.
3. Menunjuk perempuan untuk pengadilan agama.
4. Memberikan instruksi yang tepat untuk pegawai sipil yang dituntut dalam pengadilan berkaitan dengan masalah perkawinan.

5. Mendirikan komite perempuan untuk menciptakan cara mencapai kemandirian secara ekonomi bagi perempuan yang selaras dengan kepribadian perempuan.
6. Menambah jumlah anggota perempuan dalam dewan penasihat untuk pencalonan Kementerian Perburuhan.
7. Lebih aktif menekan majalah, poster, dan iklan yang berisi pornografi karena tidak sesuai dengan moral (Vreede-De Stuers, 2008:183).

Ketika komisi saat itu masih berunding merancang UU perkawinan, yang menjadi salah satu pembahasan penting bagi KOWANI, keluar Peraturan Nomor 19 tahun 1952 yang mengatur pensiun janda pegawai negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1952 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda dan Tunjangan kepada Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal poligami maka uang pensiun sebesar dua kali lipat yang akan dibagi sama di antara para janda bersangkutan (dengan tidak lebih dari empat istri). Untuk menutup anggarannya maka para pegawai membayar premi pensiun, mereka yang berpoligami membayar premi tambahan. Cara ini merupakan sanksi bagi poligami yang harus dibayar. Peraturan ini memicu konflik didalam KOWANI, bagi kalangan Masyumi, Muslimat NU dan dua organisasi perempuan Islam menyetujui peraturan tersebut sedangkan 19 organisasi perempuan termasuk Perwari menentang peraturan tersebut karena dinilai sebagai sebuah bentuk “pemborosan uang negara untuk mengongkosi poligami” atau mendorong meningkatnya

poligami (Suwondo 1981a: 82-83; Wieringa, 2010:185). Tentu artinya jika peraturan tersebut dilanggengkan dan poligami akhirnya meningkat, maka itu mencederai cita-cita KOWANI yang ingin adanya reformasi UU Perkawinan.

Para organisasi perempuan melakukan demonstrasi aksi protes terhadap peraturan pada tanggal 17 Desember 1953. Tetapi aksi protes tersebut tidak diikuti oleh organisasi perempuan Islam dan sebagian organisasi KOWANI. Para perempuan yang melakukan aksi diterima presiden ketika itu. Mereka menyampaikan tuntutan agar Peraturan Nomor 19 tahun 1952 dicabut serta dibuat undang-undang perkawinan yang sesuai dengan konstitusi dan Pancasila (Kartowiyono, 1981). Namun tidak ada perubahan sekalipun DPR pada Februari 1954 telah membicarakan hal tersebut, Peraturan Nomor 19 tahun 1952 tetap berlaku (Suwondo 1981a, 1981b). Perkawinan presiden yang terjadi pada tahun 1954 menjadi pukulan mengejutkan bagi gerakan perempuan, artinya memang pemerintah tidak responsif dengan tuntutan yang telah diajukan oleh perempuan dalam aksi protes mereka. Perjuangan mereka untuk perubahan undang-undang perkawinan gagal dan KOWANI mulai terpecah. Perwari mulai dikecam karena keberaniannya, protes Perwari terhadap perkawinan presiden dibalaskan dengan Suyatin Kartowiyono yang merupakan ketua Perwari, banyak menerima ancaman pembunuhan gelap (Kartowiyono, 1977). Sedangkan organisasi perempuan Islam menerima baik perkawinan presiden sama halnya dengan menerima

Peraturan Nomor 19 tahun 1952 (Wieringa, 2010:185, 186, 189).

Upaya lain yang dilakukan gerakan perempuan dalam mewujudkan cita-citanya adalah mendirikan biro konsultasi bekerja sama dengan pemerintah. Komisi Perkawinan menyusun rancangan UU perkawinan yang dikirimkan kepada Menteri Agama pada April 1954. Namun rancangan ini tidak diteruskan ke DPR dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi front perempuan (Wieringa, 2010:190).

Upaya lain yang ditempuh adalah memperjuangkan cita-cita organisasi perempuan, terkhusus reformasi perkawinan, dengan masuk gelanggang politik. Namun pemilu yang diadakan pada tahun 1955 juga mengecewakan organisasi perempuan karena Partai Wanita Indonesia gagal memperoleh kursi. Partai ini didirikan oleh Nyi Mangunsarkoro pada tahun 1946 yang menyuarakan monogami (Vreede-de Stuers, 1960). Sedangkan para partai pemenang pemilu tidak ada yang secara khusus mengkampanyekan reformasi perkawinan (Wieringa, 2010: 163), yang merupakan cita-cita organisasi perempuan. Tidak hanya itu, organisasi perempuan juga mengalami pengurangan di bidang politik dan dialihkan menjadi organisasi sosial non-politik. Namun hanya satu organisasi perempuan yang secara terang-terangan menyatakan bahwa dunia politik juga lazim bagi perempuan dan memiliki keterampilan dalam melakukan manuver ke dalam wilayah

politik yang dimilikinya. Organisasi perempuan tersebut bernama Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Gerwani berupaya menjembatani celah antar antara “politik laki-laki” dengan “kebutuhan sosial perempuan”.

Pada bulan Maret 1958, Ny. Sumari yang merupakan anggota Front Perempuan dari PNI memiliki ide cemerlang untuk mewujudkan cita-cita KOWANI. Ide cemerlangnya itu adalah menyatakan monogami bagi semua orang Indonesia dengan hak setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mengajukan cerai. Maneuver ini berhasil dan pada bulan Februari 1959 kedua rancangan dibicarakan di DPR (Suwondo 1981a, 1981b; Ulfah Subadio 1981). Namun maneuver ini mengalami nasib karena tidak ada persetujuan yang dicapai di DPR (Wieringa, 2010:190).

Perjuangan cita-cita untuk mewujudkan reformasi perkawinan berlanjut ke masa Demokrasi Terpimpin namun pengaruh hegemoni presiden mengikat kuat gerakan perempuan. Gerakan perempuan diperlemah dan dipecah. Kongres KOWANI terhalang oleh aturan konsensus. Perpecahan terjadi di dalam KOWANI, baik kelompok Islam dengan non-Islam, baik kelompok “progresif” seperti Gerwani dengan kelompok yang melakukan perlawanan seperti Perwari. Perpecahan tersebut meningkat pengaruh kiri yang berpusat pada aliansi antara presiden dengan organisasi kiri (Wieringa, 2010:191-192). Maka dari itu, Gerwani menjadi organisasi perempuan paling dekat dengan Presiden dan berpengaruh cukup besar bagi KOWANI. Organisasi-

organisasi perempuan lain harus menyelipkan program-program pemerintah dalam setiap kegiatan mereka. Pengaruh Gerwani juga terlihat pada kongres KOWANI 1961. Presiden menasihati KOWANI agar harus bekerja sama dalam upaya membangun masyarakat adil dan makmur (Suwondo 1891a:198; Wieringa 2010: 200 201).

KOWANI bergerak ke kiri mengikuti perkembangan politik ketika itu. Muslimat yang merupakan cabang perempuan partai Masyum yang dilarang, dikeluarkan dari KOWANI. KOWANI pun mendukung dengan kuat perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada 1962, mereka bergabung ke dalam Front Nasional, ikut dalam semua kegiatannya, dari demonstrasi massa sampai latihan relawan menghadapi Malaysia (Panitia, 1978; Suwondo 1981a). KOWANI semakin aktif, memperkuat hubungannya dengan kelompok Gabungan Organisasi Wanita (GOW) lokal, memberikan kursus, mendirikan koperasi, mendirikan pusat konsultasi membantu pelacur serta mengembangkan kegiatan advokasi (Suwondo, 1981a; Wieringa, 2010: 202). Ini membuktikan prioritas KOWANI dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan sebelumnya tergantikan dengan persoalan politik nasional ketika itu.

Kongres KOWANI 1961 yang masih menuntut adanya undang-undang perkawinan namun pada kongres KOWANI 1964 terfokuskan pada persoalan lain, seperti *land reform* dan kondisi buruh (Suwondo 1981a). Kongres menerima kembali nama singkatan Kowani dan melanjutkan

hubungan kuat dengan presiden, mengorganisasi seminar untuk memperdebatkan pidato Soekarno pada Hari Kemerdekaan 1964, Tahun Vivere Pericoloso (Tavip), ia menyerukan agar kaum perempuan memberikan kepemimpinan mereka dalam perjuangan bagi kebutuhan dasar dan terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia (Panitia 1978). Suasana begitu dipolitisasi hingga sebagian besar tuntutan Hari Ibu 1964 ialah mengganyang Malaysia dan tujuh setan desa, serta berjuang bagi persatuan Nasakom (AK November/Desember 1964) (Wieringa, 2010:202).

Ketegangan antar organisasi perempuan tidak dapat dielakkan. Perwari mengalami tekanan berat karena menyebabkan kemurkaan besar presiden dan nyaris dibubarkan pada 1964. Hubungan antara Perwari dan Gerwani kian memburuk. Wanita Katolik merasakan ketegangan yang sama karena penampilan serta dominasi Gerwani. Wanita Katolik yang ingin aktif di bidang sosial tidak berjalan mulus karena terperangkap dalam pusaran revolusioner yang melanda Indonesia pada permulaan 1960-an. Aisyiah juga mengalami periode kesulitan dan dengan sadar menarik diri dari Kowani.

Namun ada juga yang masih memperjuangkan cita-cita perjuangan perempuan di tengah-tengah hebatnya pergeseran isu perjuangan perempuan ke perjuangan nasional. Bhayangkari tetap memelihara satu aspek agenda feminis: perlawanan terhadap poligami di kalangan kepolisian. Pada 1963 mereka mengusulkan agar Bhayangkari dilibatkan

dalam persoalan perkawinan dan perceraian anggota kepolisian (Idem:77). Namun pengaruh pergeseran perjuangan tidak dapat dihindarkan. Pada tahun yang sama semua itu dihapus (Wieringa, 2010:206).

3.4 Domestifikasi Perempuan Masa Orde Baru

Organisasi perempuan Indonesia pada masa rezim otoriter Orde Baru muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender Orde Baru dan proses domestikasi yang semakin menguat sejak akhir tahun 1980-an. Tekanan politik rezim Orde Baru mengarahkan perempuan Indonesia untuk berperan sebagai ibu dan istri, sehingga melemahkan organisasi perempuan Indonesia dan menghalangi munculnya sebuah organisasi perempuan baru. Akibatnya perubahan-perubahan dalam ekonomi dan dinamika politik yang mendorong proses demokratisasi memunculkan organisasi-organisasi perempuan independen dan otonom yang merupakan basis dari organisasi perempuan Indonesia (Muchtar: 1993).

Faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif organisasi perempuan masa rezim Orde Baru. Wacana-wacana mengenai hal yang sama tidak hanya menentukan jenis-jenis isu yang diperjuangkan, tetapi juga ketika organisasi perempuan berhubungan dengan negara dan proses demokratisasi, serta pendefinisian ruang politik bagi organisasi perempuan sendiri.

Wacana yang diisukan mendukung organisasi perempuan yang diposisikan dan dibatasi dalam kebijakan rezim Orde Baru. Pertama ialah dominasi negara atas masyarakat sipil, struktur kelas, pembelaan atas dasar etnis dan agama, serta struktur ekonomi dan politik global, yang terpenting ialah hubungan gender sangat penting untuk menganalisis rezim Orde Baru yang berkuasa sejak peristiwa 1965 (Uhlen: 1995).

Faktor kedua yang memperkuat wacana organisasi perempuan dalam orientasi Orde Baru ialah Orde Baru dibangun di atas pondasi kemampuannya untuk memulihkan keteraturan. Pembunuhan secara besar-besaran berskala luas yang muncul digunakan untuk memperkuat kesan masyarakat Indonesia bahwa Orde Lama adalah kacau balau. Buahnya, muncul anti komunis dan organisasi sosial yang memengaruhi perkembangan organisasi perempuan Indonesia (Heryanto:1996).

Faktor ketiga, keberhasilan anti PKI dan komunis sebagian besar disebabkan oleh karena masuknya aspek gender dalam propaganda tersebut. Kedekatan organisasi perempuan dengan ideologi komunis pada Orde Lama menjadi wacana bahwa komunisme telah menuntun perempuan untuk bertindak di luar kodratnya. Sebab itu, masyarakat sosial pendukungnya harus dihancurkan, perempuan harus dikembalikan ke rumah kembali sehingga masyarakat diselamatkan (Heryanto:1996). Kepercayaan semacam ini yang menjadi batu pijakan rezim dengan memanfaatkan politik gender yang dikembangkan sepanjang Orde Baru.

Peran politik organisasi perempuan terhambat karena konstruksi sosial yang menjadi alat kekuasaan rezim Orde Baru. Hak perempuan tidak lebih dari lingkup domestik, berbeda dengan kaum lelaki yang kewenangan dalam wilayah publik. Karena kekuatan dan otoritas rezim Orde Baru yang berasumsi pada kekuatan tradisi dan budaya, pembagian peran semacam itu tidak dapat langsung dikonversi. Perempuan yang secara otomatis berpengaruh pada perkembangan organisasi perempuan yang hendak berkiprah di ranah politik dan publik, dianggap memiliki beban ganda. Sebab, di samping melakukan aktivitas di ranah publik, mereka harus tetap memenuhi atau menyelesaikan tugas di ranah domestik. Pembagian wilayah peran laki-laki dan perempuan oleh rezim Orde Baru kemudian dilanggengkan, bahkan melembaga melalui institusi formal sampai nonformal, seperti sekolah maupun institusi pemerintah.

Peran domestik bagi perempuan dan organisasinya, secara faktual telah menyebabkan mereka menjadi makhluk yang lemah dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, mereka dianggap hanya memiliki kemampuan yang berkaitan dengan urusan yang bersifat domestik, tidak mampu dan tidak dipercayai masyarakat untuk mengurus masalah publik. Mereka juga tidak dipercaya untuk menempati posisi sebagai pengambil kebijakan. Ketidakpercayaan masyarakat tentu saja sangat berpengaruh pada sikap pemerintah dalam memilih kepada kandidat perempuan pada Orde Baru. Alasan tidak menominasikan perempuan karena kecenderungan sikap masyarakat yang belum memberi kepercayaan kepada

perempuan. Karena pola pikir seperti ini, peluang organisasi perempuan dan anggotanya untuk dipilih dalam pemilu menjadi kecil. Dengan kata lain, rezim memandang tidak signifikan menominasikan kandidat perempuan karena dipandang tidak menaikkan perolehan suara partai dalam pemilu.

Sebenarnya organisasi perempuan menilai segi positif politik untuk perkembangannya yaitu tidak terpengaruh oleh kepentingan atau situasi individual (*a veil of ignoeance*), mereka juga melihat prinsip kebebasan yang paling besar dan sama bagi semua orang dalam politik yang terbuka dan sehat (Majalah Filsafat dan Teologi Edisi April 1997:43). Organisasi perempuan yang bertahan pada rezim Orde Baru berusaha memakai alternatif baru, misalnya dengan beraksi dalam wilayah domestik untuk perempuan lokal daerah, tetapi juga melihat persoalan penindasan kaum perempuan (tergabung dalam anggota LSM perempuan). Kelompok perempuan dalam LSM menuntut hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun legal, meski harus dengan berbagai tantangan.

Organisasi perempuan menganggap pembangunan ekonomi yang ditetapkan rezim Orde Baru membuat fungsi perempuan menjadi lemah, karena secara otomatis di dalam keluarga yang menghasilkan uang adalah laki-laki. Meskipun kerja-kerja perempuan di ranah domestik sesungguhnya tidak kalah berat, tetapi tidak dianggap sebagai lapangan kerja pada umumnya, bahkan itu merupakan sebagai suatu kewajiban. Seiring dengan pandangan dan sikap masyarakat yang

cenderung materialistik, kerja perempuan di wilayah domestik, seperti menangani urusan rumah tangga dan anak-anak, dipandang sebagai pekerjaan domestik, karena tidak menghasilkan materi atau uang artinya tidak dihargai sebagai pekerja. Perempuan dalam konteks melakukan kerja oleh rezim dalam ranah domestik dipandang sebagai “pekerja yang tak terlihat” (*invisible workers*). Padahal pandangan organisasi perempuan dalam demokrasi liberal, faktor sosial dan ekonomi adalah faktor penting dalam meraih dukungan. Mereka tidak akan terpilih jika kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin, menjadi wakil, atau pengurus masalah publik masih sangat rendah. Faktor ekonomi dalam berpolitik menjadi faktor penting, karena proses kompetisi atau pencalonan memerlukan biaya operasional yang tinggi.

Di samping itu, hal yang sangat penting bagi organisasi perempuan dalam menjalani aktivitas politik adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat dasar untuk mendorong perempuan dapat berbicara dalam mengungkapkan gagasan, keinginan, dan tuntutan. Tanpa wawasan yang luas, tentu sangat sulit bagi mereka untuk mengemukakan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan-kebutuhannya.

Selain itu, terdapat kendala yang menimpa anggota-anggota pegawai perempuan atau istri pegawai dan polri untuk memasuki arena politik pada era Orde Baru. Sebagian besar perempuan pada era itu berpandangan bahwa dalam politik sering terjadi konflik kepentingan. Sementara konflik kepentingan dalam politik sudah terlanjur dipandang sebagai

wilayah lelaki. Hal ini membuat mereka semakin enggan karena wilayah politik ialah wilayah yang tidak semestinya bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Konflik kepentingan organisasi perempuan bisa saja muncul ketika ingin memilih jalan politik, karena rezim saat itu memandang bahwa ada konflik kepentingan bisa antar organisasi atau antar kekuatan politik yang dimiliki rezim, sehingga melahirkan tindakan yang cenderung menghalalkan segala macam cara. Dengan demikian ada berbagai cara dilakukan rezim untuk menekan perkembangan organisasi perempuan, cara ini menjadi tekanan politik bagi organisasi perempuan dalam mempertahankan eksistensinya dalam sejarah organisasi perempuan dan mempengaruhi kepercayaan diri perempuan Indonesia.

Bagan 3.1: Infografis Domestifikasi Perempuan Pada masa Orde Baru dan Pengaruhnya Bagi Organisasi Perempuan



Bagan 3.1, menggambarkan suatu analisa tentang wacana peran perempuan orde baru yang melemahkan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pertama, adanya norma Orde Baru membuat organisasi perempuan merombak diri, dan tetap mempertahankan organisasi itu, meski aksi-aksi nasional tidak lagi mereka jalankan, tetapi mereka wajib melaksanakan Panca Dharma

Wanita. Untuk melakukan suatu aksi, organisasi perempuan harus berhati-hati dan memilih jalan aman untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan kelas menengah ke bawah.

Subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap pria. Seperti halnya perbedaan domestik dan publik. Bidang publik dalam pembagian struktural dianggap sebagai bidang yang lebih penting di dalam keseluruhan proses sosial, maka perempuan cenderung tersubordiansi karena ia menempati bidang yang kurang penting. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi, karena pekerjaan rumah tangga harus dilakukan suami maupun istri (*Prisma* Edisi 6 Juni 1995:45), stratifikasi dalam struktur ekonomi juga merupakan alat penegasan arah relasi kekuasaan antara lelaki dan perempuan. Dalam hal ini, organisasi perempuan semakin dibatasi kegiatannya dalam wilayah publik maupun politik. Kemudian di dalam pembagian upah seringkali perempuan mendapatkan nilai yang rendah dibanding lawan jenisnya, sehingga banyak perusahaan pada Orde Baru memilih perempuan menjadi pekerjanya.

Program pembangunan yang dilaksanakan rezim Orde Baru bertumpu pada sumber dan modal. Semua sumber yang digunakan untuk peningkatan produksi, termasuk “pemanfaatan” tenaga kerja perempuan sebagai sumber daya manusia. Jumlah perempuan Indonesia yang lebih dari setengah penduduk telah menimbulkan inspirasi para konseptor pembangunan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan (Murniati, 1998:14).

Beberapa faktor timbulnya reaksi organisasi perempuan era Orde Baru diantaranya ialah marginalisasi, menurut Marhaeni. Marginalisasi merupakan pemiskinan kaum perempuan. Selain itu, juga merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender (Marhaeni: 2011), perempuan, misalnya pembagian kerja menurut gender, karena menurut gender ada pekerjaan yang cocok bagi perempuan ada yang tidak, sehingga pekerjaan yang cocok bagi lelaki akan tertutup bagi perempuan. Kesempatan perempuan lebih sedikit memperoleh jenis pekerjaan tertentu. Marginalisasi perempuan juga nampak dalam pekerjaan domestik, maka pekerjaan yang dikuasai perempuan dinilai lebih rendah. Kecenderungan dan penilaian masyarakat terhadap perempuan kian kuat, bahwa perempuan tidak dapat dijadikan pemimpin era Orde Baru (Marhaeni:2011).

Selain marginalisasi ada juga subordinasi, menurut Marhaeni, yang mempengaruhi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Pandangan gender yang memandang perempuan lebih emosional, lebih lemah dari pada laki-laki, maka perempuan tidak mampu memimpin, sehingga perempuan tidak perlu diberikan posisi/pekerjaan penting. Beberapa bentuk subordinasi yang dialami perempuan Indonesia pada masa Orde Baru diantaranya; menomorduakan kesempatan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan jika dalam rumah tangga memiliki keterbatasan sumber daya, mengorbankan anak perempuan untuk masuk pasar kerja, memiliki peluang yang

rendah untuk memperoleh jabatan karir maupun jabatan politik tertentu, dan jika karena kemampuannya perempuan mampu menempati posisi penting sebagai pimpinan, maka kaum lelaki merasa tertekan, karena penilaian perempuan dan kodrat yang sudah menjadi budaya (Marhaeni:12).

Masuknya perempuan di sektor industri meningkatkan kekuatan bersaing karena perempuan dapat diberi upah rendah, selain upah buruh perempuan rendah, mereka dilecehkan dan rentan akan perlakuan kekerasan. Dengan demikian peningkatan pendidikan perempuan di masa Orde Baru tidak selalu berfaedah bagi perempuan sebab ujungnya akan menguntungkan para pengusaha yang memakai tenaga kerja perempuan (Murniati, 1998:14). Untuk itu, organisasi perempuan melakukan berbagai alternatif untuk menyelamatkan kaumnya, bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah seperti LSM, dengan berbagai aksi-aksi sosial dan pendidikan berorganisasi yang lebih baik.

Masyarakat berpandangan perempuan dapat berada dalam wilayah publik, tetapi dengan menjadi organisasi independen yang mendukung aspirasi masyarakat. Meski ada sistem ideologi dan terstruktur yang membatasi kaum perempuan dengan organisasinya, tetapi perempuan bisa tetap mempertahankan misinya lewat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan. Untuk itu, perempuan dapat tetap melaksanakan aksi sosial menyuarakan aspirasinya mewakili perempuan dan masyarakat kecil yang tertindas.

3.5 Kasus Buruh Perempuan

Era reformasi diskriminasi dan permasalahan yang terkait dengan buruh perempuan banyak ditemui pada perusahaan-perusahaan. Dan cenderung semakin berkembang apalagi dalam situasi krisis ekonomi pada masa awal reformasi. Bentuk diskriminasi misalnya pengupahan, hak cuti, kesehatan, dan sebagainya (*SK* 6 Desember 2000).

Tahun 1997 angka pengangguran tercatat sebesar 4,2 juta meningkat sebesar 5,1 juta pada tahun 1998 dan 43 persen diantaranya adalah perempuan. Perempuan hampir tidak punya akses terhadap sumber pekerjaan karena peran yang termarginasi pada peran yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sedangkan banyak perempuan justru sebagai tulang punggung ekonomi keluarga (*Republika* 24 Agustus 1999).

Jumlah pengangguran perempuan antara tahun 1999 mencapai angka kritis, yaitu sebesar 36 juta. Hal ini menunjukkan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia di persimpangan jalan, asumsinya pertumbuhan ekonomi sebesar empat persen, jumlah pengangguran masih akan bertambah 400.000 orang per tahun (*Kompas* 12 September 2000).

Perbedaan kualitas pendidikan (termasuk buruh) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagian perempuan pada tahun 2000 memiliki pendidikan SMP ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan buruh perempuan membawa akibat pada dunia kerja yang harus dijalaninya. Besarnya jumlah perempuan tidak diimbangi dengan bekal pendidikan yang memadai (Susmanto, *JP* No.18 2001:85).

Tahun 2000 tercatat buruh penerima upah sebesar 29 jutaan orang. BPS mencatat, sebagian besar perempuan bekerja pada sektor rumah tangga sebagai IRT yang mencapai 24 jutaan dan bukan sebagai angkatan kerja (*not economically active*) (Kompas Agustus 2000; BPS, 2000). Diskriminasi pengupahan disebabkan tiadanya ruang dan kesempatan bagi para perempuan di tingkat pendidikan dan keterampilan. Banyak perusahaan yang tidak memberikan hak insentif untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih. Keengganan atau ketidaktahuan butuh perempuan memperjuangkan hak antidiskriminasi pengupahan dapat memicu permasalahan diskriminasi pengupahan (Susmanto, *JP* No.18 2001:87).

Pekerjaan anak perempuan di bawah umur menjadi persoalan hak anak yang paling banyak muncul di era itu. BPS menunjukkan ada anak yang berusia 15 tahun yang dipekerjakan sebagai buruh. Sementara itu, PBB mendefinisikan anak berusia kurang dari 18 tahun merupakan manusia yang berusia kurang untuk diberikan hak pekerjaan dan hal itu telah diratifikasi oleh Indonesia (Susmanto, 88:2001).

Berbagai kasus perburuhan yang menimpa buruh perempuan awal reformasi. Beberapa kasus telah memperlihatkan betapa suramnya kondisi dan posisi buruh perempuan. Walau secara kuantitas jumlah buruh perempuan besar, namun sering tuntutan yang diajukan terabaikan dan tidak terselesaikan dengan baik. Tuntutan spesifik sebagai buruh perempuan banyak yang tidak dipenuhi perusahaan secara memadai.

Kasus buruh perempuan begitu mencuat ke permukaan ketika dibuka sebuah tabir kejahatan pada kasus Marsinah. Tidak hanya itu banyak kasus juga terjadi justru ketika perempuan menjadi pahlawan devisa negara. Beberapa perempuan telah menjadi simbol perlawanan buruh akibat kekerasan yang harus diterimanya saat memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh.

Kasus kematian buruh perempuan selain Marsinah dan TKW di luar negeri dijabarkan sebagai berikut:

1. Kematian buruh perempuan bernama Juju Juliah tanggal 19 Agustus 1999 bisa dikatakan sebagai tragedi nasional. Juju meninggal berkat perlakuan pemimpin perusahaan maupun pihak Departemen Tenaga Kerja yang tidak mempedulikan persoalan di PT Rimba Asritama. Juju tewas akibat mogok makan menuntut 12 kali pesangon sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) untuk 125 dari 128 buruh pabrik (*Kompas* 26 Agustus 1999). Aksi ini diketahui perusahaan sampai titik kritis Juju. Namun, perusahaan tidak merespon yang wajar tapi hanya memintanya memberhentikan aksi mogok makan tersebut (*SK* 26 Agustus 1999).
2. Kasus yang juga menjadi perhatian ialah kasus penahanan Ngadinah buruh PT Panarub dengan tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Menurut Komisi Ombudsman Nasional, Tenten Masduki, tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur (*MI* 5 Mei 2001).
3. Ada kasus dimana dua pramuniaga perempuan tewas karena meloncat dari lantai dua sebuah toko di Bekasi. Peristiwa itu

didorong oleh perlakuan majikan yang tidak manusiawi seperti gaji terlalu kecil dan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Mereka merasakan seperti budak pada majikan tersebut sehingga memutuskan loncat dari lantai dua untuk melarikan diri (*SK* 17 Juni 1999).

4. Kasus lain terjadi pada suatu perusahaan dimana sebagian besar buruh PT KL Mas Garment adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka pernah merasakan tindak kekerasan dan penganiayaan hanya karena kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu, para buruh perempuan tersebut tidak mendapatkan hak cuti hamil dan tidak mendapat ijin menikah, tidak ada ijin ke toilet, beribadah dan sebagainya (*RM* 8 September 1999).
5. Di tempat lain dengan waktu relatif sama, ribuan buruh perempuan pabrik penghasil roti di Palembang berunjuk rasa dengan beberapa tuntutan. Para buruh perempuan meminta manajemen perusahaan mencabut peraturan tidak boleh hamil bagi wanita perempuan pekerja kontrak dan meniadakan peraturan tidak boleh menikah bagi buruh perempuan pada masa kontrak serta menuntut tetap menerima honor selama mogok kerja (*SP* 28 April 2001).
6. Kebebasan menjalankan keyakinan agama juga mendapatkan tekanan dari perusahaan. Tanpa alasan jelas, PT Buana Atnajaya III menekan buruh perempuan muslimah untuk membuka jilbab selagi mereka bekerja. Permintaan itu tidak lagi disampaikan secara halus setiap hari dan sempat

membuahkan protes dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut (*Republika* 18 Agustus 2010).

7. Unjuk rasa terbesar karena pelecehan seksual terjadi di PT Mayora Indah di Tangerang. 1500 buruh melaporkan melakukan protes bahwa rasa kewanitaan karena mereka merasa dilecehkan, karena hanya untuk membuktikan mereka sedang haid harus memeriksakan diri ke klinik yang ditunjuk oleh perusahaan. Saat pemeriksaan mereka harus menunjukkan bagian tertentu terlarang dari tubuhnya dan membayar antara Rp. 500,- hingga Rp.1500,-. Juga kalangan buruh menuntut hak cuti, upah, jamsostek dan lainnya (*Republika* 6 Mei 1999).
8. Kasus keguguran kandungan terjadi pada buruh perempuan PT Mickey Busana Utama, Bogor. Ada 10 buruh perempuan keguguran dalam sebulan karena dipaksa bekerja berat. Perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai (*Republika* 13 Juli 1999).
9. Kasus buruh perempuan juga di temukan oleh *Global Alliance* melalui studi yang dilaksanakan di sembilan subkontraktor pabrik sepatu bermerk *Nike* menunjukkan tindak kekerasan yang sangat berat bagi Indonesia. Studi lapangan dengan metode wawancara juga melibatkan 4.450 buruh dari sekitar 115.000 buruh yang berkerja di pabrik-pabrik subkontraktor *Nike*. Dari laporan hasil studi ini terungkap, bahwa sebagian besar atau sekitar 85% buruh pabrik sepatu *Nike* di Indonesia merupakan buruh perempuan

usia muda dengan usia rata-rata 23 tahun. Sekitar 40% dari pekerja tersebut berstatus menikah.

10. Kasus kekerasan juga menimpa TKW dimana ada penahanan 20 TKW di Timur Tengah karena berbagai kasus. Kasus seperti Warni yang telah dihukum pancung tanpa pembelaan. Jumlah buruh migran perempuan mengalami kekerasan di Arab Saudi dari tahun 1998-1999 meningkat 100% dari 227 kasus menjadi 484 kasus. Jumlah kasus yang ditangani KBRI di Arab Saudi rata-rata di atas 2.500 kasus pertahun. Pada tahun 1994-1997 jumlah kasus mencapai 11.817. (Susmanto, 2001:94) Beberapa kasus perkosaan yang terliput media diantaranya: Wiwin Widaningsih (20), Mariana (20), Maemunah (26), Masitoh (26), Kartini, Kuim (17), Cici (34), Mistriana (27), Nurul Hidayah (19), Mariroh (19) dan ratusan calon TKW yang mendapat perlakuan buruk sebelum bermigrasi (*BI* 17 September 2000).

Beberapa kejadian lainnya yang menyita perhatian: kasus buruh perempuan yang mendapat intimidasi, tekanan dan diskriminasi di PT Kharisma Unggul (*RM* 9 Mei 1999); kasus penabrakan dengan sengaja buruh perempuan dengan mobil dinas perusahaan hingga pembakaran mobil dinas yang terjadi di PT Sport Glove Indonesia, Tangerang (*MI* 12 April 2001); kasus pemaksaan tenaga melebihi jam kerja dengan upah yang kecil di PT Gloden Flower Semarang (*SK* 14 Mei 1999); protes karyawan karena pimpinan berbuat cabul di Hotel Oasis Batam (*Kompas* 29 Agustus 1999);

Perbedaan sangat mendasar mengenai diskriminasi perempuan pada tahun 1935 (masa kolonial) dan setelah tahun 1998 (masa reformasi). Pemerintah pada masa reformasi lebih tanggap dengan membuat aturan meski upaya nyata belum maksimal.

Berikut ini usaha pemerintah menanggapi ketidakadilan dengan mengeluarkan regulasi perburuhan melalui UU No. 25/1997, Undang-Undang tersebut berkaitan dengan UU No.7/1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mencakup:

- a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi
- b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai
- c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan ulang
- d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilai kualitas pekerjaan
- e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, maupun hak atas masa cuti yang dibayar
- f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melakukan keturunan.
- g. Hak mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin

hak efektif untuk bekerja, Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat.

- h. Untuk melarang dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil, dan diskriminasi atas dasar status perkawinan.
- i. Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan yang semula, senioritas atau jaminan sosial lainnya.
- j. Untuk menganjurkan pengadaan layanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam pengidupan masyarakat khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat penitipan anak
- k. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.
- l. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

BAB IV

PERJUANGAN VISI KONGRES PEREMPUAN

MISI SOSIAL DAN PENGAJARAN

4.1 Transformasi Visi Misi Kongres Melalui Misi Sosial

Lahirnya berbagai pergerakan perempuan reaksioner membuat peran perempuan kian tersudut oleh situasi di setiap zamannya. Hal ini melatarbelakangi perempuan bergerak dengan gencar salah satunya melalui bidang sosial untuk menggiatkan prinsip Kongres Perempuan Indonesia.

Ada beberapa hal yang patut dipahami dari pengalaman masa lalu ketika terjadi stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Namun konsep ini dianggap sebagai transformasi untuk menyelamatkan perempuan dari urusan-urusan besar dan berat. Bagi kaum perempuan, tindakan ini merupakan pengekangan yang memiliki tendensi, tetapi tidak ada yang mampu mengembalikan tradisi organisasi perempuan yang juga berjuang secara revolusioner pada masa kolonial seperti Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Meutia berperan besar dalam kemerdekaan.

Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas kaum perempuan di Indonesia. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda baik bagi kaum laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Untuk itu sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan publik semestinya ada kesetaraan dan keadilan yang terwujud.

Pengalaman terdahulu membuat para pemerhati perempuan memperjuangkan kaumnya. PBB (dalam agenda SDGs) juga mendukung program pembangunan berkelanjutan bagi perempuan salah satunya menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan agar memiliki kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambil keputusan di semua sektor kehidupan.

Kini, kaum perempuan baik yang sedang menempuh pendidikan, memiliki karir maupun ibu rumah tangga harus mengenal aneka masalah yang kerap dialami misalnya dalam pengukuran kinerja, kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan sistem peradilan guna meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan regulasi pemerintah harus sejalan dengan bergulirnya reformasi untuk membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional sehingga perempuan mendapat faedah dan tetap berperan untuk membangun masa depan para generasi baru.

Perempuan yang telah mendapatkan kedudukan di parlemen dapat mempromosikan peran perempuan dalam membangun bangsa. Kita dapat mengetahui perempuan dapat berperan dalam menganalisis isu-isu kebijakan publik diantaranya mengeksplorasi peran perempuan dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, serta implementasi kebijakan yang diberlakukan.

a. Lahirnya LSM Perempuan

Sebelumnya periode pra-Orde Baru perjuangan kaum perempuan bersama kaum lelaki sangat harmonis sehingga dapat merebut kemerdekaan bersama. Kaum perempuan ditugaskan di bidang logistik dan kesehatan. Walau perannya sebagai ibu dan diwarnai oleh tugas stereotip perempuan, tetapi banyak perempuan mampu menjalankan tugas di luar stereotip, misalnya tugas politik. Periode selanjutnya, demokratisasi (1946-1960), ditandai dengan organisasi politik melawan kemiskinan dan ketidakadilan, dan organisasi perempuan era itu lebih beragam misalnya, karena kebebasan dalam aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Prasetyo:20).

Sebagian elemen memandang secara tradisional tentang kemampuan organisasi sosial bahwa, tidak ada organisasi perempuan di masa Orde Baru, karena tidak ada pendukung dan massa yang dimiliki organisasi ini. Dalam hal ini organisasi perempuan dikategorikan sebagai organisasi sosial baru (organisasi yang belum memberi banyak peran bagi perkembangan bangsa), karena walaupun begitu, organisasi ini mampu menumbuhkan kesadaran baru di kalangan masyarakat, untuk lebih berperan dalam menghapus penindasan masyarakat sosial. Secara otomatis organisasi ini menimbulkan lembaga baru di akhir Orde Baru akibat strukturalisasi peran perempuan dan berbagai tekanan politiknya (Muchtar, *JP* 1993:7-8).

Adanya delegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik, mengakibatkan organisasi perempuan semakin lemah. Kodrat menjadi kata kunci, khususnya untuk

mensubordinasikan perempuan (Muchtar, *JP* 1993:7-8). Hal tersebut menjadi penting untuk meningkatkan nilai ekonomis dalam mendukung pembangunan nasional, pekerjaan perempuan merangkap yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan publik (Prasetyo:13).

Memasuki era Orde Baru, rezim berusaha mempertahankan peran berorganisasi perempuan, tetapi sesuai arah pembangunan nasional. Dalam hal ini, spirit organisasi perempuan kalangan bawah didukung dalam wadah organisasi PKK, yang dikontrol melalui Departemen Dalam Negeri. Istri Menteri Dalam Negeri menjadi ketua penggerak PKK Pusat. Agar lebih teratur dalam mengontrol perempuan, ditunjuk seorang Menteri Urusan Peranan Wanita (Prasetyo:21). Pemerintah Orba merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintahan tahun 1974. Ada pula Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi yang terdiri dari para istri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Organisasi ini membantu pemerintah menyebarluaskan ideologi gender dalam ketentuan Panca Dharma Wanita (Muchtar, *JP* 1993:11).

Organisasi perempuan yang bertahan pada Orde Baru, masih berada dalam Kowani. Organisasi tersebut ialah Perwari, Aisyah, dan Wanita Katolik (Wieringa, 1998:39). Perwari dianggap sebagai organisasi istri otonom, mereka tidak bebas dalam melaksanakan programnya, karena secara otomatis program dan misi awalnya sebagai perempuan dengan semangat

revolusioner diubah dengan dasar Panca Dharma Wanita, mereka pun menyesuaikan ketentuan rezim. Program Perwari berubah total seperti program perjuangan penghapusan penindasan dan pendidikan keorganisasian perempuan desa menjadi program domestik dengan arah pembangunan nasional. Kedua, persoalan perempuan tertindas makin banyaknya industri hiburan yang menjual perempuan, film pelecehan seksual, dan penganiayaan istri. Hal ini tidak terlalu digubris pemerintah Orde Baru, sementara Perwari dan organisasi perempuan lain tidak memiliki hak mendorong aspirasi perempuan lain bersuara dalam politik. Akhirnya kebebasan organisasi perempuan masa Orde Baru kian minim.

Demikian pula Aisyah, Wanita Katolik dan organisasi perempuan sosial, dibatasi dengan program pembangunan nasional. Organisasi istri, membantu menggelorakan kampanye nasional pembebasan Irian Barat, dan ganyang Malaysia. Keanggotaannya suka rela dan kegiatannya terbatas. Di berbagai pemerintahan berdiri organisasi pegawai perempuan. Pimpinan dipilih oleh anggota, dan para perempuan anggota organisasi bersangkutan bertujuan untuk hal yang dirasakan sebagai kepentingan mereka. Istri pegawai boleh jadi anggota, tetapi tidak wajib (Wieringa, 1998).

Struktur ini diubah oleh rezim Orde Baru bahwa istri pejabat harus menjadi anggota organisasi. Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI, organisasi untuk pegawai negeri. Perubahan terakhir diberlakukan dalam

pertengahan dasawarsa 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasarkan pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola yang sama dengan pola pemerintahan, yaitu istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Jika suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.

Kondisi lain terkait regulasi peran perempuan oleh rezim ialah terjadinya restrukturisasi kantor Kementerian Perkebunan. Para perempuan bekerja di kantor kementerian di Jakarta, yang organisasinya aktif. Mereka sangat aktif era Orde Lama melakukan peranan sosialnya dengan melakukan segala macam kegiatan serikat buruh demi kepentingan para anggota. Misalnya, berusaha menentang kecenderungan pegawai laki-laki yang melecehkan perempuan. Semasa Orde Baru berkuasa, organisasi ini sama sekali berubah. Sejak itu anggota organisasi adalah istri orang-orang yang bekerja di kantor itu. Perempuan pegawai yang suaminya tidak bekerja di kantor ini tidak lagi berhak menjadi anggota organisasi. Kegiatan yang dilakoni tidak lagi bertemali dengan kepentingan anggota, melainkan banyak berelasi dengan kepentingan jabatan suami (Wieringa, 1998:40).

Semua itu memperlihatkan bahwa usaha organisasi perempuan mempertahankan kaumnya, buruh, dan masyarakat tertindas, menjadi dibatasi. Akibatnya organisasi perempuan bekerja sama dengan lembaga masyarakat, pemuda, dan mahasiswa mengkritisi pembangunan Orde Baru beberapa tahun pasca pemerintahan untuk melihat kerugian-kerugian yang

dialami masyarakat, khususnya kaum perempuan masa itu. Adapun faktor-faktor organisasi perempuan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah digambarkan pada bagan 4.1.

Bagan 4.1: Infografis Faktor-faktor organisasi perempuan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah



Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan organisasi perempuan masuk organisasi non-pemerintah dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat:

- 1) Istri pejabat harus menjadi anggota organisasi yang menjunjung Panca Dharma Wanita.
- 2) Keanggotaan menjadi wajib dan iuran dipotong otomatis dari gaji suami.

- 3) Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI
- 4) Jika suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja
- 5) Organisasi perempuan yang dikontrol melalui pemerintahan, tidak menjalankan program organisasi tetapi wajib melaksanakan program pemerintah bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- 6) Pendidikan keorganisasian perempuan desa menjadi program domestik dengan arah pembangunan nasional
- 7) Persoalan-persoalan perempuan tertindas diantaranya semakin banyaknya industri hiburan yang menjual perempuan, film pelecehan seksual, dan penganiayaan istri, tidak terlalu diperhitungkan yang diperhitungkan dalam pemerintah Orde Baru.

b. Dukungan Internasional pada Lembaga Kesadaran Peran Perempuan

Organisasi kesadaran dan kebangkitan kembali kaum perempuan Indonesia senada dengan bangkitnya organisasi-organisasi internasional dengan lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 3010 (XXVI) tahun 1972, sehingga tahun 1975 diproklamasikan Tahun Perempuan Internasional. Dalam bulan Juli 1975 diadakan Konferensi Perempuan Sedunia di Mexico City yang menghasilkan Rencana Kegiatan Sedunia (*World Plan of Action*) untuk pelaksanaan Tahun Perempuan Internasional. Kemudian Majelis Umum PBB dengan Resolusi

no. 3520 (XXX) memproklamasikan tahun 1976-1985 sebagai “Dasawarsa PBB untuk perempuan dengan tema: Persamaan Pembangunan dan Perdamaian dengan sub tema Kesempatan Kerja, Kesehatan dan Pendidikan” (PPSW, 1990:127).

Gambar 4.1: Bentuk Kesadaran Perempuan di akhir rezim Orde Baru



Sumber: Basis (*Basis*, No. 01-02, 2006:28-29)

Program organisasi perempuan Internasional ini merupakan pengembangan dan revitalisasi program organisasi-organisasi perempuan bentukan Orde Baru. Cirinya adalah usaha menangani masalah perempuan secara profesional. Dalam kurun waktu ini banyak lembaga penelitian yang mengkhususkan diri untuk mengkaji masalah perempuan secara spesifik dan mendetail. Banyak perguruan tinggi mengadakan studi kasus tentang perempuan, diantaranya ialah UI, IPB,

Unibraw, dan lain-lain. Pada tahun 1979 dibuka *Clearinghouse for Information Women in Development* di PDII-LPII.

Kegiatan pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan dengan mencakup berbagai kegiatan dan berbagai instansi pelaksanaan, misalnya melahirkan Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yaitu Yayasan Aan-Nisa'Swasti di Yogyakarta (1983), Yayasan Srikandi di Jakarta (1983), Yayasan Melati (Manajemen, latihan dan Penelitian) di Jakarta (1983), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Jakarta (1986) (*Basis*, No. 01-02, 2006:28-29).

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Pendukung Organisasi Perempuan Non- Pemerintah (Independen)

Organisasi perempuan sempat dipertentangkan antara organisasi perempuan (di bawah kontrol) pemerintah dan organisasi perempuan non-pemerintah (Prasetyo:46). Semangat revolusioner organisasi perempuan sempat mundur selama masa Orde Baru, tetapi ternyata bibit semangat revolusioner para pejuang perempuan pendahulu mulai tampak tumbuh subur pada tahun 1980-an. Pada masa ini, banyak kaum muda mulai kritis, seperti kalangan mahasiswa. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapinya. Mereka membuat analisis sejarah secara kritis (Prasetyo:22).

Organisasi perubahan sosial muncul di kalangan generasi muda bersama dengan sekelompok kecil generasi tua yang bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lembaga ini merupakan tempat berkumpulnya kekuatan yang tidak dapat

bertahan dalam situasi *status quo*. Artinya, sejarah LSM dapat ditelusuri dari kekecewaan beberapa aktivis 1966 yang sangat berharap Orde Baru melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang, terutama ekonomi. Harapan tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan. Sebagai organisasi yang didirikan oleh warga sipil, LSM segera menyatakan diri independen dari negara dan bekerja memperkuat posisi masyarakat sipil (Saragih:1993).

Pada awalnya, kelemahan masyarakat sipil dipahami sebagai kemiskinan yang menimpa mayoritas rakyat. Karena itu pekerja-pekerja LSM menggunakan pendekatan kebutuhan pokok untuk memperkuat posisi mereka yang lemah. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan sentralisme negara dalam sistem pembangunannya yang tidak menyertakan kepentingan rakyat (*Rahayu: 1990:40*).

Walaupun lembaga ini geraknya dibatasi oleh pemerintah Orde Baru, tetapi kegiatan pemberdayaan rakyat berjalan terus. Aktivis LSM yang terpenggil untuk mengadakan perubahan sosial politik di Indonesia terus melakukan organisasi-organisasi pro-demokrasi melalui pemberdayaan rakyat. Berbagai organisasi pro-demokrasi muncul, termasuk organisasi feminis yang mempunyai kepedulian khusus terhadap permasalahan perempuan. Pada dasarnya organisasi feminis di Indonesia adalah organisasi demokrasi. Para aktivis perempuan yang membangun LSM berpandangan bahwa, suatu kelompok yang berkembang dalam kehidupan manusia banyak pilihan, tidak hanya dua pilihan saja, tetapi juga mengakui dan dapat menghargai adanya kemajemukan (pluralisme), keanekaragaman, baik umur, jenis kelamin, suku, ras,

agama, maupun perbedaan sosial ekonomi lainnya, bersedia dan berani menghadapi konflik karena konflik merupakan konsekuensi dari relasi antarmanusia dalam kemajemukan, mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik, melawan penindasan, penjajahan, kekerasan, dan ketidakadilan dengan menggunakan aksi *aktif tanpa kekerasan* (ATK) (*Prisma:48*).

LSM perempuan dapat bersinergi apabila terus dilakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi perempuan independen, organisasi pro-demokrasi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini dibutuhkan kesamaan persepsi di antara pelaku organisasi tentang masalah, tujuan dan target yang akan dicapai (Kasim).

Agenda yang ingin dicapai oleh lembaga masyarakat perempuan ialah mempengaruhi proses pengambilan keputusan lembaga-lembaga politik dalam rangka mendorong demokratisasi yang lebih luas dan lebih mendalam di berbagai sektor kehidupan. Setiap tantangan yang dialami perempuan dihadapi bersama-sama dengan melakukan organisasi lintas sektor yaitu bekerjasama dengan elemen-elemen pro-demokrasi dan kelompok-kelompok organisasi feminisme.

Pada perkembangannya LSM perempuan dari kalangan mahasiswa merekrut para mahasiswi tetapi terbatas ruang lingkungannya. Organisasi perempuan LSM lebih merupakan organisasi staf yang mempunyai kelompok binaan (kategori masyarakat tertentu). Sedangkan organisasi yang tidak mempunyai kelompok binaan akan berhubungan kelompok melalui jaringan LSM yang memiliki kegiatan tersebut (*Prisma:39*).

Para aktivis perempuan sempat kecewa karena organisasi massa perempuan saat itu kurang menanggapi kegiatan independen, karena semua ada dalam kontrol pemerintah. Kekecewaan ini menimbulkan semangat baru untuk mendirikan LSM yang mendampingi organisasi rakyat di kalangan bawah. Pilihan mereka belum pada organisasi massa karena Undang-Undang Keormasan masih mengikat kebebasan kegiatan pemberdayaan rakyat (*Prisma*).

Beberapa organisasi perempuan LSM ada yang membangun kerjasama dengan LSM lain atau kelompok yang memperjuangkan lingkungan hidup, hak asasi manusia, buruh, kaum tani, kebebasan berekspresi, prodemokrasi, dan masyarakat adat dengan melihat moral dan kehidupan bangsa (*Prisma*:39).

Pada perkembangannya muncul berbagai organisasi perempuan non-pemerintah (independen) seperti *Suara Ibu Peduli* (SIP) yang memperjuangkan politik agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, ekspresi dan kebebasan berpendapat; Satu aksi heroik dilakukan 3 aktivis SIP, Karlina Leksono Supelli, Gadis Arivia, dan Wilasih yang tertangkap akibat aksi “doa susu” di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka hadir dalam konferensi pers yang diadakan oleh LBH Jakarta pada tanggal 24 Februari 1998, pukul 13.00 WIB. Aksi yang dilaksanakan pada hari sebelumnya sekitar jam 12.00, di Bundaran HI dilakukan aksi doa bersama, nyanyi, dan baca puisi yang dilakukan para ibu anggota SIP yang prihatin atas lonjakan harga susu dan kesehatan anak-anak. Akibatnya para aktivis SIP tersebut diangkut paksa oleh pasukan

URC ke dalam truk bak terbuka dan baru dibebaskan pukul 11.00 WIB esok harinya, 24 Februari 1998.

Aksi ini bermisi mengetuk hati para ibu kelas menengah atas yang biasa melewati daerah sekitar bundaran HI, agar mereka ikut prihatin atas kesukaran para ibu kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan susu. Karlina Leksono menegaskan “generasi berikut dalam era globalisasi dan pasar bebas adalah generasi yang mengalami kurang gizi.” Ia menyayangkan bahwa pihak polda mencurigai gerakan moral ini sebagai gerakan politik.

Gadis Arivia merupakan salah satu pembicara dalam konferensi pers SIP yang dilakasanakan sebelum aksi doa susu, berpendapat bahwa keadaan makro negara kita (perekonomian-politik negara) mempengaruhi persoalan mikro (rumah tangga, yaitu pemenuhan kebutuhan sembako keluarga. “Jadi semuanya adalah politik...” tegasnya.

Gambar 4. 2: Konferensi Pers SIP



Sumber: Jurnal Perempuan tahun 1993

Konferensi pers dengan moderator A. Tigor Naenggolan dari Institut Sosial Jakarta (ISJ) juga

menghadirkan Apong Herlina, direktur LBH Jakarta, yang menguraikan kronologi peristiwa penangkapan ketiga peserta SIP itu. Kuasa hukum yang mendampingi mereka selama interogasi di Polda terdiri dari para pengacara LBH Jakarta, LBH APIK dan ISJ. Hal menarik yang diungkapkan adalah pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh pihak polda, sementara surat penangkapan belum turun. Akhirnya ketiga ibu peduli itu dikenakan pasal kitab 510 Kitab UU Hukum Pidana (*JP* Edisi 07 Mei-Juli 1998).

Adapula lembaga perempuan *Kalyanamitra* yang giat membuat organisasi advokasi dan penanganan korban pemerkosaan. Pada tanggal 21 Januari 1998 diselenggarakan diskusi bersama pakar feminis dan aktivis lingkungan hidup dari India, Vandana Shiva. Menurut Shiva penindasan perempuan dapat disamakan dengan penindasan manusia terhadap alam. Sistem ini pada zaman mendatang dapat dilakukan melalui teknologi. Pokok-pokok ini yang mendasari pemikiran buku Shiva, *Violence of the Green Revolution*. Shiva memandang bahwa sistem ekonomi formal yang didasarkan pada transaksi merupakan sistem yang bukan hanya menindas manusia, khususnya perempuan, tetapi juga menindas alam. Menurut Shiva, sistem ekonomi tersebut tidak adil dan harus diubah menjadi ekonomi rakyat yang sifatnya informal dan berorientasi pada ekonomi substansi. Sistem baru ini akan memperhatikan bidang-bidang reproduksi, pengasuhan anak, perawatan manula, dan orang-orang yang sakit. Dalam konteks ketidakadilan negara

dan masyarakat Shiva berpandangan bahwa keanekaragaman (diversitas) kondisi kaum perempuan, seperti ras, kelas, budaya, nasionalitas, dan sebagainya merupakan kekuatan dan sekaligus pertahanan kaum perempuan. Langkah konkret yang perlu diambil adalah menempatkan perempuan sebagai aktor ekonomi, sehingga kerja perempuan dianggap sebagai sumbangan terhadap ekonomi masyarakat. Hal utama yang ingin dicapai adalah sistem ekonomi bebas yang dikendalikan oleh perempuan, suatu sistem yang tidak mengikuti struktur ekonomi formal dan ekonomi bebas sebagaimana yang diterapkan di tingkat internasional saat ini. Langkah lain yang penting adalah membuat laporan perempuan tingkat dunia mengenai krisis ekonomi berdasarkan sudut pandang dan pengalaman hidup kaum perempuan. Shiva bahkan menawarkan sebuah solusi feminis bagi permasalahan dunia: desentralisasi makanan (bukan monopoli), intensifikasi keanekaragaman budaya (bukan intensifikasi bahan kimia), stabilitas, dan pemeliharaan (*JP* Edisi 07 Mei-Juli 1998:52).

Selain Kalyanamitra ada pula *Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan* (APIK) yang kegiatannya berfokus pada advokasi dan bantuan hukum untuk korban kekerasan terhadap perempuan oleh negara. Pada tanggal 10 Februari 1998 dilakukan penelitian respon agama terhadap pembakuan peran perempuan Indonesia. Hasil penelitian yang dibawakan dalam semiloka merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang disosialisasikan APIK kepada

Beberapa aksi momentum hari perempuan internasional juga dilakukan SERUNI (Seruan Perempuan Indonesia) pada tanggal 8 Maret 1998. Aksi berupa doa perempuan antaran iman untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Tujuan dari acara ini ialah untuk mengekspresikan harapan para perempuan atas kondisi krisis moneter yang khususnya berdampak paling buruk pada perempuan. SERUNI merupakan gabungan berbagai kelompok perempuan yang memberi seruan kepada perempuan yang umumnya untuk bersatu menyelamatkan generasi penerus, untuk itu SERUNI menyerukan kepada perempuan:

- 1) Bersatu dalam menghadapi krisis bangsa
- 2) Bekerjasama untuk mengatasi dampak krisis bagi keluarga
- 3) Memperkuat solidaritas untuk menghindari perpecahan antar suku, ras, agama dan kelas ekonomi
- 4) Menjalin solidaritas dengan gerakan perempuan lain di seluruh dunia untuk membantu kaum perempuan dan anak Indonesia.

Adapun kegiatan acara yang dilakukan meliputi persembahan doa yang dilakukan oleh perwakilan perempuan Hindu, perempuan Budha, perempuan Islam, dan perempuan Kristiani. Acara ini juga dimeriahkan dengan persembahan puisi dan nyanyi bersama serta pembacaan Seruan Perempuan Indonesia.(Jurnal Perempuan, 1998)

Pada tanggal 24 Maret 1998 LSM dan Pekerja Migran menyerukan haknya pada Komnas HAM. Sebanyak delapan LSM diantaranya Perserikatan Solidaritas Perempuan, Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia, Yayasan Lembaga Persatuan Hukum Rakyat-Mataram, dan Yayasan Panca Karsa-Mataram, serta beberap TKI dan keluarganya melakukan dialog dnegan Komnas HAM. Mereka datang untuk meminta perhatian dan tindakan konkret komisi tersebut terhadap masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berada di luar negeri (buruh migran). Sebelum dialog itu, di halaman Komnas HAM mereka menggelar spanduk dan dengan pengeras suara mengutarakan keprihatinan serta menyanyikan lagu “Padamu Negeri”. Pelanggaran hak TKI menyangkut antara lain: tidak dibayarnya gaji, penganiayaan, kematian tidak jelas, dan ancaman hukuman mati.

Clementio dos Reis Amaral, B.N Marbun dan Soegiri adalah tiga anggota Komnas HAM yang menemui rombongan ini. Kepada ketiga orang itu mereka membaca pernyataan sikapnya yang disertai data kualitatif dan kuantitatif. Pada triwulan pertama tahun 1998, terdapat 5 orang terkena ancaman hukuman pancung/gantung, 1.865 orang dideportasi, 39 kematian, dan 44 korban kekerasan. Kematian TKI ini memang memprihatinkan, sepanjang 1991-1997 (menurut data yang diolah Solidaritas Perempuan) terjadi 54 kasus kematian dimana identitas korban tidak jelas, sepanjang tahun-tahun tersebut adalah

552. Kekerasan terhadap buruh migran perempuan (identitas jelas) sepanjang tahun yang sama adalah sebanyak 46 kasus.

Pada diskusi tersebut, buruh migran dapat langsung menceritakan kasusnya kepada ketiga anggota Komnas HAM dan menunjukkan bekas-bekas aniaya di tubuh mereka. Komnas HAM menyatakan bahwa mereka akan menjalankan langkah-langkah konkret dan bukan hanya memberi janji. (Jurnal perempuan, 1998)

Pada tanggal 18 Februari 1999 juga dilakukan Seminar Perempuan di Pusat Pemberantasan Tuberkulosa, Jakarta. Seminar yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi LSM untuk Perempuan, CIDA dan SGIF ini menampilkan pembicara, pembahas dan moderator antara lain: Titi Sumbang, SH, MPA (Yayasan Melati), Dr. Chusnul Mar'iyah (FISIP UI), Mochtar Pabotinggi, Lies Sugondo, SH (Komnas HAM), Prof. Azyumardi Azra (Rektor IAIN Jakarta), Prof. Dr. Toeti Heraty (Guru Besar FSUI), Syamsiah Achmad, SH., Dr. Komariah E. Sapardja, SH (UNPAD), Dr. Sutradara Ginting (IPCOS), Sita Aripurnami, dan Ani Sucipto. Seminar ini membahas hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan strategi pemberdayaan perempuan. Dalam berbagai kesempatan sesi tersebut para pembicara dan pembahas lebih banyak mengemukakan bagaimana perempuan berkandah di politik secara umum dan upaya perlunya perempuan memberdayakan kepercayaan diri untuk dapat tampil menuangkan berbagai aspirasi rakyat.

Selain itu diselenggarakan Konferensi Pers dan Deklarasi Perempuan Adat Nusantara di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1999. Perempuan adat dari berbagai wilayah Indonesia bersatu dalam Kongres Masyarakat Adat se-Nusantara pertengahan Maret 1999 mengadakan unjuk rasa di bunderan Hotel Indonesia dan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan Sepuluh Gugatan Perempuan Adat, yang berbunyi:

- 1) Mencabut segala aturan kebijakan negara yang merugikan masyarakat adat perempuan
- 2) Menyediakan sistem perlindungan agar segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dapat dicegah
- 3) Mengembalikan hak ulayat masyarakat adat perempuan, termasuk kekuasaan otonomi lokal, masyarakat adat perempuan di tingkat daerah
- 4) Mengakui hak perempuan untuk bersuara dan ikut mengambil keputusan
- 5) Mengakui dan melindungi pengetahuan maupun keahlian tradisional perempuan adat
- 6) Menghentikan semua bentuk pemaksaan program keluarga berencana
- 7) Mencabut dwifungsi ABRI dan menghukum pelaku perkosaan terhadap perempuan
- 8) Membuka akses informasi dan pengetahuan bagi perempuan
- 9) Mencabut UU.5/1979 tentang pemerintahan desa

10) Menyerahkan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk mengelola rumah tangganya sendiri serta mengelola sumber daya alam.

Pada kesempatan pembacaan deklarasi yang dibacakan saat konferensi pers, para perempuan adat dari berbagai wilayah mengemukakan berbagai perampasan hak terhadap warga perempuan masyarakat adat. Para perempuan berkesempatan membagi cerita duka sebagai perempuan, diantaranya pemerkosaan, perampasan tanah adat, hutan adat, sungai dan lahan mata pencaharian masyarakat adat. Perampasan diantaranya dilakukan melalui pengambilalihan sungai dan alat tradisional pendulangan emas masyarakat Dayak oleh perusahaan dan pemerintah di Kalimantan, pencemaran sungai yang menjadi tempat mata pencaharian suku di Timika, Iran Jaya dan perkosaan. Pada kongres masyarakat adat ini, perempuan masyarakat adat membentuk kebersamaannya yang menjadi harapan bagi keutuhan integrasi bangsa.

Kelompok Perempuan Sadar (KPS) yang membuat organisasi feminis kristiani melalui pendidikan teologi perempuan, sebagai sarana advokasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dalam gereja; *Perserikatan Solidaritas Perempuan* yang memfokuskan organisasinya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap buruh migran perempuan serta organisasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat tingkat bawah.

Selain itu ada pula *Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia* (GAKTPI) sebuah forum yang memfokuskan organisasinya pada advokasi perempuan dan sosialisasi penyadaran akan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, *Rifka Anissa* yang memfokuskan organisasinya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (KDRT), khususnya kekerasan terhadap istri (KTI), *Yayasan Anisa Swasti* (Yasanti) yang memfokuskan organisasinya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap buruh perempuan, *Inaswati* yang giat dalam advokasi dan penanganan kekerasan terhadap anak-anak perempuan jalanan, dan masih banyak lagi organisasi perempuan non-pemerintah seperti *Flower Aceh* dari Aceh, *Yayasan OWA* dari Palembang, *Yayasan Santo Antonius* dari Merauke, yang peduli terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di Indonesia (*JP* Edisi 07 Mei-Juli 1998).

Pada tahun 1975, pendirian LSM perempuan di Indonesia juga didukung oleh agenda *penyadaran gender* yang disepakati secara internasional. Konferensi perempuan sedunia di Meksiko menetapkan tahun itu sebagai Tahun Perempuan Internasional. Pada tahun tersebut, pembangunan berwawasan gender (*Gender and Development*) ditetapkan sebagai agenda kegiatan perempuan dari negara anggota PBB. Masuknya gender dalam agenda pembangunan ini mendorong perkembangan feminisme. Organisasi non-pemerintah perempuan (*ornop* perempuan) di Indonesia,

yang sudah mendapat dukungan dan bekerjasama dengan organisasi perempuan internasional, mulai mensosialisasikan Ideologi Gender serta dampak-dampaknya. Memang faktor agama dan budaya menjadi hambatan utama bagi para anggota. Untuk mengatasi permasalahan ini, melalui sebuah sarasehan para aktivis perempuan kristiani bersepakat mengembangkan pendidikan nonformal teologi perempuan. Gagasan ini disambut positif para aktivis perempuan Islam. Mereka juga mengembangkan teologi perempuan Islam (*JP* Edisi 07 Mei-Juli 1998:49).

Sejak tahun 1980-an di Indonesia mulai muncul ornop perempuan yang peduli terhadap permasalahan perempuan akibat dari ketidakadilan gender. Mereka menganalisis permasalahan tidak hanya dari prespektif sosiologis, ekonomis, dan politis, tetapi juga dari prespektif budaya dan agama.

Bagan 4.2: Infografis LSM Perempuan



Berdasarkan bagan 4.5, ornop (Organisasi non pemerintah) perempuan lahir sebagai akibat kebijakan rezim Orde Baru, sehingga domestikasi perempuan secara total tanpa menyentuh persoalan publik menjadi hambatan besar bagi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Persoalan besar yaitu kelompok perempuan yang membela permasalahan perempuan seperti penindasan,

kekerasan seksual, dan KDRT tidak lagi ditanggapi serius oleh pemerintah.

Untuk itu, ada ornop seperti LSM Perempuan yang setidaknya mendukung kaum perempuan yang tertindas, sehingga inilah cara satu-satunya kelompok-kelompok perempuan mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan dukungan ini, organisasi perempuan masih dapat meraih cita-cita lamanya yaitu kesejahteraan kaumnya dan kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.

Pada akhirnya dibentuk berbagai LSM yang mendukung tercapainya suatu keadilan, tidak hanya bagi kaum perempuan Indonesia secara khusus, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

d. Program organisasi perempuan Independen Selaras pada Cita
Kongres Perempuan

Organisasi perempuan pertama Indonesia telah menunjukkan sikap sosialnya, dengan perjuangan mengumpulkan seluruh anggota dari berbagai lapisan, dari kelas bawah hingga kelas atas. Pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta, 22 Desember 1928, mayoritas organisasi atau organisasi perempuan didukung oleh kaum sosialis. Budi Utomo sebagai organisasi pertama Indonesia mendukung sepenuhnya tindakan organisasi-organisasi perempuan ini, karena sangat membantu dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme.

Pada masa pendudukan Jepang, organisasi perempuan Indonesia juga menunjukkan keberaniannya melawan pemerintah kolonial. Organisasi ini dinamakan Organisasi Wanita Sosialis

(GWS), yang merangkul golongan pemuda sosialis untuk membantu kemerdekaan Indonesia.

Organisasi perempuan lainnya juga menunjukkan peran dalam bidang sosial. Pada Kongres II Gerwis, Maret 1954 di Jakarta salah satu organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial, yakni membuat program kerjanya, menyatu dengan kaum perempuan buruh dan tani. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No.68 tahun 1959 bahwa, yang pertama, mengusahakan adanya undang-undang yang mengatur hubungan kerja yang demokratis antara buruh dan majikan di setiap lapangan kerja, dan melarang segala bentuk pemecatan sewenang-senang. Kedua, memperluas koperasi-koperasi buruh di setiap lapangan kerja yang bisa meringankan kaum buruh atau pekerja perempuan dan para istri buruh atau pekerja.

Kegiatan yang dilakukan organisasi perempuan LSM dalam menyadari adanya ketimpangan gender, kini sebaiknya diarahkan untuk menggerakkan atau menumbuhkan kelompok, misalnya, pengajian, kesenian dan sebagainya. Bekerjasama dengan organisasi otonom dan induk. Hubungan dengan massa lebih kepada hubungan organisasi yang dapat bekerjasama menentukan berbagai kegiatan yang menginspirasi kebangsaan.

LSM Perempuan dapat menyusun program dan melakukan berbagai kegiatan dari mengurus persoalan perempuan sehari-hari sampai menciptakan simbol-simbol baru tentang peran perempuan dalam kebangkitan. Di samping bentuk organisasi massa semacam itu, diperlukan organisasi yang mengurus *lobby* dan organisasi yang

meriset situasi serta menerbitkan publikasi sesuai dengan kepentingan massa (Rahayu, *Prisma* 1996:42).

Tawaran-tawaran tersebut jelas membawa implikasi pada perubahan cara perempuan berorganisasi. Dari struktur organisasinya, perlu dilakukan perubahan untuk membuka keanggotaan umum, dan hal ini membutuhkan keseriusan dan ketekunan dari kelompok-kelompok perempuan (Rahayu, *Prisma* 1996:42).

Program pertama ialah dengan masuk ke jalur pendidikan. Sektor pendidikan merupakan bidang yang mudah dimasuki oleh perempuan karena pendidikan tidak langsung bersentuhan dengan kekuasaan. Melalui jalur pendidikan, perempuan mendapatkan ilmu pengetahuan serta mendapatkan kesempatan untuk berkarir di bidang akademis dengan menjadi guru dan dosen. Mereka dapat dengan lebih leluasa memilih bidang-bidang pekerjaan yang lebih layak daripada sebagai buruh migran, buruh perusahaan yang murah (Rahayu, *Prisma* 1996:42).

Program kedua ialah program LSM Perempuan yang bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. LSM lebih dinamis dan energik. LSM mudah mendapatkan informasi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Anggota perempuan yang masuk dalam LSM harus selektif dalam mengangkat isu yaitu hanya mengangkat isu yang berpihak pada masyarakat di sekitar lingkungannya sendiri. Pentingnya membatasi pada lingkungan sendiri dimaksudkan untuk meminimalisir penolakan masyarakat terhadap aktivis perempuan yang dianggap kurang memerhatikan peran-peran domestiknya. Target utama LSM ialah munculnya

persepsi positif masyarakat bahwa perempuan juga mampu menjadi agen utama pembangunan bagi lingkungannya. Bukan sekadar menjalani rutinitas kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, tetapi juga menawarkan perubahan-perubahan menjadi lebih baik (Kasim).

Gambar 4.4: Kegiatan LSM Perempuan dalam menanggulangi bencana alam



Sumber : Indiah Rahayu

Bagan 4.3: Program yang ditawarkan kepada LSM Perempuan



Bagan 4.3 menunjukkan tentang program-program yang dianggap baik dan aman untuk mengembangkan peran perempuan.

Dengan berbagai jalur tersebut, kelompok-kelompok perempuan yang awalnya terbentuk dari sebuah organisasi tidak kehilangan semangat juang terdahulu. Hal yang penting ialah bagaimana jalur tersebut dapat berguna bagi kaum perempuan dan masyarakat, khususnya dalam menghapus berbagai bentuk penindasan.

Jadi baik jalur partai politik, pendidikan, maupun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan menjadi jalan terbaik menuju organisasi perempuan Indonesia yang sukses dan mandiri. Demikianlah cita-cita perempuan tidak lagi terhalangi oleh kebijakan politik penguasa, tetapi menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mengangkat derajat manusia secara umum.

e. Relevansi Perjuangan organisasi perempuan Independen dan Cita Kongres sebagai Refleksi Bangsa

Setiap bulan Maret dan April kita merayakan hari besar perempuan. Tepatnya tanggal 8 Maret kita merayakan Hari Perempuan Sedunia dan 21 April kita merayakan Hari Kartini. Untuk dapat mengapresiasi dan menginterpretasikan peringatan hari besar diperlukan kecintaan pada tanah air yang melahirkan tanggungjawab untuk memelihara jiwa patriotisme.

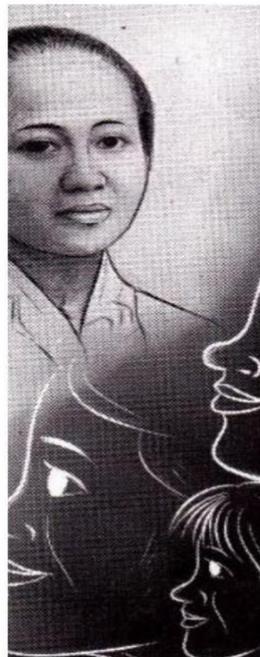
Pemerintah menganggap perlu menghargai jasa pahlawan pelopor semangat emansipasi kaum perempuan Indonesia dan menetapkan Kartini sebagai pahlawan. Sebagai Pahlawan Nasional dan teladan penggerak Kongres Perempuan Indonesia bahkan motivator dalam tubuh LSM yang berkembang saat ini, Kartini merupakan perlambang penggerak kesetaraan dan penegak HAM untuk kemajuan bangsa. Pada tahun 1964 suasana politik nasional

diwarnai patriotisme dan nasionalisme membela negara, dalam hal ini konfrontasi Indonesia dengan Malaysia membutuhkan dukungan dari seluruh bangsa termasuk kaum perempuan diantaranya tertuang dalam salah satu ajakan dari Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini Jawa Tengah yang dimuat dalam surat kabar "*Dengan Semangat Kartini Kita Ganyang Malaysia*" (HSM 21 April 1964). Artikel tersebut mengemukakan ajakan Ketua HARI Kartini Jawa Tengah yang menyatakan segenap potensi karya dari lapisan dan golongan dikerahkan untuk menanti arahan komando yang akan diberikan oleh Panglima Tertinggi, Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi untuk mengganyang Malaysia. Maka pada masa orde lama pemberian gelar tersebut, mengindikasikan bahwa dirasakan cukup bagi pemerintah mempopulerkan Kartini sebagai pahlawan nasional, yang berpikir untuk kemajuan bangsa, tidak pernah didengarkan sebagai seorang perempuan dengan ide perubahan nilai dan budaya bangsa. (Umi Lasmina: 1998) Sehingga saat perempuan-perempuan, telah memiliki sosok pahlawan, Kartini (perempuan lain yang mendapat gelar pahlawan adalah HR. Rasuna Said 1974, dengan Keppres No 08/TK/1974, Christina Martha Tiahahu tahun 1969) yang dibutuhkan negara untuk mendukung terlaksananya penghapusan kolonialisme dalam bentuk konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu.

Setelah Kartini dinobatkan sebagai pahlawan nasional, pada tahun-tahun berikutnya negara mengadakan perayaan peringatan Hari Kartini dengan mempopulerkan konsep-konsep keibuan yang pernah dicetuskan Kartini. Diantaranya dengan kegiatan perayaan

Hari Kartini di sekolah-sekolah, melalui kompetisi atau kontes berkebaya. Di sekolah-sekolah pada periode tahun 1970 hingga awal tahun 1980 merayakan Hari Kartini dengan berbagai perlombaan diantaranya berkebaya. Di masa kini bahkan masih berlangsung. Hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Kartini dan penggerak Kongres Perempuan Indonesia bahwa itu terjadi di lembaga pendidikan yang dipercaya Kartini sebagai awal pembebasan perempuan dari ketertindasan budaya.

Gambar 4.5: Kesadaran Berorganisasi sebagai Peluang Kemajuan Bangsa



Organisasi Wadah untuk Mengaktualisiasikan Diri

- 01** MULAI DARI
KEYAKINAN
PERTEGUH BANGSA
DENGAN PRINSIP
PERJUANGAN
- 02** Mengutamakan
demokrasi
sebagai upaya
menolak
diskriminasi
- 03** MEMPERTEGUH
PERSATUAN SEBAGAI
SARANA UTAMA
MENGUATKAN BUMI
PERTIWI DARI
PENJAJAHAN MORAL

Perlu disadari bahwa apa yang kita nikmati sekarang tidak lain dari usaha para pejuang bangsa kita sebelumnya. Banyak pejuang perempuan yang memberi teladan. Ada berbagai proses pendidikan Barat yang tanpa ia sadari diterimanya saat melakukan koresponden dengan rekan-rekan di Belanda. Kartini sebagai seorang anak Bupati berkesempatan menerima pelajaran menulis bahasa Jawa, sastra, seni, pelajaran tentang agama Islam.

Dalam arti luas, tidak hanya Kartini saja yang memperjuangkan bangsa namun ada banyak pejuang perempuan revolusioner yang gigih membela daerahnya khususnya di DIY sebagai pusat kongres perempuan.

Berkembangnya pendidikan pada masa organisasi-organisasi nasional menuntut para aktivis perempuan untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan di DIY pada tanggal 22-25 Desember 1928. Kongres diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya bidang pendidikan. Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Sekarang, gedung ini digunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamsa, DIY.

Selain para aktivis perempuan seperti SK Trimurti dan Maria Ulfah Soebadio, masih banyak pejuang lain seperti Setiati Surasto, perempuan pertama yang menjadi redaktur Koran “Buruh” ketika Jakarta diduduki Belanda pada tahun 1947-1949; Yetty Zain dan Fransisca bertanggungjawab di Radio Gelora

Pemoeda Indonesia (PESINDO), menyiarkan perjuangan Indonesia ke dunia internasional, tepatnya di kota Kalkuta, India pada 1948, yang merupakan embrio dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

Sebagai pusat Kongres Perempuan pertama, DIY melahirkan para aktivis pejuang perempuan masa kini yang diimplementasikan lewat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa DIY (BPPM) dan bergerak dalam segala bidang. Pertama di bidang kesehatan, BPPM DIY mendukung pelayanan KB di tingkat lapangan. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dijadwalkan pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2016. Dari 25 lokasi yang telah direncanakan, 15 lokasi diantaranya merupakan lokasi Program Penanggulangan Kemiskinan DIY. Selain itu, BPPM DIY bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pada bulan Maret 2016 melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di 10 Desa Sadar HIV dan AIDS.

Kedua, di bidang sosial. BPPM mengadakan *workshop* profil desa maret 2016 di DIY, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul. *Workshop* ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, Profil Desa, dan Kelurahan tetap menjadi salah satu indikator lomba Desa dan Kelurahan. Salah satu narasumber dari Balai PMD DIY memberikan materi berupa penjelasan lebih mendalam mengenai menu-menu Profil Desa berbasis *website* dan praktik pengisian Data Dasar Keluarga. Sebagai tindak lanjut BPPM DIY diharapkan mengadakan bimtek

bagi kecamatan yang ada di DIY. Selain itu, BPPM bersama PEMDA DIY terus melakukan pengembangan Desa Prima (Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri) untuk menanggulangi kemiskinan,. Kegiatan diselenggarakan 26 Februari hingga 17 Maret 2016.

Dalam bidang ekonomi BPPM DIY bersama BUM (Badan Usaha Milik) Desa melaksanakan kegiatan Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan fokus pendampingan yang dilakukan secara langsung di masing-masing desa sasaran. Sejarah telah mencatat beberapa pejuang perempuan menjadi pemimpin yang tangguh. Pengaruh mereka justru lebih banyak muncul pada masa perjuangan fisik. Sekarang perjuangan itu ditransferkan dalam bentuk yang berbeda. Perjuangan emansipasi telah tampak di era ini salah satunya program-program aktivis perempuan DIY yang sadar akan keutuhan bangsa. Maka jejaknya diharapkan menjadi kekuatan yang harmonis dan fondasi untuk membangun bangsa.

Untuk mengupayakan kesejahteraan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia khususnya para buruh, ada beberapa solusi kebijakan jangka panjang yang dapat ditempuh diantaranya:

- 1) Konstitusi mewajibkan pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu dapat dicapai dengan bekerja agar mendapatkan upah dan fasilitas lain, baik sebagai buruh atau bukan buruh (*entrepreneur*). Kalangan pengusaha merupakan kalangan yang mapan sehingga perlu dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan buruh. Dengan demikian buruh merupakan

pihak yang harus dilindungi. Jangan sampai ada kerjasama antara elit politik dan pengusaha tanpa memperhatikan martabat para buruh.

- 2) Penegakan hukum harus serius terutama dalam hal terkait kepentingan para buruh perempuan pada khususnya. Aparat penegak hukum perburuhan yang jujur dan amanah tahan tidak disuap merupakan prasyarat mutlak yang harus ada karena perundang-undangan perburuhan relatif cukup memadai. Konflik buruh dan pengusaha seringkali untuk pada tingkat level Departemen Tenaga Kerja atau instansi terkait. Biasanya buruh yang kalah hanya bisa melampiaskan dengan cara merusak karena dikecewakan.
- 3) Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam belanja negara. Perempuan merupakan angkatan kerja cukup besar. Oleh karena itu, perempuan perlu mendapatkan program pendidikan dan kesehatan secara khusus tapi tidak eksklusif dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tersebut. Pendidikan siap kerja bagi perempuan harus diadakan secara sistematis oleh instansi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Keterampilan tersebut harus mampu menjamin tawar menawar buruh perempuan terhadap perusahaan.
- 4) LSM pemberdayaan perempuan harus dapat mengajak para pengusaha untuk ikut dalam kampanye peningkatan kualitas buruh perempuan. LSM tersebut dapat berperan untuk memasukan kinerja perlindungan buruh perempuan suatu sektor industri dalam salah satu pertimbangan investasi.

4.2 Pendidikan sebagai Jalur Transformatif Penguat Prinsip Kongres

1. Jejak Perempuan Mengupayakan Pendidikan

Dalam kurikulum pendidikan khususnya tingkatan SD, SMP, hingga SMA nyaris belum memuat sepenuhnya perjuangan organisasi perempuan atau tokoh perempuan. Hanya saja dibahas secara singkat mengenai organisasi perempuan di dalam wadah organisasi utamanya seperti Muhammadiyah dengan organisasi perempuan Aisyiah. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia hanya memuat narasi singkat yang menjelaskan tentang cikal bakal Hari Ibu.

Dalam beberapa dekade juga tidak terlihat bahwa pemerintah dalam kurikulum menuangkan seluruh gagasan Kartini yang membangun semangat emansipasi, karena telah disaring maknanya agar sesuai dengan kepentingan umum. Ada beberapa gagasan Kartini yang menunjukkan ada perubahan nilai masyarakat yang memandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua (Umi Lasmini: 1998). Beberapa pemikiran Kartini tidak dipublikasikan dari peserta didik mulai dari SD, SMP, dan SMA. Mereka hanya mengenal sedikit biografi Kartini dan perjuangan pergerakan perempuan dari buku teks pelajaran tertentu yang digunakan pada awal tahun 1980an, seperti dari buku IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Sejarah dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), dengan penjelasan yang sangat singkat, yang terpanjang hanya 5 alinea. Misalnya dalam buku IPS

diantaranya menulis “kaum wanita Indonesia ingin juga maju seperti kaum pria. Pelopor wanita yang terkenal R.A Kartini. Beliau bercita-cita memajukan kaum wanita” (Depdikbud, 1986:65). Sedangkan di SMP buku teksnya menjelaskan: “Disamping organisasi politik dalam masyarakat, seperti gerakan wanita, pemuda, pendidikan, dan agama juga muncul. Kemudian muncullah tokoh-tokoh wanita seperti R.A Kartini dan Dewi Sartika” (Depdikbud, 1986:84). Bahkan dalam buku pelajaran tingkat SMA yang hanya memberikan penjelasan singkat tentang Kartini, diantaranya dalam buku PMP yang menyebutkan, “Perjuangan Kartini untuk pembangunan kesejahteraan keluarga. Keluarga merupakan sel pertama dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya (Depdikbud, 1981:59). Buku-buku teks pelajaran tersebut merupakan buku pegangan wajib siswa, yang diterbitkan dan disusun berdasarkan kurikulum pendidikan tahun 1975 dan beberapa kali mengalami revisi. Untuk kurikulum dalam buku teks taun 1990an hampir tidak ditemui penjelasan mengenai Kartini, dalam buku teks pelajaran yang sama (Umi Lasmini: 1998).

Sebelum abad XX di wilayah Jawa peran perempuan keraton dalam menjaga tradisi, membimbing dan mendidik anak sangat digenggam teguh. Apalagi pengaruhnya semakin tampak ketika Eropa dengan tradisinya masuk di kalangan keraton Jawa Tengah (Carey 2012: 539-42,591). Organisasi perempuan terbentuk dari proses pendidikan, sehingga ada peran besar kaum perempuan terhadap pendidikan. Begitu

pula yang dicita-citakan oleh R.A Kartini yang sempat menulis dua kali tentang pendidikan. Dalam suratnya pada 11 Oktober 1901, ia menulis:

Menurut ayah, menjadi gurulah yang terbaik bagi kami...Di mana lagi aku akan dapat menyebarkan cita-citaku secara lebih baik dari pada di situ, sebagai pendidik angkatan muda yang akan menjadi perempuan ibu masa depan?... (Kartini, 1987:76)

Kemudian dalam suratnya kepada Ny. Abendanon pada 21 Januari 1901, ia mengatakan bahwa:

“Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan...dan makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan?... Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat (Kartini, 1987:76).

Beberapa surat Kartini menghadirkan kodrat kemanusiaan yang sesungguhnya. Tegas dinyatakannya, tugas mendidik adalah kerjasama besar putra-putri Bangsa.

Seperti suratnya kepada Ny. M.C.E. Ovink-Soer 1900:

“Saya akan mengajar anak-anak saya baik laki-laki atau perempuan untuk memandang sebagai mahluk yang sama. Saya akan memberikan pendidikan yang sama untuk mereka, tentu saja menurut bakatnya masing-masing.Untuk membuat anak gadis menjadi perempuan baru misalnya saya tidak memaksanya untuk belajar, apabila ia tidak menyukai atau tidak

berbakat. Tapi untuk mengurangi haknya dengan mendahulukan kakaknya yang laki-laki, tidak akan!”
“Saya tidak dapat dan tidak mau percaya bahwa laki-laki yang beradab dan terpelajar akan segera menjauhi pergaulan dengan perempuan yang tingkat kesopanan dan kecerdasannya sederajat dengan nya. Untuk menjatuhkan diri ke perempuan yang hina”
“ Kami anak perempuan dapat berbuat banyak supaya anak muda laki-laki berjalan pada jalan yang benar”

Dalam suratnya, Kartini acap berbicara pentingnya pendidikan akhlaq. Seperti suratnya kepada Ny. Anton 1902 berikut ini:

“Perempuanlah. Kaum Ibu yang pertama-tama kali meletakkan bibit- bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia, yang biasanya tetap terkenang sepanjang hidupnya”

Tepatlah kiranya pendidikan untuk perempuan sebagai mana yang dikatakan muhammad Al- Ghazali (2003, 38).

“Baik laki –laki dan perempuan haruslah menambah wawasan keilmuan mereka, dan janganlah mereka merasa puas dengan jenis kebudayaan atau pendidikan yang mereka peroleh” (Al-Ghazali, 2003:38)

Kartini mengalamatkan kritiknya ke pemerintah yang tidak sanggup memberikan pendidikan yang layak agar masyarakat Indonesia dapat beremansipasi. Kepada Stella, suratnya bertarikh 12 Januari 1900 mengacu pada memo ayahnya kepada Indonesia (Kartini, 347):

“Kata ayah dalam notanya bahwa pemerintah tidak mungkin dapat menyediakan nasi di piring bagi setiap orang (Jawa) untuk dimakannya, tetapi apa yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan kepadanya daya upaya agar ia mencapau tempat dimana makanan itu berada. Daya upaya ini adalah pengajaran. Pemberian pengajaran yang baik kepada rakyat sama halnya dengan pemerintah memberikan obor ke dalam tangannya, agar ia menemukan sendiri jalan yang benar menuju tempat nasi itu berada” (Kartini:347)

Perempuan berperan penting dalam kemajuan kebangsaan ditulis Kartini dalam memoar Januari 1903. Tulisan itu berisi kepeduliannya terhadap pengajaran bagi rakyat:

“Siapa yang akan menolak jika dikatakan bahwa perempuan mempunyai tugas mulia untuk membentuk moral masyarakat?... kenyataannya sekolah tidak mampu membimbing masyarakat ke arah kemajuan... keinginan yang kuat untuk belajar seharusnya datang dari keluarga itu sendiri... Tetapi, bagaimana mungkin keluarga mampu memberi pendidikan yang bermanfaat jika hal paling mendasar yaitu ibu tidak mampu memberikan kepada mereka pendidikan”

Kartini bercerita pula kepada Nyonya Abendon perihal spirit memajukan bangsa lewat sepucuk surat pada 4 Juli 1903:

“Sekolah kecil kami sudah tujuh orang muridnya dan setiap hari ada saja yang mendaftar di sini!...

Kemarin seorang ibu muda datang menemui. Dengan sangat menyesal ia mengatakan bahwa ia tinggal jauh sekali dari kami; ia sendiri ingin sekali belajar di tempat kami... karena ia tidak dapat mencapainya maka ia ingin memberikan apa yang tidak dapat diperolehnya itu kepada anaknya... anak-anak itu datang ke sini empat kali dalam sepekan ... Mereka belajar menulis dan membaca, kerajinan tangan, dan memasak... Beruntung kami masih mempunyai sedikit peralatan menjahit; selama persediaan cukup, mereka mendapatkan semuanya secara gratis.

Langkah Kartini diikuti penggagas Kongres Perempuan Indonesia pertama dilakukan Siti Sunaryati Sukemi yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua aktif dalam pergerakan. Kakaknya bernama Sugondo Joyopuspito seorang tokoh pergerakan pemuda dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) dan menjadi ketua Kongres Pemuda II di Jakarta yang menghasilkan "Sumpah Pemuda". Sunaryati berkesempatan memperoleh pendidikan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) di Tuban, melanjutkan studi ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) Semarang dan mengikuti *Cursus Hup Acte* di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Sunaryati tinggal bareng Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara. Memulai hidup barunya dengan menikah bersama Ki Imam Sukemi. (Depdikbud, 1991: 39)

- a) Membantu Taman Siswa dalam segala usahanya, terutama dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewanitaan dan kesucian dalam masyarakat Taman Siswa, memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Taman Siswa.

- b) Mengadakan hubungan dengan dunia pergerakan perempuan di luar Taman Siswa, yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Wanita Taman Siswa

Raden Ayu Catharina Sukirin Harjdjodiningrat sebagai anggota pelopor Kongres Perempuan Indonesia dan sebagai pelopor organisasi Wanita Katolik juga pernah merasakan pendidikan. Pada usia tujuh tahun R.A.C Sukirin dimasukkan orang tuanya ke *Katholike Europeesche Lagere Meisjes School* milik Suster Fransiscanes Yogyakarta. Ia lulus dari *Europeesche Lagere School* (ELS) tahun 1982. Setelah lulus dari ELS, R.A.C Sukirin melanjutkan ke *Kweekschools*. Tujuan menempuh pendidikan ialah membebaskan masyarakat khususnya buruh perempuan dari perlakuan buruk pengusaha Jepang dan Cina (Depdikbud, 1991:56).

Ada juga Nyi Hajar Dewantoro. Sebelum menikah dengan Ki Hadjar Dewantoro bernama asli Raden Ajeng Sutartinah. Tamatan *Europease Lagere School* (ELS) tahun 1904, lalu melanjutkan sekolah guru dan menjadi guru bantu di sekolah yang didirikan R.M. Rio Gondoatmodjo. Ketika Suwardi (sekarang KHD) ditahan, Sutartinah memberi dorongan semangat dengan tulisannya yang disiarkan di radio ‘Komite Boemi Poetera’ atau *Alsk ik een Nederlander Was*. Pernah pula bekerja sebagai guru di sebuah *Frobel School* (Taman Kanak-kanak) di Weimaar Den Haag. Tahun 1914 saat di Jerman kedua pasangan ini mendirikan *Indonesische Pers Bureau*, yang sering memberi masukan kepada berita surat kabar di Negeri Belanda tentang peristiwa dan situasi di Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, Sutartinah membentuk

organisasi perempuan “Wanita Taman Siswa”. Mulai membina Taman Kanak-Kanak dan Taman Muda (Sekolah Dasar) dalam Perguruan Taman Siswa (Depdikbud, 1991:78). Nyi Hajar, pinjam istilah Chrislebean, “seorang bangsawan dalam hati dan perbuatan” (Dewantara, 1979). Dalam posisi sebagai pemimpin umum Taman Siswa ia mengajukan ketegasan sebagai berikut:

“Taman Siswa bukan milik satu kelompok, namun milik seluruh bangsa Indonesia. Sampailah gagasan saudara-saudara kepada kongres sebagai kekuasaan tertinggi di dalam tubuh Taman Siswa” ((*Gendenkboek*).

Dengan begitu Nyi Hajar membentengi Taman Siswa dari anasir politik yang hendak mencari profit. Ki Hajar dalam peresmian Pendopo Agung Taman Siswa bilang, betapa Nyi Hajar Dewantoro ikut “*ambuka raras angesti wiji*. Maksudnya, ikut menguat zaman dan menebar benih kebajikan (*Gendenkboek*).

Tahun 1960 Nyi Hajar bersama suaminya mendirikan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa dan menjabat rektor tahun 1965. Nyi Hajar ditetapkan sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan RI, dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. Pal. 52/61/PK tertanggal 16 April 1961. Nyi Hajar mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012/TK/1968 tertanggal 13 April 1968.

Ada pula anggota Kongres Perempuan Indonesia I yang aktif memperjuangkan pendidikan lewat karya tulis dalam surat kabar *Soeara Aisyiyah* pimpinan Siti Hajinah Mawardi. Beberapa kutipannya mengenai “kemajuan” bahwa:

“pembaca tidak salah bahwa bangsa Jawa sekarang senang terhadap kemajuan atau seang maju. Tetapi sayang mereka belum mengerti benar apa yang dimaksud dengan kemajuan itu. karena itu apabila mereka dilarang agar tidak bepergian atau berdandan (yang berlebihan), mereka akan menjawab, “Inikah zaman kemajuan”. Bila disurug menyapu lantai, mereka akan menggerutu, “Sudah mahu masih disuruh nyapu”. Apalagi bila diberi tahu bahwa ada tingkahlakunya yang tidak pantas. Seperti naik sepeda, potong polkah dan sebagainya. Mereka akan menjawab, “Kolot (kuno), Kolot!” (Depdikbud, 1991:114)

Siti Hajinah Mawardi mengingatkan generasi via tulisan berjudul “Kewajiban Kita” bahwa:

“Seperti kata seorang sarjana bahwa pengetahuan itu merupakan harta yang terbaik. Manusia mudah memperolehnya taboa khawatir dicuri orang. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan belajar di sekolah. Sebelum sekolah anak-anak belajar dari orang tua dan teman-teman di sekitarnya... Karena itu menjaid seorang ibu ituu tidak mudah, karena seorang ibulah yang akan memulai menggunggah minat anak untuk belajar. Padahal permulaan inilah yang sulit, karena apabilah salah akan berakibat fatal... Seperti contohnya pada tanaman, akan kelihatan mana yang dirawat dengan baik dan mana yang tidak. Yang dirawat dengan baik pasti subur, sedangkan yang tidak dirawat akan mati. Demikian pula halnya pada seorang anak. Karena itu para kaum ibu perlu mengetahui dua hal: (1) Pengetahuan yang lusa, dan (2) Rasa kemanusiaan dan kebangsaan. Dua hal tersebut tak dapat dipisah, karena orang yang pandapun bila tidak memiliki rasa kemanusiaan/kebangsaan pasti tidak bahagia hidupnya. Demikian pula sebaliknya memiliki perasaan saja tanpa pengetahuan juga tidak sempurna...”

Berbagai karya pendidikan diupayakan para perempuan pada masa kebangkitan nasional. Organisasi Putri Mardika dan Keutamaan Isteri telah berperan dalam pembangunan lembaga pendidikan perempuan di tanah Sunda. Selain itu, organisasi Putri Budi Sedjati di Surabaya sebagai organisasi kelompok studi pimpinan Dr. Soetomo mendirikan beberapa sekolah dan sekolah berasrama. Kegiatan pembangunan sekolah secara sadar dilakukan oleh organisasi perempuan lokal lainnya seperti Keradjinan Amai Setia di Padang, Keutamaan Isteri Minangkabau. Selain itu, juga berkarya melalui surat kabar seperti Sarekat Kaum Ibu Sumatra yaitu *Al Sjarq* (Timur), *Suara Perempuan* (Padang), dan *Perempuan Bergerak* (Medan). Adapula majalah Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan (PIKAT) yang didirikan tahun 1917 oleh organisasi PIKAT. (Rahayu, 2008: 87)

Jong Sumatera tahun 1921 volume IV menerbitkan artikel bertema “Keluarga sebagai Basis Kehidupan Nasional”. Tema otentik selaras dengan pidato “Kedudukan Perempuan Indonesia di Masyarakat” yang diungkapkan Badher Djohan (Rahayu, 2008: 95):

“Keluarga yang kokoh dan kuat adalah dasar bagi terbentuknya masyarakat yang kuat dan sejahtera... Ketika setiap keluarga di Indonesia menyadari pentingnya kesetaraan antara suami dan isteri, maka hal ini kan menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat dan meraih cita-cita bangsa...”

Keadaan pendidikan tahun 1913-1917 menunjukkan sedikit jumlah perempuan yang masuk pendidikan dan lulusan guru hanya 15 yang siap menjadi pengajar dari target 75 pengajar guru perempuan. Sesungguhnya disediakan dana 40-50 juta gulden untuk pendidikan masyarakat Indonesia, tapi kala itu pengembangan pendidikan tidak diimbangi tenaga pengajar. Pada 1919 sekolah menengah atas *Algemene Middelbare School* (AMS) memberi kesempatan kepada lulusannya melanjutkan sekolah ke MULO (setingkat sekolah menengah pertama). Bak gayung bersambut tahun 1920an perempuan muda bangkit terjadi peningkatan persentasi murid perempuan (Rahayu, 2008: 96).

Tampaklah peran pokok Nyi. Hajar Dewantara yang semula ditopang Ki Hajar Dewantara (Suwardi Syurjaningrat). Gagasan Ki Hajar senafas dengan surat Kartini yang dialamatkan Ny. Abendon diantaranya: (Rahayu, 2008: 100)

“Pada perkembangan selanjutnya organisasi perempuan pertama yaitu Putri Mardika memperjuangkan pendidikan khusus perempuan. Manfaatnya agar perempuan tidak ragu tampil di depan umum dan berguna bagi sesamanya kaum laki-laki dalam menjalankan kebutuhan hidup. Bahwa seorang ibu guru harus benar-benar menjadi seorang ibu. Ia harus dapat mendidik anak-anaknya dengan tulus, baik secara fisik maupun spiritual...”

Perkembangan berikutnya, organisasi perempuan membantu Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, organisasi kecil bergabung dalam serikat organisasi perempuan tersebut. Mereka sangat giat memperluas

kecakapan dan pengajaran bagi kaum perempuan desa dan miskin. Yang dimaksud mengajarkan kehidupan yang layak dalam berumah tangga dan keluarga (pendidikan dasar).

Memasuki periode pertengahan organisasi nasional, Aisyah organisasi perempuan bentukan Muhammadiyah, mengaktualisasikan diri untuk pendidikan dalam menghasilkan karya jurnalisme, hasil belajar perpaduan bahasa Belanda dan Melayu.

Ketika Orde Lama, usaha ditempuh Gerwani berupa pelaksanaan program PBH (Pemberantasan Buta Huruf) dan kursus-kursus dalam bidang PBH. Mereka memperbanyak anggota dan diajarkan membentuk kelompok-kelompok kecil, dan di sinilah kaum perempuan didorong aktif tentang hak-hak mereka (Diniah:125-126). Hasilnya didirikan bangunan pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak “Melati” oleh Gerwani dan TK Perwari oleh Perwari di Tasikmalaya, yang berfungsi sebagai tempat penitipan, tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh atau bertani (Diniah:127).

Gambar 4.6: TK Perwari Tasik 1952-1953. Foto sekolah di TK Perwari Tasikmalaya. Lokasi di Belakang Pendopo Tasikmalaya dan gurunya Ibu Andris.



Sumber : <http://ambas.multiply.com/photos/10/4> diakses 12 Maret 2012

Seiring perkembangannya dalam pendidikan, organisasi perempuan dapat mengeluarkan aspirasi mereka.

Hal tersebut dibuktikan dengan penerbitan majalah seperti *Api Kartini* dan *Wanita Indonesia*. Para anggota juga disarankan terus menulis artikel di media masa nasional yaitu *Harian Rakjat*, sehingga salah satu kolomnya disediakan khusus untuk isu perempuan, yakni kolom "*Ruang Wanita*".

Itu berfaedah memperluas program perjuang organisasi perempuan (Diniah).

Untuk

menggerakkan karya
perempuan Indonesia,

Sukarno sempat menyuarakan gagasannya melalui bukunya yang berjudul “Sarinah: Kewadajiban Wanita dalam Perdjongan Republik Indonesia”. Buku ini terinspirasi dari seorang pengasuhnya bernama mbok Sarina yang selalu membantu ibunya dan mengajarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Soekarno. Sukarno menekankan bahwa:

“Buat mencoba mencetuskan api idam-idaman jiwaku kepada segenap perempuan Indonesia, yang jika tiada mereka tak mungkin kita mencapai kemenangan sosial. Wahai perempuan Indonesia, buat engkaulah kitabku ini, buat engkaulah aku menggoyangkan pena, kadang-kadang di bawah sinar lilin sampai jauh di waktu malam. Sadarlah, bangunlah, bangkitlah, berjuanglah menurut petunjuk-petunjuk yang kuberikan itu...”

Pasca reformasi, ada banyak lembaga pendidikan menyuarakan perjuangan perempuan. Sejak pemerintah Abdurrahman Wahid banyak pusat studi Kajian Gender berdiri di perguruan tinggi, bahkan hingga saat ini. Beberapa ormas juga mendukung aktivitas ormas perempuan seperti Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama, sedangkan di Organisasi Muhammadiyah ada Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah yang fokus mensosialisasikan kesehatan reproduksi. Menguatkan pula pentingnya ceramah keislaman yang memuat pemikiran progresif, maju dan berkeadilan

dalam perspektif gender. Ketika program pengutamaan gender yang dicanangkan tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid mestinya program ini berhasil pada 2016. Namun tanpa diduga dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir bangsa ditimpa tekanan berupa pikiran radikalisme yang menafikan eksistensi perempuan. Hal inilah menjadi tantangan bersama agar saban masyarakat kian teguh merespon hal itu (Jurnal Perempuan).

Sinta Nur Wahid dalam acara ulang tahun suatu lembaga perempuan (Jurnal Perempuan) mengatakan bahwa jelas dalam Alquran menggarisi ayat *bismillahirrohmannirohim kunnalibasullahum wa antum libasun lahuna* (laki-laki pakaian bagi perempuan dan perempuan adalah pakaian bagi laki-laki). Sinta mengatakan, pendirian lembaga perempuan harus disesuaikan dengan budaya yang mudah diserap masyarakat seperti LSM PUAN (Pesantren Untuk Pemberdayaan Perempuan) Amal Hayati. Suatu hal penting bahwa setiap kelompok yang bias gender atau golongan konservatif mampu melihat keberagaman sebagai keutuhan sehingga kesetaraan itu mampu dicapai.

Lembaga BPPM, DIY juga menyelenggarakan program pendidikan lewat program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dimana dilakukan sesuai kurikulum standar BKKBN. Pelatihan ini diakhiri dengan *experiential learning*, sebagai pemantapan *soft skill* bagi para peserta pelatihan. Remaja diharapkan memiliki komitmen, motivasi tinggi, dan berkepribadian baik.

2. Refleksi Pendidikan Penguat Prinsip Kebangsaan Kongres Perempuan

Disintegrasi mengancam Indonesia dalam pusaran berbagai konflik kepentingan. Sebagian besar agenda politik berhaluan dengan harapan rakyat. Ancaman bahaya politik identitas dan radikalisme mengendurkan komitmen kebangsaan sehingga merenggut keutuhan negara. Bahkan hukum yang seharusnya dapat melindungi, sekarang menjadi alat propaganda yang bisa merugikan masyarakat. Di sisi lain slogan disintegrasi sudah menjadi senjata utama yang terurai berbagai bentuk seperti pemanfaatan momentum masa lalu yang suram, bencana alam dan ketidakmerataan di segala sektor. Penyebab terbesar ialah kurangnya partisipasi dan integritas para pemimpin baik lokal maupun nasional untuk menanggapi persoalan daerah yang tertinggal di Indonesia. Sikap kepemimpinan yang ditunjukkan pemerintah di parlemen belum mampu menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan.

Lembaga pendidikan menjadi salah satu sarana yang tepat untuk mencegah disintegrasi dan memperkuat sikap integritas. Berbagai lembaga pendidikan berusaha menjaga komitmennya menjadi perangkat untuk menumbuhkan kemampuan kepemimpinan dan kepekaan terhadap kemajemukan yang berkualitas bagi negara. Sangat penting menekankan pendidikan karakter lewat kemampuan kepemimpinan. Harus ada ide besar selalu memunculkan jiwa revolusioner seperti para penggagas

Kongres Perempuan melawan arus penekan bangsa dalam krisis kehidupan. Abandon dalam surat R.A Kartini menyatakan bahwa:

”Jelas bahwa kemajuan kecerdasan masyarakat Bumiputera tidak akan bisa maju pesat jika peran perempuan tidak dikedepankan. Perempuan adalah faktor penting dalam proses peradaban bangsa... Kebanyakan orang Bumiputera tidak berani menyekolahkan anak-anak gadisnya karena yang mengajar adalah laki-laki. Guru perempuan harus ada...”
(Yulianto, 2004:130)

Kemenangan moral mampu digenggam apabila proses pendidikan terarah dan sampai ke sasaran. Bersamaan dengan benih integritas yang ditabur, rasa “kebangsaan” harus pula ditanamkan sejak awal. Masyarakat harus membiasakan generasi baru untuk mampu menyikapi perbedaan dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Ruang pendidikan sebagai media *transfer of knowledge* hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam, baik latar belakang maupun basis sosio-budaya yang melingkupinya. Dengan begitu ada asa besar terhadap persatuan kembali negara Indonesia sejalan dengan terbangunnya pilar dasar pendidikan multikultural dan kemanusiaan yang digagas para pendahulu bangsa. Hal ini akan merespon anak bangsa untuk kritis terhadap situasi sosial seperti yang dilakukan LSM Perempuan, mampu menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan dan berjiwa berani seperti yang ditekankan dalam semangat integritas nasional.

Kartini dalam surat yang dibuatnya di Jepara, 15 Februari 1902 mengutip sebuah sajak milik De Genestet dalam *Terugblik* (menengok ke belakang):

*Apa yang kau citakan, perjuangkan
Seperti inginmu
Makhluk bebas, jalanmu, hidupmu
Tak kau tentukan sendiri
Terbangnya rajawali tlah pasti
Kemana kan pergi
Penguasa jagad kendalikan keperkasaan
Bak angin meniup ilalang
Siapkan daratan istanamu di udara
Di goresan peta citamu
Kenalilah jalan tuk pergi
Luas dan elok negeri ini!
Pilih takdirmu dan cari jalanmu
Seturut penglihatanmu! ...
Tapi tetap berharaplah pada Dewata berkah
Sang penuntun langkah*

Beberapa langkah bijak bisa diambil untuk menanamkan semangat integrasi kebangsaan dalam diri setiap individu untuk mempertahankan kesetaraan; Pertama, proses pembentukan integritas kemanusiaan dapat dikembangkan semenjak dini dari dalam keluarga, institusi pendidikan, maupun berbagai lembaga lain yang mengutamakan moral integritas. Kedua, setiap orang mengambil teladan dan semangat para pahlawan bangsa yang menerapkan sikap nasionalis tanpa pandang status. Ketiga, semboyan “*bhineka tunggal ika*” tidak hanya dijadikan asas namun direalisasikan secara nyata dengan dialog antar lembaga misalnya, pusat kajian gender, antar ormas agama, pertunjukkan budaya, dan

sebagainya. Keempat, mengatasi wacana yang dapat menggeser kepribadian bangsa dan berbalik pada konsep dasar yang dituangkan dalam pasal 32 UUD 1945 bahwa kebudayaan bangsa adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Kelima, para pemimpin mampu bersinergi dengan para *stakeholder* sehingga menyentuh *grass root*. Maka, warga Indonesia mampu bersandar seutuhnya pada Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan yang setara.

Menurut Kris Hapsari dan Nia Pertiwi perempuan yang lahir ke dunia adalah suatu kebanggaan, mengembang tugas sebagai ibu adalah kemuliaan, dan menjadi bagian dari warga bangsa adalah tanggung jawab besar. Bahder Djohan menekankan kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia bahwa:

”de Indonesische vrouw moet zijn naast de man, voor Land en Volk...””Door er op te wijzen dat de Indonesische vrouw er ook moet zijn voor Land en Volk, meen ik duidelijk naar voren te hebben gebracht et verschil tusschen het probleem van de positie der Vrouw hier en in de Westersche landen, en meen ik tevens de kern te hebben aangeroerd va de vraag, in welke richting wij ons hebben te bewegen om eene oplossing te vinden welke voor deze landen ten zegen zal zijn ... In de handen der Vrouw ligt de toekomst van Indonesia.””

Yang berarti bahwa...

”perempuan Indonesia harus berada di samping/ di sisi lelaki, bagi tanah air dan bangsa...” Dengan menegaskan bahwa perempuan Indonesia juga untuk tanah air dan bangsa, maka secara jelas dapatlah saya ketengahkan perbedaan antara kedudukan perempuan di negeri ini dan perempuan di negara-negara barat, sekaligus saya telah menyinggung pula pokok persoalan, ke arah mana kita harus bergerak untuk mencapai suatu penyelesaian yang

dapat memberi kebahagiaan kepada negeri ini. Di tangan perempuan terletak masa depan Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia adalah penanda awal dan simbol kekuatan perempuan Indonesia bahwa visi misi jelas ingin membangun suatu bangsa dimana cela masa lalu dapat dijadikan cermin untuk mereformasi bangsa. Amat menarik bahwa apa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda sebagai kongres pemuda yang mengawali kebangkitan bangsa telah disampaikan oleh Ny. Soekonto dari organisasi "Wanita Oetomo", Nyi Hadjar Dewantara, dan Nona Soejatin pada Mei 1927. Hal ini menandakan bahwa kebangkitan pergerakan dan pertumbuhan nasionalisme di kalangan perempuan berjalan seiring dengan pertumbuhan nasionalisme di kalangan lelaki Indonesia. Selain itu, penggunaan istilah perempuan untuk penamaan organisasi yang baru lahir. Pemakaian istilah ini menandai timbulnya kesadaran dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap kedudukan, martabat, dan harkat perempuan sehingga penamaan lebih pantas dari pada wanita. Tak heran kongres dilaksanakan sepenuh hati dan diwarnai dengan kebulatan tekad untuk membentuk perkumpulan perempuan dengan tujuan menyatukan organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia dalam bentuk perikatan dengan suasana saling menghargai.

"De harmonische samenweking tusschen ouderen en jongeren viel butingewoon op, vooral juist waar er zoo'n groot verschil bestaat tusschen hun opleidingen." Onder de jongeren waren kweekschoolonderwijzeressen, A.M.S leerlingen enz., terwijl er oude vrouwen bij waren die heelemaal ongeschoold zijn. Toch waardeeren ze elkaar.

Bij de bestuursverkiezing verwachtte ik, dat e`e`n van de onderwijzeressen als presidente gekozen zou worden, daat de jongeren sterker vertegenwoordigd, daar de jongeren sterker vertegenwoordigd waren. Doch de meeste stemmen kreeg Mevrouw Soekonto.

Bahwa:

”kerjasama yang harmonis antara para wakil organisasi yang lebih tua dan lebih muda sangat luar biasa menarik perhatian, terutama karena ada perbedaan yang sangat besar dalam tingkat pendidikan”. Para perempuan yang lebih muda merupakan guru taman kanak-kanak, para siswa A.M.S. dan lain-lain, sementara para perempuan yang jauh lebih tua sama sekali tidak berpendidikan. Namun mereka saling menghargai satu sama lain. Pada pemilihan ketua kongres saya menduga bahwa salah satu guru taman kanak-kanak tersebut akan terpilih menjadi ketua, karena para perempuan muda itu merupakan kandidat kuat. Akan tetapi, suara terbanyak memilih nyonya Soekonto”

Di zaman modern ini peran perempuan sebagai pendidik generasi dapat dirumuskan oleh Dr. Martha Tilaar yang mengemukakan bahwa generasi berkualitas dirumuskan dengan seorang yang JITU, yaitu memiliki kejujuran (J), jujur terhadap kemampuan diri sendiri dan jujur terhadap kekurangan diri maupun kelebihan orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia JITU adalah seorang yang inovatif (I) yang tidak puas dengan apa yang telah dicapainya dan selalu menginginkan sesuatu yang baru. Dia ingin mengeksplorasi kekayaan alam dan budaya yang ada di sekitarnya karena di sekitarnya terdapat berbagai potensi (*opportunity*) untuk mengembangkan suatu usaha. Manusia yang JITU adalah manusia yang tekun (T), tidak cepat putus asa

dan bukan hanya mengumpat terus tanpa bekerja. Dia adalah seorang pekerja keras yang mau menghadap berbagai tantangan atau dengan kata lain manusia tahan banting. Akhirnya dia adalah seorang yang ulet (U) yang pantang menyerah. Apabila merasa dirinya sendiri tidak dapat mengatasinya, dia membentuk jaringan dengan orang lain untuk memecahkan masalah bersama-sama. Keuletan memecahkan masalah merupakan ciri seorang yang berdedikasi tinggi terhadap cita-citanya (Tilaar, 2012:292).

Suatu bangsa akan kokoh apabila perempuan bangsa tersebut juga kokoh dalam segala hal. Kekokohan kualitas para pekerja perempuan *non-enterpreuner* (para buruh) akan mampu menjamin kualitas produksi industri tersebut. Dengan demikian, buruh perempuan merupakan bagian integral dari suatu industri terutama yang mayoritas mempekerjakan buruh perempuan (*JP*, No.18 2001:100-101).

Dalam menguatkan prinsip kebangsaan, organisasi perempuan yang berhaluan kepada lembaga non-pemerintah dan dikenal saat ini dengan Lembaga-lembaga perempuan (LSM) berjuang salah satunya untuk pendidikan anak usia dini. Lembaga GAIA mendirikan PAUD dengan dasar-dasar feminis.

Dalam tingkat perguruan tinggi perlu diperkenalkan penerapan ilmu, hasil riset, dan perkembangan bebragai cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Sementara ini pendidikan mengenai lembaga perempuan non-pemerintah atau LSM tidak dimulai dari lingkungan pendidikan formal, namun oleh berbagai LSM dan setelah 1996 dilakukan oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aspirasi Komnas HAM adalah mencetak *human rights educators* (Sadli, 2010: 358).

Sampai sekarang fasilitas latihan dan penelitaian yang penting bagi para pendidik hak asasi manusia. Kegiatan juga masih dilakukan oleh institusi-institusi atau pusat penelitian, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi HAM, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meskipun hasil kegiatannya belum secara merata dikenal atau dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada (Sadli, 2010: 359).

Setiap individu dan kelompok dapat mengimplementasikan nilai integritas dan integrasi agar komitmen akan bangsa yang utuh tidak hanya dinikmati oleh kita pada masa ini namun generasi di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa setidaknya dapat menyebarkan semangat integritas yang jujur, bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki semangat mengabdikan.

Saat ini, perempuan Indonesia telah menempati posisi yang cukup terhormat dalam segala level ataupun bidang dan didukung oleh regulasi dalam bentuk kebijakan yang mendorong perempuan untuk beraspirasi dalam ruang publik. Dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD mewajibkan keterwakilan perempuan sejumlah 30%, kemudian UU ini diperbaharui melalui UU No 10 Tahun 2008 yang diikuti dengan *zipper system*, yaitu mekanisme penentuan calon, dengan memberikan peluang lain keterwakilan perempuan bagi individu

yang ditetapkan UU, dimana apabila ada tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan (ANRI: 2012).

Partisipasi perempuan dalam berbagai bidang dalam upaya mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga merupakan bagian penting dalam membangun bangsa dan membangun kesejahteraan. Upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi dalam membangun ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, maupun ketahanan nasional yang dapat berimbang terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dengan buku ini harapan besar ialah bahwa perempuan Indonesia tak hanya sekadar menciptakan sejarah melalui Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, namun juga harus mempunyai tanggung jawab untuk mengisi sejarah pada masa-masa mendatang melalui prestasi dan dedikasi kepada bangsa. Berbagai bentuk sumbangsih perempuan Indonesia mulai dari para politisi, aktivis, pendidik, ibu rumah tangga, buruh, pekerja imigran, dan berbagai profesi lainnya sangat diburuhkan generasi bangsa saat ini. Dari Ibu lah moral bangsa kembali pada pangkuan Ibu Pertiwi.

KESIMPULAN

Dari paparan fakta-fakta di atas, dapat diunduh pemahaman historis gerakan perempuan yang sukses menyatukan visi-misi lewat Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Waktu bergelinding cepat, pasca kongres banyak dinamika dan tantangan direspon oleh barisan perempuan. Belitan budaya patriarki serta pemahaman yang dangkal terhadap kemerdekaan perempuan harus diudari dan disikapi dengan cerdas.

Buku ini membulatkan fenomena kelampauan Kongres Perempuan Indonesia yang dimaknai sebagai tonggak sejarah kebangkitan perempuan Indonesia. Dalam organisasi nasional, barisan pemuda penuh kesadaran memandang perjuangan kaum perempuan memperoleh penghidupan yang layak dan ikut membantu memajukan bangsa patut disokong. Perempuan mumpuni dan mengusung misi pembaharuan dapat membentuk perkumpulan yang bergerak pada cita-cita kebangsaan "*Handen aan den ploeg, is de beste methode*" (Persatoean Indonesia: 1929).

Ternukil pernyataan Bung Karno dalam pustaka bertajuk "Getar Gender" bahwa gerakan perempuan Indonesia dapat dipilah menjadi dua: (1) gerakan revolusioner, yaitu gerakan masyarakat menghantam penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan. Gerakan itu berproses ke arah kemerdekaan dan kebebasan, dan (2) Gerakan reaksioner, atau mempertahankan *status quo* dari situasi ketidakadilan. Aksi tersebut mendobrak kolonialisme dan ketidakadilan secara sadar maupun tidak. Ditambahi pula klasifikasi periode yang membuat dinamika pergerakan perempuan yang

tentunya secara tidak sadar mengubah komitmen KPI pada masa awal terbentuknya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Periode sebelum penjajahan, tidak/belum banyak terekam faktanya. Memang sudah dimuat dalam karya Peter Carey mengenai “Perempuan-Perempuan Perkasa” yang menyorot perempuan Jawa, namun tulisan lokal lainnya yang ada di berbagai wilayah Nusantara masih sangat jarang.
- 2) Periode 1602-1928, sifat gerakan masih individual. Hal ini terlihat dari perjuangan perempuan daerah seperti Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Meutia, Malahayati dan perempuan lainnya yang memperjuangkan wilayahnya dari penjajahan kolonial.
- 3) Periode 1928-1945, gerakan perempuan sebagai ibu, paham ibuisme melawan penjajah. Oleh karena perjuangan yang besar dan pendidikan dari kolonial membuka mata perempuan di Nusantara salah satunya Kartini, untuk menggerakkan semangat juang perempuan Indonesia sehingga lahirnya pelopor-pelopor pergerakan perempuan lainnya seperti Suyatin Kartosuwiryo, Nyi Hadjar Dewantara dan pejuang-pejuang lainnya untuk membentuk pergerakan pasca kongres pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Periode ini merupakan cikal bakal pergerakan perempuan Indonesia dengan segala dinamikanya. Kemunduran juga dialami para perkumpulan perempuan karena tekanan besar dari pendudukan Jepang.

- 4) Periode 1946-1965, gerakan perempuan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan gagasan dan program yang diperjuangkan oleh Sukarno.
- 5) Periode 1966-1980, gerakan PKK perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pada masa ini mengalami subordinasi dan domestikasi secara struktural dan massif dari pemerintahan saat itu, sehingga sangat jelas bahwa pada masa ini komitmen awal KPI menjadi pudar.
- 6) Periode 1980-1998, gerakan terpecah dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu gerakan PKK yang mendukung pembangunan dan gerakan perempuan menuju kepada keadilan gender. Ada dua macam gerakan perempuan melahirkan organisasi perempuan pemerintah (dependen) dan organisasi perempuan non-pemerintah (ornop/ non-depeden/independen)
- 7) Periode 1998-sekarang, gerakan berjaringan internasional hingga nasional menuju pada keadilan gender dan bersifat inklusif melalui peningkatan wawasan perempuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada bagian kedua menyigi lika-liku perjuangan perempuan Indonesia. Pada Kongres Perempuan Indonesia I visi-misi pergerakan menyatu dalam berbagai organisasi. KPI I berlangsung rutin sampai Kongres Perempuan ke IV. Kongres tersebut berhenti saat pemerintah Jepang membentuk konsep ibuisme yang menekan ruang gerak perempuan sehingga konsep mengenai feminisme di Indonesia sempat mengalami persinggungan diantara berbagai

organisasi perempuan. Hal yang menutup ruang gerak itu ditepis oleh Sukarno namun ada beberapa pergerakan perempuan masih belum menerima tindakan Sukarno yang memilih berpoligami bahkan ada beberapa organisasi perempuan yang menentang keputusan Presiden saat itu. Penerapan ketidakadilan pada perempuan dan domestifikasi yang terjadi pada masa Jepang terulang kembali pada masa Suharto sehingga muncul berbagai lembaga perempuan non-independen yang bergerak untuk memperkuat misi awal perempuan Indonesia seperti yang diuraikan pada Kongres Perempuan Indonesia I.

Rumusan terakhir buku ini membujuk pembaca kontemplasi seraya menelusuri perjuangan Kongres Perempuan lewat misi sosial dan pengajaran. Sederet putri-putri lahir dari rahim aktivis organisasi periode pergerakan nasional melanjutkan misi ibunya. Mereka membidani lahirnya lembaga perempuan independen. Era presiden B.J Habibie, ada lembaga Kalyanamitra, Suara Ibu Peduli, dan lembaga independen lainnya disokong penuh oleh lembaga komnas perlindungan perempuan dan anak. Bentuk lain kesadaran visi misi Kongres Perempuan dilakukan oleh lembaga GAIA yang dipandegani A.Nunuk Prasteyo dengan mendirikan PAUD. Ia diangkat Presiden Habibie menjadi komisioner di Komnas Perempuan tahun 1998, sebab membantu sahabat aktivis mendampingi korban kerusuhan Mei 1998. Juga gencar mengobati luka batin para perempuan korban kekerasan dan trauma.

Puncak kata, terminologi “kesetaraan” mengandung maksud suatu persamaan prinsip untuk memerdekakan diri, bukan mencari kelemahan dan tidak semata menuntut pengakuan diri,

namun tanpa tindakan ke arah persatuan dan keserasian. Asa terpacak, tunas muda dewasa ini peduli terhadap konsep dan realitas perjuangan perempuan. Dalam dirinya, terbenihkan juga spirit kemanusiaan dan kreativitas tanpa harus menenggelamkan sejarah bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Nunuk Prasetyo. 1998. *Organisasi Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius
- A. Nunuk Prasetyo. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Prespektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM (Buku Pertama)*. Magelang: Indosiatera
- A. Nunuk Prasetyo. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Prespektif Agama, Budaya dan Keluarga (Buku Kedua)*. Magelang: Indosiatera
- A.K Pringgodani. 1970. *Sejarah Organisasi-organisasi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- AndersUhlen. 1995. *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actor*
- Ariel Heryanto. 1996. "Indonesian Middle-Class Oppositional in the 1990s" dalam G. Rodan (ed) *Political Opposition in Industrialising Asia*.
- Bambang Sukawanti Dewantara. 1979. *Nyi Hajar Dewantara*. Jakarta: Gunung Agung
- Biro Pusat Statistik. 1996. *Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Indonesia tahun 1995*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Boekoe Pengetan (Gendenkboek) Wanito Oetomo Ing Mataram. Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922-1952*. Jogjakarta: Panitia Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun 1952

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981. *PMP SMA Kelas 1*, cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *SD Kelas V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *PMP Kelas 1*. 1986. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud dokumen sejarah nasional Jakarta. 1991. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama (cetakan 1)*. Jakarta: Depdikbud
- Depdikbud dokumen sejarah nasional Jakarta. 1991. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Cetakan 1. Jakarta. Depdikbud, h. x
- Fauzie Ridjal. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Helius Syamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Himah Diniah. 2007. *Gerwani Bukan PKI; Sebuah Organisasi Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Books
- HS Idrus. 1980. *Wanita Dulu Sekarang dan Esok*, Medan: Waspada
- Ir. Soekarno. 1963. *Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno.
- Jane S. Jaquette, 1985. "Women, Feminism and the Transition to Democracy in Latin America" *Latin American and Caribbean Research Review*. New York: Holmesd

- Jane S. Jaquette. 2003. *Organisasi Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Kalyanamitra.
- Kartini. 1987. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka, cetakan 3
- Kartowiyono. 1983. *Mencari Makna Hidupku*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kowani. 1978. *Sejarah Setengah Abad Organisasi-organisasi Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- L. Mardiarsito. 1986. *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*. Cet. III. Ende: Nusa Indah
- Locher-Scholten, *Women an the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Nederlands Indies 1900-1942*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.. (dalam *Penghancuran Organisasi Perempuan* oleh Saskia EW)
- Marie Ovink Soer. *Persoonlijke Herinnering aan Raden Adjeng Kartini hal. 26-27*, dikutip dalam Sitisomandarari Soeroto *Kartini Sebuah Biografi*, Jakarta (PT. Gunung Agung 1984), h. 355
- Muhammad Al-Ghazali. 2003. *Wanita di Persimpangan Islam dan Tradisi Cetakan 1*. Jakarta: MUSTAQIM.
- Nana Nurliana. 2000. *Organisasi Perempuan di Amerika*, Jakarta, Jurnal Perempuan (untuk pemecahan dan kesetaraan 14), h. 16

- Nani Soewondo-Soerasno. 1955 *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Djakarta: Timun Mas.
- Nani Suwondo. 1981a. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia.
- Rambe. 1983. *Sujantin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku*. Jakarta: Sinar Harpaan.
- Ruth Indiah Rahayu, *Sejarah Perempuan Indonesia; Organisasi dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok, 2008.. dengan judul asli *The Indonesian Women: Struggles And Achievement* oleh Cora Vreede-De Stuers, Mouton & Co, s'Gravenhage, 1960
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Saskia E. Weiringa, *Penghancuran Organisasi Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, Yogyakarta, Galang Press, Cetakan 1, 2010
- Saskia Weirenga, *Kuntulanak Wangi: Organisasi-organisasi Indonesia sesudah 1950*, Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1998
- Sitisoemandari Soeroto, 1984. *Kartini dalam Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, hal. 65
- Slametmuljana, *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*. Jakarta, PN Balai Pustaka, 1964, hlm 61
- Subagyo. (2010). *Paradigma Pedagogi Reflektif Mendampingi Peserta Didik Menjadi Cerdas dan Berkarakter*. Yogyakarta: Kanisius
- Sukanti Sueyochondro, *Potret Organisasi-organisasi Wanita Indonesia*, Jakarta, Rajawali, cetakan I, 1984.

- Sulami, WF. Wertheim, dan Sri Suharti, *Kebenaran Tentang Gerwani; Aspek Gender Rezim*,
- Sulastin Sutrisno, penerjemah “*Surat Kartini kepada Stella, 25 Mei 18 99*”,. Surat-Surat Kartini Renungan Tentang dan untuk Bangsaanya”
- Surat Kartini kepada Ny. Abendanon Agustus 1900. Kartini Surat-surat Kepada Ny. R.M Abendanon dan suaminya. (Jakarta: KTLV. Penerbit Djembatan. 1992. Hal.21
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Perempuan Pertama; Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sutopo. H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Tori dan Terapannya* Canva.com link pembuatan media poster
- Suwondo, Nani. 1981a. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia.
- Tahiro. 2003. *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*. Lembaga Humaniora.
- Tilaar. 2012. *Klaedoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas, h. 292
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I. Jakarta, Balai Pustaka dan Depdikbud, 1988, h. 670
- Topik media “Pekerja PT Rimba Asritama Tuntut Keadilan”, Suara Karya 26 Agustus 1999
- V. Ita Yulianto, *Aku Mau: Feminisme dan Nasionalisme*; Surat-Surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar (terjemahan dari *On Feminism and Nationalism Kartini’s Letters to Stella*

Zeehandelaar 1899-1903), , Yogyakarta:

IRBPressUSD, 2004, hlm 130

Vreede-de Stuers. 1960. *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*, Den Haag: Mouton

Vreede-de Stuers. 1960. *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*, Mouton: Den Haag, 1960, h. 95

Vrouwengroep Komite Indonesia (tanpa tahun), *Indonesische Vrouwen in Beweging 1949-1965*, Amsterdam: Vrouwengroep Komite Indonesia.

Yanti Muchtar, *Organisasi Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru...* dalam *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, Jakarta Selatan, 1993, h. 7-8, 10, 11

Sumber Jurnal dan Makalah

Artikel Kasim, Misma. *Realitas dan Agenda Organisasi Perempuan dalam Organisasi Prodemokrasi*

Artikel Marhaeni, A.A.I.N. *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Prespektif untuk Studi Gender ke Depan*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Artikel, Sekretariat Negara Republik Indonesia, h.1

Brigida Intan. 2012. *Gerakan Perempuan dalam Tekanan Politik Rezim Orde Baru*. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan Jurnalis* (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, The Asia Foundation, 2000)

- Jurnal Perempuan edisi 7 Mei- Juli 1998
- Jurnal Prisma Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an, oleh Ruth Indiah Rahayu, h.39
- Jurnal Prisma Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an,
Makalah MM Bilah yang dimuat dalam Sabastian Saragih,
Membedah Perut LSM, Jakarta, Puspaswara, 1993.
- Mansour Fakhri, Organisasi Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia... dalam Majalah Unisa “Demokrasi & Formasi Sosial”, No.34/XIX/II/1997, hlm 73
- Meutia Hatta Swasono, Sekretariat Negara Republik Indonesia, website resmi, Jakarta, Senin 6 Februari 2012
- Murniati, Januari-Februari 2006. Organisasi Sosial Baru. Basis, No. 01-02, tahun ke-55, h.28-29
- Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu pegawai negeri sipil
- Perikatan Perkoempulan Istri Indonesia, “Nomor Kongres PPII 1932, Istri, Maret-April, No, 11-12, 1932 88 hlm
- Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan, oleh A.A.I.N Marhaeni, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Dinamika Wanita Indonesia: Seri 01; Multidimensional, Cetakan 1, Jakarta, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Mei 1990, hlm 127

- Rahayu, R.I. Politik gender Orde Baru: tinjauan organisasi perempuan sejak 1980-an. Prisma 15(5), Mei 1996, hlm 29-42.
- Rahayu, Ruth Indiah. Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an, dalam Prisma, dalam LP3ES, No.5 Tahun XXV Mei 1996
- Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi, Irwan Abdullah,.. dalam Prisma edisi 6 Juni 1995, hlm 45
- Robinson.R., Molenda.M., & Rezabek.L., (2008). Facilitating Learning. In A. Januszewski & M.Molenda (Eds.), Educational technology: A definition with commentary. Mahwah, NJ: Lawrence Elbaum Associates.
- Ruth Indiah Rahayu, Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an, dalam Prisma, Jakarta, LP3ES, No.5 Tahun XXV Mei 1996, hlm 42
- Santayasa, I Wayan. (2007). Makalah Workshop Media Pembelajaran bagi Guru-Guru SMA Negeri Banjar Angkan pada tanggal 10 Januari 2007. Banjar: Angkan Klungkung.
- Susmanto. 2001. Buruh Perempuan Indonesia; Sebuah Catatan Pendahuluan, *Jurnal Perempuan*. No. 18, h.85, 87, 100-101

Arsip

- Bisnis Indonesia (BI). 17 September 2000
- Harian Rakjat, 15 dan 29 Januari, 30 September 1965
- Harian Rakyat, 17 September 1958, h. 2

Harian Rakyat, 30 Januari 1960, h. 2
Kartini Door duisterni tot licht, h. 347
Kompas, 12 September 2000
Kompas, 26 Agustus 1999
Kompas, 29 Agustus 1999
Kompas, Keadaan Angkatan Kerjadi Indonesia Agustus 2000, BPS:
2000
Majalah fakultas filsafat, Majalah Filsafat dan Teologi, Bandung,
Universitas Katolik Parahayangan IISN 0852-0089, edisi April
1997, hlm 43
Media Indonesia (MI), 12 April 2001
Media Indonesia (MI), 5 Mei 2001
Rakyat Merdeka, 8 September 1999
Rakyat Merdeka, 9 Mei 1999
Republika, 13 Juli 1999
Republika, 18 Agustus 2010
Republika, 24 Agustus 1999
Republika, 6 Mei 1999
Suara Karya, 14 Mei 1999
Suara Karya, 17 Juni 1999
Suara Karya, 6 Desember 2000
Suara Pembaharuan, 28 April 2001

Sumber Web

[http://: SETNEG.GO.ID](http://SETNEG.GO.ID), dalam artikel Sekretariat Negara Republik
Indonesia, diunduh 31 Oktober 2011, h. 1

[http://: SETNEG.GO.ID](http://SETNEG.GO.ID), dalam artikel Sekretariat Negara Republik Indonesia, diunduh 31 Oktober 2011, h. 1 <http://penilaian-terhadap-organisasi-organisasi-perempuan.com> diakses tanggal 17 April 2012

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

Informan 1:

Nama : Dr. Baskara, T. Wardaya, S.J. M.Hum.
Alamat : Kampus 1, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta
Pekerjaan : Penulis, Peneliti dan Dosen Pasca Sarjana
Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
Usia :
Tanggal Wawancara : 2 Oktber 2017

Informan 2:

Nama : A. Nunuk Prasetyo Murniati
Alamat :
Pekerjaan : Pengasuh Padepokan Perempuan “GAIA”
Usia : 76 tahun
Tanggal Wawancara : Senin, 14 Oktber 2017

HASIL WAWANCARA I



Gambar L 1: Wawancara dengan Dr. Baskara, T. Wardaya.

1. Romo saya mendapatkan penelitian dengan memakai konsep kebangsaan, kira-kira konsep apa yang belum dipahami generasi saat ini terkait konsep kebangsaan?

Secara historis perlu dipahami bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun juga banyak perempuan yang terlibat di dalamnya. Jika yang dimaksud perjuangan kemerdekaan hanya angkat senjata atau bamboo runcing, memang seakan-akan lelaki. Namun lebih dari itu kaum perempuan juga ikut serta, seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, dan Kartini. Perjuangan 1945-1949, perempuan sangat penting untuk penyampai pesan dan penyamar, hanya saja peran mereka tidak tercatat secara eksplisit, Jika dalam ingatan

masyarakat itu ada. Itu yang pertama harus kita sadari sebagai bangsa atau secara khusus generasi muda di Indonesia. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat tercapai karena peran serta baik para pejuang laki-laki maupun para pejuang perempuan. Oleh karena itu pemuda bangsa saat ini bahwa kebangsaan hasil perjuangan bersama baik pemuda dan pemuda atau sukarelawan dan sukarelawati hanya saja perannya agak sedikit berbeda di front, saya kira sama pentingnya perjuangan itu dan perlu diketahui masa muda saat ini.

2. Menurut Rm. Apa yang membuat Negara kita seakan jauh dari rasa persatuan, karena beberapa permasalahan seperti radikalisme, separatism, terorisme, pragmatism yang seakan-akan semakin menjauhkan bangsa kita dari kemajuan, kesetaraan, dan kesejahteraan?

Saya kira persoalan kebangsaan dengan segala tantangannya perlu dilihat dari segi internal maupun eksternal tetapi juga jangka pendek sekaligus masa-masa sebelumnya jangka panjang. Secara internal sebagai bangsa baru terwujud, sebelum itu nusantara berbeda-beda meski sudah disatukan Majapahit atau Sriwijaya dengan memakai konsep Negara saat itu, jadi belum ada konsep kesatuan yang solid karena baru berupa upeti dan bukan sistem yang terpusat. Sebagai bangsa kita memiliki etnis, bahasanya, agama dan pulaunya yang banyak. Sehingga rasa kebangsaan itu sulit disatukan karena plural dan butuh perjuangan. Harus ada sinergi dan usaha terus menerus untuk mempertahankan kebangsaan yang utuh.

Dari segi eksternal batas-batas politis bukan satu-satunya yang bisa membatasi Negara ya.. karena dari satu tempat bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai tempat jadi informasi atau pengetahuan dan ideology bisa lintas *border*. Jadi jika ada ideology yang sifatnya trans-nasional entah lewat Negara maupun agama itu mudah terbentuk paham baru dan menjadi tantangan kebangsaan kita.

Sesungguhnya kebangsaan sejak awal sudah mendapat tantangan, misalnya pemberontakan daerah tahun 1956-1958, ada separatism di Maluku, dan DI/TII di Jawa. Pemberontakan itu bisa diatasi sebagai bangsa. Namun untuk jangka pendek ada juga ideology trans-nasional yang sudah masuk ke Indonesia, radikalisme masuk di situ dengan memakai kendaraan agama. Jika ingin membangun kebangsaan harus diperjuangkan dari beberapa segi tersebut; 1) dari dalam negeri; 2) ada penyaringan dari luar negeri; 3) dan ada kegagalan-kegagalan masa lalu dari beberapa pihak yang harus diatasi; 4) juga kelompok-kelompok radikal yang harus ditindak tegas. Jika tidak akan terancam Negara kita sebagai bangsa, sama seperti Negara lain yang mempunyai masalah yang sama seperti Yugoslavia dan Negara-negara Timur Tengah dimana konsep kebangsaannya masih kacau atau “gagal” mengelola rasa kebangsaan.

3. Apakah ada rekomendasi dari BPIP agar generasi saat ini semakin mempererat keutuhan bangsa dengan nilai-nilai Pancasila?

Salah satu yang luarbiasa yang diahsilkan oleh para pendiri republic ini adalah Pancasila sebagai dasar Negara sebagai cara

pandang dunia (weltanचाung) bangsa dengan Pancasila. Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia merupakan produk dan rumusan yang luar biasa, dari transenden dan imanen. Transenden hubungan terhadap Indonesia, dunia dan dengan Tuhan. Misalnya kemanusiaan bukan saja masalah internal bangsa Indonesia namun sila ke-2 khususnya “kemanusiaan yang adil dan beradab” menyangkut masalah global. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi saya kira juga penting untuk dunia. Dunia juga membutuhkan Pancasila dan itu disadari oleh Bung Karno. Dunia membutuhkan prinsip Ketuhanan sebagai masyarakat yang beragama, prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sangat dibutuhkan masyarakat dunia. Oleh karena itu Pancasila harus menjadi semacam rumusan bukan hanya Indonesia dan kontribusi Indonesia untuk dunia. Tidak semua Negara seberuntung Indonesia yang memiliki Pancasila, meskipun ada konstitusi, dan kita memiliki preambul ini. Bung Karno dulu memperjuangkan itu, ada sidang BPUPKI. Bung Karno juga memberikan kuliah Pancasila, bahkan ketika ibu kota sementara berada di Yogyakarta. Kuliah dilakukan melalui radio, hanya saja Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan. Oleh karena itu mari kita kembalikan diri kita kepada Pancasila, dan sebaliknya. Itu merupakan dasar hidup dan pandangan kita, dan kontribusi kita kepada dunia internasional. Itulah tugas BPIP yaitu menyatukan, mengembalikan mengajak masyarakat sadar akan semua hal itu. Namun Pancasila bukan dianggap sebagai pusaka yang sakti dan disembah, namun perlu didiskusikan dan

diperdebatkan, maka lembaga BPIP penting untuk menyatukan kita, melihat bangsa kita banyak paham-paham baru yang masuk.

4. Saya mencoba menghubungkan konsep kebangsaan dengan peran Ibu yang semestinya mampu membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas, bagaimana pendapat Romo dilihat dari segi historis?

Ibu dalam konteks kebangsaan sangat penting, wong kita menyebut tanah air kita bukan “bapak pertiwi” tetapi “ibu pertiwi”. Ibu dalam bahasa lebih bersifat mengayomi, dan mendidik dari dalam. Anak-anak pendidikan berasal dari Ibu dan mengelola mendapampingi kita dari berbagai hal. Oleh karena itu, peran ibu sangat penting. Karena di tangan ibulah generasi muda mulai dididik dibina dan disadarkan rasa kebangsaan, itu dari segi personal.

Ibu sebagai perempuan dalam revolusi sungguh besar. Ibu-ibu ini pada masa Bung Karno memiliki andil yang begitu besar dari pemberantasan buta huruf hingga Kongres Internasional, itu Ibu-ibu muda banyak, pemuda pemudi Indonesia malang melintang. Hanya saja pada tahun '65 organisasi ini dihapus, seperti Gerwani yang dianggap sebagai pengikut PKI. Namun sebenarnya organisasi-organisasi perempuan termasuk Gerwani, merupakan organisasi terbuka peran politiknya yaitu dalam melawan pemberantasan buta huruf dan poligami. Ada semacam domestifikasi terhadap peran perempuan. Maka di masa kini saatnya membuat peran perempuan itu kembali pada posisi semula yang setara dalam membangun bangsa.

5. Bagaimana dinamika perjuangan peran perempuan dalam bidang sosial dan pendidikan...

Saya tidak memiliki statistiknya atau datanya. Singkat kata, perempuan punya peran besar di tingkat menengah dan pendidikan dasar. Dari sekian banyak kaum perempuan memilih profesi guru. Ini dasar membangun fondasi pendidikan anak. Yang sabar kan orang seperti Kartini dan Dewi Sartika, tidak Bapak-bapak. Saya menduga peran Ibu-ibu sangat luar biasa.

HASIL WAWANCARA II



Gambar L. 2.1: Wawancara dengan Bu Nunuk

Peneliti: Apakah Ibu masih aktif di kegiatan lembaga-lembaga sosial?

Bu Nunuk: Saya masih aktif di organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan, di Komnas Perempuan. Sekarang pekerjaan saya sehari-hari aktif mengasuh Padepokan Perempuan “GAIA” yang kami lahirkan bersama kawan-kawan aktifis pada tahun 1996. Tahun 1990 kami juga melahirkan lembaga pendamping swadaya masyarakat (LPSM) “YABINKAS”, yang sekarang menjadi gerakan swadaya masyarakat di Kulonprogo. Gerakan ini membentuk Perkumpulan Badan Musyawarah Masyarakat (BMM) bernama “Mitra Anak Sejati”.

Saya bersama suami (Bpk. Sutjipto, alm) melahirkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) berperspektif feminis bernama Ananda Mentari.

Di Pepokan kegiatan kami belajar feminisme, dalam bentuk diskusi, kursus konselor dan kepemimpinan feminis, serta konseling feminis. Dari dulu sejak tahun 1974, ketika saya menjadi ketua komisi pastoral keluarga kevikeyan DIY, saya sudah menjalankan konseling keluarga. Yang datang konseling kepada saya dulu ibu-ibu karena masalah keluarga, kalau sekarang adalah para perempuan korban kekerasan. Pelayanan ini berada dibagian Woman Crisis Center (WCC) “Suara Nurani Perempuan. WCC ini berjejaring dengan Komnas Perempuan, karena datanya diminta untuk dikumpulkan dimasukkan dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan, yang keluar setiap tg. 8 Maret tiap tahun.

Saya diangkat Presiden Habibi menjadi komisioner di Komnas Perempuan pada th. 1998, karena membantu kawan2 aktivis mendampingi korban kerusuhan Mei 1998

Intan: visi KPI mengalami pasang surut dan mengalami dinamika dengan organisasi, apakah bisa teratasi lewat LSM juga.
Bu Nunuk: Kongres Perempuan sejak dulu tidak pernah memperoleh kesepakatan, selalu ada perbedaan pendapat dan pandangan, seperti misalnya mengenai poligami. Pada masa presiden Bung Karno ada peraturan pemerintah yang mengharuskan ormas berada di “underbow” partai. Menanggapi peraturan ini kaum perempuan Indonesia juga mengalami perbedaan pendapat. Pada waktu itu Partai Komunis

menginginkan GERWANI sebagai onderbow PKI. Tetapi tidak seluruh anggota GERWANI setuju. Maka GERWANI memutuskan untuk Kongres pada bulan Desember 1965. Tetapi sebelum kongres terjadi pecah tragedi “30 September 1965”. Maka muncul fitnah untuk GERWANI. Menurut pendapat saya, visi misi KPI memang dilanjutkan oleh LSM-LSM Perempuan, tetapi secara sporadis. Tetapi sekarang perjuangan isu perempuan dilanjutkan oleh Komnas Perempuan.

Peneliti: Kongres menjadi tidak ada lagi salah satunya karena itu?

Bu Nunuk: Kongres yang pada waktu itu diwadahi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) menjadi kacau, sehingga organisasi perempuan independen yang bergabung dalam KOWANI mengurangi kegiatannya (nggembos, low profile), karena fitnah terhadap GERWANI membuat organisasi perempuan lainnya takut. Bung Karno mempunyai konsep bahwa soko guru Negara itu adalah pemuda, perempuan, buruh, tani, dan nelayan. Antara lain kan perempuan, maka Bung Karno mendorong gerakan perempuan. Inilah sebabnya gerakan perempuan sangat ditakuti oleh para pejabat dan politisi pada zaman Pak Harto. Strategi Pak Harto semua potensi soko guru tadi dibuat nggembos, kacau atau caos termasuk perempuan. Maka munculah politik “menjinakkan perempuan” seperti sama yang diperbuat oleh penjajah Jepang yang membentuk organisasi FUJINKAI, sebagai organisasi dependen, yaitu organisasi perempuan karena dia sebagai istri. Itulah yang menyebabkan organisasi wanita independen seperti wanita marhein, wanita katolik, wanita taman

siswa, perwari, wanita islam, dll akhirnya low profile atau nggembos. Penggembosan organisasi perempuan independen ini mempengaruhi pudarnya visi misi kesatuan organisasi tersebut (KOWANI). Beberapa teman perempuan yang aktif pada tahun 70-an yang melahirkan LSM-LSM Perempuan itu adalah putri-putri ibu-ibu perempuan yang aktif dalam organisasi perempuan independen, seperti Ibu saya dan saya selalu mengikuti jejak Ibu saya. Saya bersama teman2 aktivis kristiani (Katolik dan Protestan), melahirkan Kelompok Perempuan Sadar (KPS)

Beberapa pemuda yang bertransformasi, masuk KOWANI menjadi dependen (berpihak pada pemerintah) karena organisasi isteri. Pada tahun 2003, ketika memperingati 75 tahun Kongres Perempuan Indonesia, di UC UGM perempuan-perempuan muda mengadakan kongres perempuan versi anak-anak muda untuk mengembalikan forum organisasi perempuan independen. Saya mendapat tugas memimpin sidang terakhir, yang memutuskan lahirnya KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI). Tetapi sayang Koalisi Perempuan Indonesia dalam prosesnya berubah bentuk dari Forum menjadi organisasi anggota. Jadi tujuan semula akan meluruskan KOWANI, terjebak menjadi organisasi anggota sampai sekarang.

Sebenarnya sejak kami pulang dari Pertemuan Perempuan Internasional di Beijing 1995, kami sudah menyadari bahwa cara melakukan gerakan perempuan di Indonesia tidak sinergis, kami bekerja sendiri sendiri dan berakibat saling tabrakan. Kongres perempuan kaum muda tahun 2003 yang bertujuan membentuk Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yaitu kumpulan

lembaga organisasi yang independen dan mengembalikan gerakan feminisme yang sudah dirintis para pendahulu, menjadi tidak tercapai. KPI menjadi tidak jelas dengan visi dan misi organisasi perempuan independen. Zaman Bung Karno gerakan feminisme didukung. Jika kita mau mengikuti pandangan Bung Karno, ini bukan berarti saya pro Bung Karno. Ia paham kekuatan perempuan “kekuatan feminis” (bukan perempuan yang dibuat oleh penguasa, dan demi kepentingan politik penguasa), tetapi mereka mitra kerja untuk berjuang bersama laki-laki, prinsip ini juga nampaknya dilakukan oleh Jokowi yang memahami dan menghargai kekuatan perempuan.

Saya semenjak kecil ikut Ibu yang aktif di organisasi Wanita Katolik saya ikut kursus politik Bung Karno di Gedung Agung, ada pula Nyi Hajar Dewantoro yang ikut. Saya ingat sekali Ibu SK. Trimurti tanya soal nasib buruh perempuan kepada Bung Karno, Bung Karno menanggapi bahwa nanti ibu SK. Trimurti akan dijadikan Menteri Perburuhan, dan sungguh beliau menjadi Menteri Perburuhan. Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang bermunculan pada tahun 70-an, adalah LSM Perempuan yang dilahirkan oleh putri-putri ibu-ibu aktivis organisasi perempuan independen. Visi dan misi para ibu ini dilanjutkan oleh anak dari para aktivis perempuan itu misalnya yang melahirkan lembaga Kalyanamitra itu Ibunya juga aktif dalam organisasi pada masa kemerdekaan. Lalu ada Rifka Anisa, Yasanti, Solidaritas Perempuan, dll. Saya mengalami itu karena saya selalu ikut dengan Ibu yang aktif. Lalu muncullah LSM-

LSM itu sebagai generasi penerusnya. Saya sendiri melahirkan Kelompok Perempuan Sadar (KPS) yang kemudian menjadi Padepokan Perempuan “GAIA”.

Setelah Konferensi Perempuan Internasional di Beijing, kami berkumpul bersama para LSM-LSM dan dikoordinir oleh Ford Foundation difasilitasi oleh Mansur Fakih. Kami melakukan refleksi, perjuangannya seperti apa dan memahami anti kekerasan terhadap perempuan karena selalu datang dalam pertemuan Internasional di Nairobi dan Beijing. Mansur Fakih mengatakan bahwa perjuangan perempuan kita itu kok tidak sinergis ya... Lalu kita berpikir sebaiknya kita membuat skala preferensi berdasarkan yang paling mendesak bagi kepentingan perempuan Indonesia . Akhirnya kita memilih isu kekerasan terhadap perempuan, memperkuat gerakan perempuan, dan isu perempuan dan agraria. Maka kita membuat strategi yang sinergis untuk isu-isu tersebut. Saya ditugaskan untuk mengelola isu gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kami membentuk Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (GAKTPI), ini terjadi tahun 1996, bentuknya Forum LSM Perempuan. Ketika gerakan ini sedang melakukan kegiatannya, terjadilah kerusuhan Mei 1998. Kawan-kawan aktivis di Jakarta meminta saya turut mendampingi perempuan korban kerusuhan tersebut. Ketika itu kami beramai-ramai menghadap Presiden Habibie untuk membentuk lembaga negara yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Saya bergabung dengan mereka, dan saya ikut diangkat oleh Bapak B.J Habibi untuk menjadi komisioner Komnas Perempuan.

Ternyata Visi misi Komnas Perempuan sama dengan visi dan misi GAKTPI. Berarti memperjuangkan visi misi ini lebih kuat kalau di bawakan oleh lembaga Negara, sehingga taringnya jauh lebih kuat dibanding GAKTPI yang hanya kumpulan/forum LSM. Maka GAKTPI melebur menjadi KOMNAS Perempuan. Ternyata cara pandang feminis belum banyak meluas dikalangan kaum perempuan Indonesia. Pandangan anggota komisioner Komnas Perempuan pun masih perlu disatukan pandangannya. Maka juga tidak mengherankan kalau cara pandang memperjuangkan isu-isu perempuan antara Komnas Perempuan dengan kementerian pemberdayaan perempuan masih jauh berbeda. Saya tidak menisbikan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga berproses untuk berubah, artinya makin memahami isu perempuan perspektif feminis. Peneliti: Apakah di KPI pertama visi misinya berbeda juga..

Bu Nunuk: Menurut saya tidak. Kalau kita baca sejarah pergerakan perempuan Indonesia KPI I sudah menentukan tujuan perjuangan untuk kemerdekaan manusia, maka mulai menggarap masalah sosial. Kalau tidak salah isu pokok yang digarap adalah isu buruh perempuan, perdagangan anak-anak perempuan dan pendidikan perempuan. Namun dalam proses, karena terjadi banyak friksi, KPI tidak lagi fokus pada masalah sosial, tetapi bergeser lebih dominan kepada masalah politik dan ekonomi. Misalnya saja Wanita Katolik pada masa kemerdekaan masih menjalankan program mendampingi perempuan buruh pabrik rokok di Tarumartani, Yogyakarta, mendampingi perempuan korban perdagangan di Lasem. Nah mengapa

program semacam itu makin mengalami distorsi. KPI pun juga mengalami distorsi visi misi, seperti misalnya tidak lagi membahas masalah-masalah pernikahan dini, perdagangan perempuan, buruh perempuan dll, seperti pada KPI Pertama. Nah padahal pendahulunya menentukan visi misi kebangsaan, kemerdekaan, dan anti kekerasan, jadi ada distorsi, seharusnya ada energy atau roh perjuangan yang berlanjut. Energi itu roh, yang disalurkan dengan wawanrembuk, perjumpaan dengan para aktivis-aktivis pendahulunya secara berkesinambungan, bukan hanya mengikuti kepentingan penguasa yang tidak berpihak pada perempuan. Saya senang beberapa waktu yang lalu ada 10 mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan, datang menemui saya untuk ngobrol tentang Feminisme dan perjuangannya. Dalam perbincangan ini pasti ada aliran energi (roh/spirit) dari saya ke mereka perempuan muda. Harapan saya energy saya ini juga mengalir kemudian dimiliki generasi penerus.

Poligami dan femnisme tidak ada kaitannya. Jika kita bicara feminism saya mengajak berteologi interfaith, saya membahas feminisme adalah berkaitan dengan kedaulatan perempuan yang ada dalam masyarakat jauh sebelum manusia menciptakan keluarga dan agama. Spritualitas pada waktu itu adalah hubungan langsung antara manusia dan Sang Mysteri (Sang Pencipta). Kedaulatan perempuan pada waktu itu hilang ketika budaya patriakhat muncul. Munculnya budaya patriakhat ini akibat dari lahirnya keluarga somah dalam kehidupan manusia. Persoalan poligami itu menyangkut ajaran agama yang dibuat manusia, jadi tidak ada kaitannya dengan spiritual atau teologi

feminisme. Mengapa Bung Karno berpoligami karena agama Islam membolehkan poligami. Seperti lahirnya keluarga itu untuk kepentingan siapa. Untuk mengetahui hal ini silahkan membaca buku Frederick Engels “The Original of Family, Private Property and the State”. Seperti Bung Karno pernah menyinggung soal kawin ombyo’an, sebelum ada kawin somah. Kepentingan itu kepentingan siapa yaitu kepentingan laki-laki yaitu kapitalis. Pemikiran kapitalisme muncul ketika manusia menghadapi ternak yang berkembang secara akumulatif. Manusia lalu memikirkan soal warisan. Hal ini dapat juga dibaca dalam buku “Sarinah” bung Karno.

Peneliti: LSM yang menunjang pendidikan seperti apa.

Bu Nunuk: Mahasiswa saya pernah menulis buku pendidikan berdasarkan pengalaman. Buku itu ada di perpustakaan saya. Menurut pendapat saya dasar pendidikan adalah belajar hidup merdeka dengan membiarkan hanya Sang Mysteri yang “berkuasa”. Bagaimana hidup dengan baik (adil dan damai) bagi dirinya,. sesama manusia dan seisi alam semesta. Dasar-dasar ini dapat diuraikan. Sekarang budi pekerti tidak ada, orang memikirkan orang lain jarang. Saya dulu di Sanata Dharma memberikan kuliah Etika, dulu ruang saya dekat Rm. Kundjana dan saya sering dipanggil, beliau berkata : “kamu itu kalau memberi kuliah centha-centhe, panjang lebar, tetapi intinya hanya satu yaitu memperhatikan kebutuhan orang lain”. Maka saat menjadi guru harus ada perjumpaan personal. Guru tidak hanya menjalankan fungsi/tugas, tetapi harus berperan merubah muridnya. Etika bukan etiket yang diartikan sopan santun

misalnya cium tangan, tapi lebih menanamkan bagaimana melihat kebutuhan orang lain dan berelasi saling menghargai dan menghormati. Bagaimana berbuat adil ketika berelasi dengan diri sendiri, dengan sesamanya, dan lingkungan hidupnya. Pendidikan Usia Dini harus holistik, artinya pendidikan “induk”, menyangkut kehidupan secara utuh. Elemen kehidupan adalah fisik, psikis dan juga roh/spirit. Pengertian spirit lebih luas dan dalam daripada pengertian agama. Misalnya fasilitas terhadap kebutuhan anak-anak PAUD secara jasmani harus dipenuhi. Pendidikan jasmani berarti menyangkut makanan yang harus masuk kedalam tubuh anak2 balita, jadi harus memasukkan makanan atas dasar ilmu enzim. Konsep-konsep seperti sebenarnya mendidik anak harus holistic tidak hanya intelektualnya. Harus dipenuhi afektifnya dan kreatifitasnya. Banyak anak yang dipaksa oleh Ayah ibunya, jika ada relasi kurang baik terhadap orang tuanya jadi banyak anak yang stress, maka saya berusaha membangun kembali anak itu menjadi hidup secara utuh dan merdeka. Ideologi Gender berproses melalui Gendering itu sesungguhnya adalah konstruksi sosial budaya, membentuk setiap manusia sesuai dengan kepentingan sosial budaya lingkungan hidupnya. Namun masih banyak orang memahami gender sebagai isu perempuan saja. Orang dibentuk oleh sosial budaya sehingga jati dirinya teralinesasi. Jati dirinya hilang. Maka orang bisa jadi baik dan buruk adalah akibat dari bentukan sosial budaya tersebut. Menurut pendapat saya pendidikan harus memasukkan wawasan gender, dan pluralisme sebagai realitas hidup. Nah ini perlu kerjasama dari kita semua

termasuk para perempuan, pendidik dan apalagi pemimpin yang perilakunya sudah ditandai dengan kehilangan jati diri.

Bagaimana caranya memberi kesadaran bagi generasi saat ini bahwa ada media seperti lembaga-lembaga sosial perempuan yang mempunyai visi dan misi keadilan dan perdamaian. Kalian pilih yang mana untuk membangun komitmen bersama untuk membangun cita-cita bangsa masyarakat adil dan damai.

Ini saya sendiri mengalami permasalahan itu, ketika saya bekerja dengan teman-teman muda dan ada saja friksi-friksi dengan saya juga, dan saya harus menyesuaikan. Misalnya Bu mbok pelajaran ibu itu dimasukan youtube, wah saya tidak bisa, kamu saya yang buat saya yang buat konsepnya. Bu yang datang hanya sedikit bagaimana kalau diskusi kita di streaming (rekam video) biar banyak yang mengikuti”. Bagi saya mau banyak atau sedikit saya gak masalah, yang penting kita bisa tatap muka dalam berdiskusi, tapi bagi generasi saat ini bermasalah, karena mereka mengabaikan nilai perjumpaan antar manusia. Misal lagi minta bahan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan ditayangkan hanya dalam waktu 3 menit dan diupload di youtube, ya saya bingung karena dibenak saya tidak dapat mikir bahan yang begitu banyak harus diperas menjadi bahan ditayang 3 menit. Maka saya bertanya kepada mereka saya jelaskan bahwa bahannya itu banyak, jadi kamu pilih mau bicara bentuk2 kekerasan, kuratif atau pencegahan. Itu cara saya supaya generasi muda dapat melanjutkan perjuangan saya. Namun saya tetap memegang teguh konsep dan roh saya kepada generasi muda meski ada banyak yang tidak bisa menangkap. Apakah

nilai-nilai sudah bergeser ? Ini pertanyaan besar dan menakutkan saya. Bagaimana kalau nilai-nilai feminis : nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan juga bergeser?

Riwayat Penulis

Nama lengkap Brigida Intan Printina, M.Pd. biasa dipanggil Intan. Lahir di Madiun, 1 Februari 1991. Di besarkan hingga SMA di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tahun 2012 menyelesaikan studi sarjana keguruan di FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, hingga tahun 2013 meneruskan Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah dan menjadi lulusan termuda (April 2014) di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Selama menempuh S2 Pendidikan Sejarah di UNS, hari-hari juga disibukkan mengajar di SMA Regina Pacis Surakarta dan bekerja selama kurang lebih 2 tahun.

Akhir tahun 2015 menjadi pengajar kontrak di FKIP Pendidikan Sejarah USD, dan menjadi pegawai tetap yayasan November 2016.

Telah menulis beberapa karya di media massa lokal, artikel jurnal dan beberapa buku sebagai editor (buku Pancasila dan Sejarah Pendidikan) dan penulis buku suplemen bahan ajar Sejarah Asia Barat Modern.

MERAWAT MEMORI, MEMUPUK KEBANGSAAN Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia

Suatu angin segar tatkala mendengar bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya milik satu kalangan namun juga semua salah satunya kaum perempuan. Kebangsaan merupakan hasil perjuangan bersama baik pemuda dan pemudi atau sukarelawan dan sukarelawati. Hal ini perlu diketahui masa muda saat ini.

Dari segi personal Ibu dalam bahasa lebih bersifat mengayomi, dan mendidik dari dalam. Anak-anak pendidikan berasal dari Ibu dan mengelola mendapampingi kita dari berbagai hal. Oleh karena itu, peran ibu sangat penting. Karena di tangan ibulah generasi muda mulai dididik dibina dan disadarkan rasa kebangsaan. Dari segi luas Ibu sebagai perempuan dalam revolusi sungguh besar. Ibu-ibu ini pada masa Bung Karno memiliki andil yang begitu besar dari pemberantasan buta huruf hingga Kongres Internasional.

(Dr. Baskara T. Wardaya, Sejarawan)

Ternyata cara pandang feminis belum banyak meluas dikalangan kaum perempuan Indonesia... Lalu kita berpikir sebaiknya kita membuat skala preferensi berdasarkan yang paling mendesak bagi kepentingan perempuan Indonesia. Akhirnya kita memilih isu kekerasan terhadap perempuan, memperkuat gerakan perempuan, isu perempuan dan agraria... Dalam perbincangan ini pasti ada aliran energi (roh/spirit) dari saya ke mereka perempuan muda. Harapan saya, energi saya ini juga mengalir kemudian dimiliki generasi penerus...

(A. Nunuk Prasetyo Murniati, Pengasuh Padepokan Perempuan
GAIA & Aktivis Komisioner Komnas Perempuan)



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 236
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

ISBN 978-623-7092-38-4

